

**GAYA KEPEMIMPINAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP ELEKTABILITAS
KANDIDAT PETAHANA: Studi Keterpilihan Kusin yang Ketiga Kalinya pada
Pilkades 2018 di Desa Sikasur Kecamatan Belik Kab. Pemalang**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata I (S1)



Disusun Oleh :
FARADILLA NURAHMA
1906016041

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, saya menyatakan bahwa skripsi dari saudara :

Nama : Faradilla Nurahma

NIM : 1906016041

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Gaya Kepemimpinan dan Dampaknya Terhadap Elektabilitas Kandidat Petahana:
Studi Keterpilihan Kusin yang Ketiga Kalinya pada Pilkadaes 2018 di Desa Sikasur
Kecamatan Belik Kab. Pemalang

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 12 Desember 2022
Pembimbing,



Muhammad Mahsun, M.A

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**GAYA KEPEMIMPINAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP ELEKTABILITAS
KANDIDAT PETAHANA: Studi Keterpilihan Kusin yang Ketiga Kalinya pada Pilkades 2018
di Desa Sikasur Kec. Belik Kab. Pemalang**

Disusun oleh

**Faradilla Nurahma
1906016041**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 21 Desember 2022
dan telah dinyatakan lulus.



Ketua
Drs. H. Nur Syamsudin, M.A
NIP. 196805051995031003

Sekretaris

**Muhammad Mahsun, M.A
NIDN. 2025118501**

Penguji I

**M. Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 198505022019031007**

Pembimbing

**Muhammad Mahsun, M.A
NIDN. 2025118501**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Faradilla Nurahma menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Gaya Kepemimpinan dan Dampaknya Terhadap Elektabilitas Kandidat Petahana: Studi Keterpilihan Kusin yang Ketiga Kalinya pada Pilkadaes 2018 di Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 12 Desember 2022
Yang Menyatakan

Faradilla Nurahma
NIM 1906016041

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dan Dampaknya Terhadap Elektabilitas Kandidat Petahana: Studi Keterpilihan Kusin yang Ketiga Kalinya pada Pilkades 2018 di Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pematang". Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua sehingga dapat menjadi umat yang berakhlakul karimah dan memiliki pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa bagi penulis dan hasil akhir selama mengikuti proses perkuliahan di program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran selama menjadi mahasiswa, dan dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, serta nasehat selama penulis menimba ilmu pada program studi Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.A yang telah memberikan dukungan dan berbagai ilmu kepada penulis dalam perkuliahan.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Muhammad Mahsun, M.A yang juga selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis sehingga penulis mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap jajaran tenaga pendidik dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam memenuhi segala kebutuhan administratif dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Kusin selaku informan utama dalam penelitian yang penulis lakukan dan telah mengizinkan dan memberikan berbagai informasi kepada penulis serta bersedia meluangkan

waktunya untuk wawancara dengan penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.

8. Segenap narasumber yang bersedia dijadikan informan pendukung yang turut memberikan berbagai informasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhdopir dan Ibu Supriyatin, kakak tercinta Rizky Mundiati dan Haris Kurniawan, serta keponakan tersayang Razqa Ghaizan Kurniawan yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang, serta dukungan baik dari segi moral maupun material yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga kedua orang tua dan keluarga penulis selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan umur panjang aamiin.
10. Seluruh keluarga besar penulis, keluarga “Putu Yuni” yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Semoga seluruh keluarga penulis diberikan kesehatan, panjang umur, dan hidup yang berkah aamiin.
11. Rekan-rekan Ilmu Politik B dan seluruh rekan prodi Ilmu Politik 2019 yang telah memberikan canda tawa dan semangat bagi penulis, Semoga Allah meridhoi langkah kita menuju sukses aamiin,
12. Teman seperjuangan penulis, Muhamad Fikri, Yanun Anbiya, Jelita Nur Oktaviani Preeslyana, Anggita Febriyana, Auliya Saabiqotul Faizaah, Selly Sekarharum Putri, Eva Mulyati Br Pa, Alysia Nurul Faizaah, Qotrunnada, Putri Berlian Manik, Nur Alifah, Asri Tri Widia, Fitriyani Nur Hidayah, Isnaini Febriyana dan teman-teman yang lain, terima kasih telah menemani hari-hari penulis selama menjalani kehidupan rantauan di Semarang. Semoga ikatan pertemanan ini dapat terus terjalin selamanya dan sukses untuk kalian semua aamiin.
13. Rekan-rekan Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemasang (IMPP) UIN Walisongo Semarang, UKM Forum Studi Bahasa, UKM SKM Amanat, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkembang, belajar, dan berproses bersama dalam satu wadah organisasi sehingga penulis bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga.
14. Rekan-rekan KKN MMK Kelompok 40 Aditya Irfandani, Ayuf Mufakhidin, Rizal Eka, Ridwan Aji, Wildan Alfarisy, Huda Firmansyah, Zakiy Bikharul, Fitriyani Nur Hidayah, Asri T. Widia, Isnaini Febriana, Rida Rahmawati, Nisa Nur K, dan Lilis Kuraisin, yang telah bersama-sama menjalani hari-hari KKN dengan saling mendukung dan menjaga satu sama lain selama menyelesaikan pengabdian di Temanggung.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang

membangun ssangat penulis butuhkan agar skripsi ini dapat meningkatkan kualitas dan dapat berguna bagi para pembaca. Akhir kata penulis sampaikan terimakasih atas perhatiannya.

Semarang, 12 Desember 2022
Penulis

Faradilla Nurahma
1906016041

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam

Saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua tercinta saya Bapak Muhdopir dan Ibu Supriyatin yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal, yang selalu memanjatkan untaian do'a tulus disetiap langkah kaki saya tanpa henti untuk kesuksesan saya.

MOTTO

“Slow progress is better than no progress. Stay positive and never give up”

“Jadilah terbaik dimata Allah, jadilah terburuk dimata diri sendiri, dan jadilah sederhana dimata manusia”

(Ali bin Abi Thalib)

ABSTRAK

Pada kontestasi pemilu yang ada di Indonesia sejauh ini telah diwarnai oleh keterpilihan petahana dalam memperebutkan jabatan publik. Di lingkup desa tidak sedikit diantaranya calon kandidat petahana yang telah memimpin di periode sebelumnya dan berhasil menang kembali. Salah satunya adalah Kusin sebagai Kepala Desa terpilih pada pilkades 2018. Keberhasilan Kusin dalam memenangkan pilkades 2018 menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin pada periode sebelumnya yang telah mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Kusin merupakan satu-satunya Kepala Desa di Kecamatan Belik yang telah menjabat selama tiga periode berturut-turut sejak tahun 2006 – sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin selama menjadi Kepala Desa dan dampak dari model kepemimpinan yang dijalankan tersebut terhadap kemenangannya kembali di pilkades 2018.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, studi ini menggunakan teori gaya kepemimpinan dan teori legitimasi politik dengan menggambarkan fenomena dari data yang diperoleh di lapangan yang dibantu dengan metode penelitian kualitatif yang mengedepankan prosedur penelitian dengan menyajikan data deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Pada penelitian ini pemilihan narasumber dipilih secara purposive.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin adalah gaya kepemimpinan yang relatif demokratis. Hal tersebut dikarenakan pada kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin, dalam proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan BPD, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat lainnya. Sebagai seorang pemimpin, Kusin termasuk pemimpin yang bersedia menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahan desa, Kusin juga turut serta dalam segala kegiatan yang ada di desa dengan cara berpartisipasi secara langsung. Kusin merupakan sosok pemimpin mengutamakan kesejahteraan masyarakat, dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai kepala desa. Sementara itu, komunikasi yang dijalin oleh Kusin dan perangkat desa serta masyarakat umum adalah komunikasi yang dilakukan secara aktif. Gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin tersebut memiliki pengaruh terhadap legitimasi yang diberikan oleh masyarakat Desa Sikasur, karena kepemimpinan yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat umum sehingga mempengaruhi keterpilihannya kembali di pilkades tahun 2018

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Desa, Gaya Kepemimpinan, Legitimasi Politik

ABSTRACT

The election contestation in Indonesia so far has been colored by the election of incumbents in fighting for public office. In the village scope, there are not a few incumbent candidates who have led in the previous period and managed to win again. One of them is Kusin as the Village Head elected in the 2018 Pilkades. Kusin's success in winning the 2018 Pilkades shows that the leadership style carried out by Kusin in the previous period has earned the full trust of the community. Kusin is the only Village Head in Belik District who has held office for three consecutive terms from 2006 – present. This study aims to find out how Kusin's leadership style was carried out while he was the Village Head and the impact of this leadership model on his victory again in the 2018 Pilkades.

To answer the research questions above, this study uses leadership style theory and political legitimacy theory by describing phenomena from data obtained in the field assisted by qualitative research methods that prioritize research procedures by presenting descriptive data. The type of approach used is a case study approach. Collecting data in this study using the interview method and the documentation method. In this study the selection of informants was chosen purposively.

The results of this study indicate that the leadership style adopted by Kusin is a relatively democratic leadership style. This is because in the leadership carried out by Kusin, the decision-making process is carried out by way of deliberation and consensus with the BPD, village officials, and other community representatives. As a leader, Kusin is a leader who is willing to accept criticism and input from the public. In running the village government, Kusin also participates in all activities in the village by participating directly. Kusin is a leader who prioritizes the welfare of the community, by carrying out his duties and functions properly as the head of the village. Meanwhile, the communication that was established by Kusin and village officials and the general public was active communication. The leadership style carried out by Kusin had an influence on the legitimacy given by the people of Sikasur Village, because the leadership carried out was in accordance with applicable regulations and received approval from the general public so that it affected his re-election in the 2018 Pilkades

Keywords: Leadership, Village Head, Leadership Style, Political Legitimacy

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Tinjauan Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2. Sumber dan Jenis Data	Error! Bookmark not defined.
3. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
4. Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
KERANGKA TEORI.....	Error! Bookmark not defined.
A. Penjelasan Konseptual	Error! Bookmark not defined.
1. Konsep Dasar Kepemimpinan	Error! Bookmark not defined.
2. Elektabilitas.....	Error! Bookmark not defined.
3. Kandidat Petahana.....	Error! Bookmark not defined.
B. Teori.....	Error! Bookmark not defined.
1. Gaya Kepemimpinan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Legitimasi Politik	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
LANDSCAPE DESA SIKASUR DAN PROFIL KEPALA DESA....	Error! Bookmark not defined.
A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Sikasur	Error! Bookmark not defined.
1. Kondisi Geografis Desa Sikasur	Error! Bookmark not defined.
2. Kondisi Demografis Desa Sikasur	Error! Bookmark not defined.
3. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Desa Sikasur.....	Error! Bookmark not defined.
4. Sejarah Pemerintahan Desa Sikasur.....	Error! Bookmark not defined.

B. Profil Kepala Desa Sikasur	Error! Bookmark not defined.
1. Profil Genealogis Kusun	Error! Bookmark not defined.
2. Profil Pendidikan dan Perjalanan Karir Kusun Sebagai Guru Hingga Menjadi Kepala Desa	Error! Bookmark not defined.
3. Perjalanan Karir Politik Kusun	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
GAYA KEPEMIMPINAN YANG DIJALANKAN OLEH KUSIN SEBAGAI KEPALA DESA TIGA PERIODE DI DESA SIKASUR	Error! Bookmark not defined.
A. Pola Interaksi Kusun sebagai Kepala Desa dalam Musyawarah Desa ..	Error! Bookmark not defined.
B. Hubungan Kusun sebagai Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa	Error! Bookmark not defined.
1. Hubungan Kusun sebagai Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Error! Bookmark not defined.
2. Hubungan Kusun sebagai Kepala Desa dengan Perangkat Desa	Error! Bookmark not defined.
C. Hubungan Kusun sebagai Kepala Desa dengan Masyarakat Umum	Error! Bookmark not defined.
D. Kebijakan-kebijakan Kusun Selama Menjadi Kepala Desa	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN YANG DIJALANKAN KUSIN TERHADAP KEMENAGANNYA KEMBALI DI PILKADES TAHUN 2018	Error! Bookmark not defined.
A. Kekuasaan harus berjalan berdasarkan aturan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Aturan yang dibenarkan dan diyakini bersama	Error! Bookmark not defined.
C. Persetujuan dari pihak yang diperintah terhadap pihak yang berkuasa	Error! Bookmark not defined.
BAB VI	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks politik lokal, baik di tingkat daerah seperti kabupaten/kota maupun dalam tingkat desa diwarnai oleh keterpilihan petahana dalam memperebutkan jabatan publik seperti Bupati, Walikota, bahkan Kepala Desa. Keberadaan petahana sangat diperhitungkan dalam setiap kegiatan pemilu, hal ini dikarenakan petahana merupakan seseorang yang masih mempunyai dampak di sebuah wilayah pemilihan karena pernah menjadi pemimpin sebelumnya (Fadli, dkk 2018; Tiran, 2013; Khoiron, 2013; Fitrianingrum, 2017).

Majunya kandidat petahana dalam proses perebutan kekuasaan tentu saja mempunyai keuntungan tersendiri. Keuntungan tersebut yaitu calon kandidat petahana secara otomatis sudah mempunyai popularitas dan sudah dikenal oleh masyarakat sebagai seorang pemimpin sebelumnya. Selain itu, terjalinnya hubungan yang baik antara kandidat petahana dengan masyarakat juga dapat menambah penilaian khusus dihati masyarakat. Kemenangan petahana dalam pemilu juga bisa disebut sebagai agregat frame, yaitu pendistribusian suatu masalah yang ada di suatu daerah hingga petahana dapat memprioritaskan isu-isu tertentu, antara lain masalah ekonomi, masalah sosial, maupun masalah budaya (Nawawi, 2019). Hal ini sejalan dengan pendapat Fadli (2018) bahwa calon incumbent memiliki keunggulan yang signifikan jika dilihat dari segi kekuasaan yang terlihat (*visible forms of power*) dalam merebut simpati publik dengan mempromosikan program kerja yang telah dilakukan maupun program kerja yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang.

Selain itu, petahana juga memiliki keuntungan tersendiri karena dapat melakukan kampanye secara permanen. Melalui penggunaan program kerja pemerintah sebagai wadah untuk kampanye langsung maupun tidak langsung. Sebelum calon-calon kandidat lain mempersiapkan untuk pemilu, petahana bisa memulai lebih dulu proses kampanyenya seiring berjalannya waktu sembari melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin suatu daerah (Tiran, 2013). Kemenangan petahana ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti bagaimana kepemimpinan kandidat petahana dalam menjalankan pemerintahan pada periode sebelumnya serta bagaimana seorang petahana mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan bagaimana kandidat petahana membangun hubungan social dengan masyarakat setempat.

Fenomena diatas menarik beberapa sarjana untuk melakukan kajian tentang kepemimpinan dan keterpilihan kandidat petahana dalam politik elektoral. Sejumlah penelitian berpendapat bahwa keberhasilan kandidat petahana dalam pemilihan umum biasanya merupakan hasil dari kemampuan petahana untuk memperoleh dukungan dari elit desa atau lokal, seperti pemuka agama, pemuka

adat, atau masyarakat itu sendiri. Peluang kemenangan incumbent dapat ditemukan dalam pencapaian program kerja, inisiatif pembangunan, dan kebijakan yang telah ditetapkan selama pemerintahan yang dijalankan olehnya selama ini. Selain itu, kemenangan petahana juga dapat diukur melalui kuatnya kepercayaan publik terhadap kinerja petahana, strategi yang dilakukan oleh calon kandidat baik itu dengan pembentukan tim sukses yang solid, pemanfaatan jabatan juga dalam proses kampanye kepada masyarakat juga dapat mempengaruhi kemenangan seorang petahana (Fadli, 2018; Rohman, 2013). Hal ini sesuai dengan pernyataan Smith (2005) bahwa yang menjadi sebuah kekuatan utama dalam upaya pemenangan seorang kandidat baik itu petahana atau bukan yaitu dengan membangun tim yang kuat (koalisi pemenang) dan fokus terhadap kelompok sasaran pemilih, serta memiliki komunikasi politik yang baik dan dapat menguasai media dalam proses pemasaran calon kandidat.

Dalam kontestasi pemilu yang ada di Indonesia, kemenangan petahana juga seringkali terjadi di lingkup desa dalam proses pemilihan kepala desa. Pada kegiatan pemilihan kepala desa tidak sedikit diantara calon kandidatnya adalah seorang petahana (Bafadhal, dkk 2020; Eriko, dkk 2019; Endik, dkk 2018; Anggara, dkk 2019). Namun, tidak semua calon kepala desa petahana berhasil memenangkan pemilihan tersebut. Tidak sedikit pula calon kandidat yang berasal dari petahana berhasil memenangkan pilkades tersebut.

Kepala desa adalah pejabat tertinggi di desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (2), kepala desa bertanggung jawab mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan seorang kepala desa yang kompeten dengan menjalankan sebuah gaya kepemimpinan yang baik (Pratiwi, 2018). Kepemimpinan tumbuh secara alami diantara orang-orang yang memiliki tujuan untuk dicapai dalam suatu organisasi. Hanya seorang pemimpin yang mampu menjalankan kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk membimbing dan kapasitas yang tidak perlu dipertanyakan lagi untuk mempengaruhi sikap individu dan kelompok. "Leadership is the capacity to persuade a group of people to pursue a goal." (Stephen P. Robbins, 2001).

Kepala desa yang berfungsi sebagai pemimpin di desa menggunakan perilaku atau model kepemimpinan tertentu selama masa jabatannya dengan tujuan membina hubungan positif di antara semua anggota masyarakat. "Gaya kepemimpinan seseorang adalah kebiasaan atau tindakan yang digunakan ketika mencoba mempengaruhi orang lain" (Thoah, 2001). Oleh sebab itu, tujuan yang ingin dicapai oleh seorang pemimpin kepala desa secara langsung memiliki keterkaitan dengan model kepemimpinan yang dijalankan pada saat menjabat sebagai kepala desa. Perilaku

kepemimpinan yang dijalankan secara langsung dapat mempengaruhi penilaian dan kepercayaan masyarakat setempat terhadap pemerintahannya.

Studi yang dikaji para sarjana sebelumnya diatas pada umumnya hanya terfokus pada strategi kampanye yang dilakukan oleh para petahana. Namun, tidak banyak studi yang mencoba mengkaji tentang model kepemimpinan yang dijalankan oleh para petahana dapat mempengaruhi keterpilihannya ditingkat desa. Untuk itu penulis hendak mengembangkan studi-studi yang dikaji sebelumnya dengan menganalisis gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin selama dua periode berturut-turut sehingga dapat mempengaruhi keterpilihannya di pilkades Desa Sikasur tahun 2018 untuk dijadikan sebagai fokus kajian.

Desa Sikasur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Belik Kabupaten Pematang. Kecamatan belik terdiri dari dua belas desa yang masing-masing diantaranya dipimpin oleh kepala desa, baik yang baru menjabat maupun kepala desa yang telah menjabat di periode sebelumnya. Berikut daftar nama desa dan daftar nama kepala desa yang pernah menjabat sejak tahun 2006 – 2024.

Table 1 Daftar Kepala Desa yang Pernah Menjabat di Kecamatan Belik

No.	Nama Desa	Periode Kepemimpinan	Nama	Keterangan
1.	Badak	2006 – 2012	SABAR MARYANTO	
		2012 – 2018	KAPIDIN	Tidak Selesai Karena Meninggal Dunia pada Tahun 2015
		2015 – 2016	EDIYANTO	PJ. Kepala Desa
		2016 – 2018	EDY WARDOYO	Kepala Desa Antar Waktu
		2018 – sekarang	BURHANUDIN	
2.	Belik	2006 – 2012	RATNO	
		2012 – 2018	RATNO	
		2018 – sekarang	NUR AJIZAH	
3.	Beluk	2008 – 2016	UNTUNG PRIYANTO	Tidak Selesai Karena Meninggal Dunia pada Tahun 2010
		2010	MAKRI	PJ. Kepala Desa
		2010 – 2016	USNAN PUJANTO	
		2016	RINTO	PJ. Kepala Desa
		2016 – 2022	YUNUS SUPRIYANTO	
4.	Bulakan	2006 – 2012	ENI DWI ASIH	
		2012 – 2018	ROHIM	

		2018 – 2024	SIGIT PUJIONO, S.Hut	
5.	Gombang	2006 – 2012	YATIN SUMANTRO	
		2012 – 2018	HADIATUN N	
		2018 – 2024	HADIATUN N	
6.	Gunungjaya	2006 -2012	TASRIP TEJO SUSILO	
		2012 – 2018	SUGENG RIYADI	
		2018 – sekarang	SUGENG RIYADI	
7.	Simpur	2006 – 2012	JAENUDIN	
		2012 – 2018	HARYONO	Tidak Selesai Karena Kasus MP3KI pada Tahun 2016
		2016 – 2017	EDY SUWARDI	PJ. Kepala Desa
		2017 2018	PONIMAN	Kepala Desa Antar Waktu
		2018 – sekarang	PONIMAN	
8.	Sikasur	2006 – 2012	KUSIN, S.Pd	
		2012 -2018	KUSIN, S.Pd	
		2018 – 2024	KUSIN, S.Pd	
9.	Kalisaleh	2006 – 2012	SOBIRIN	
		2012 – 2018	SOBIRIN	Tidak Selesai Karena Meninggal Dunia pada Tahun 2013
		2013 – 2014	SUTOPO, S.H	PJ. Kepala Desa
		2014 – 2019	JENI	Tidak Selesai Karena Meninggal Dunia pada Tahun 2019
		2019 – 2021	AGUS PRATIKNO	PJ. Kepala Desa
		2021 – sekarang	BEJO UTOMO	
10.	Kuta	2007 – 2008	DARTO, S.Pd	Tidak Selesai Karena diangkat menjadi PNS
		2008 – 2015	JOKO RUSYANTO	
		2015 – 2020	SADIRUN	
		2021 – 2026	DARMO	
11.	Mendelem	2007 – 2013	SRI SULISTOWATI, SE	
		2013 -2019	SAIRIN	
		2019 – sekarang	SAIRIN	

12.	Gunungtiga	2006 – 2012	MAKMUR	
		2012 -2018	MAKMUR	
		2018 – 2024	NAHYONO	

Sumber: Manual Research di 12 Desa di Kecamatan Belik

Berdasarkan data hasil survey di dua belas (12) desa yang ada di Kecamatan Belik, Desa Sikasur merupakan satu-satunya desa yang ada di Kecamatan Belik yang dipimpin oleh kepala desa petahana yang menjabat selama tiga periode berturut-turut. Saat ini, Desa Sikasur dipimpin oleh Kusin sebagai kepala desa petahana yang menjabat sejak tahun 2006 – 2018. Kemudian pada pilkades tahun 2018 Kusin mencalonkan dirinya kembali dan berhasil mempertahankan jabatannya sebagai kepala desa yang artinya ia akan menjabat selama tiga periode masa maksimal yang diberikan oleh konstitusi untuk menjadi seorang kepala desa. Untuk itu fokus kajian pada studi ini akan dilakukan dengan dua arena analisis. Pertama, yaitu menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin sebagai kepala desa dua periode yaitu sejak tahun 2006-2018. Yang kedua, yaitu dengan menganalisis atau mengkaji keterkairan gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin terhadap kemenangannya kembali di pilkades tahun 2018.

Untuk mengkaji dua fokus kajian diatas, peneliti telah menganalisis data yang didapatkan untuk melihat bagaimana gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin dengan cara melihat bagaimana interaksi yang dilakukan oleh Kusin sebagai kepala desa petahana pada saat pelaksanaan musyawarah desa, serta dengan melihat hubungan yang terjalin antara Kusin sebagai kepala desa dengan perangkat desa lain dan lembaga-lembaga yang ada di desa seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Selain hubungan dengan pemerintah desa, hubungan yang terjalin antara Kusin dengan masyarakat umum juga dijadikan bahan pertimbangan untuk melihat bagaimana gaya kepemimpinan yang dijalankan olehnya selama ini. Selain itu, penulis juga akan melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kusin selama menjabat sebagai kepala desa apakah kebijakan tersebut pro rakyat atau malah sebaliknya.

Studi ini penting dilakukan untuk memberikan suatu pengetahuan atau sumbangsih untuk menambah studi tentang model kepemimpinan dan kemenangan kandidat kepala desa dalam pilkades. Sejauh ini studi seperti tersebut diatas sudah didominasi oleh strategi politik dan lain sebagainya. Tetapi studi yang mengaitkan tentang kepemimpinan dan kemenangan seorang kandidat kepala desa petahana belum banyak dilakukan. Di sinilah sumbangsih kajian yang akan dilakukan oleh penulis terhadap diskursus politik lokal di level desa yang ada di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian utama yaitu:

1. Bagaimana gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin selama menjadi kepala desa di Desa Sikasur?
2. Bagaimana gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin tersebut berdampak pada kemenangannya kembali di pilkades tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin sebagai kepala desa di Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya selama tiga periode berturut-turut.
2. Untuk mengetahui dampak dari gaya kepemimpinan yang dijalankan terhadap kemenangan Kusin pada Pilkades Desa Sikasur Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa jurusan Ilmu Politik terkait kepemimpinan politik kepala desa petahana dalam mempertahankan jabatan publik. Penelitian ini juga memberikan penjelasan bahwa kemenangan petahana yang menjabat selama lebih dari satu periode tidak melulu berkaitan dengan strategi kampanye tetapi bisa juga berkaitan dengan kepemimpinan yang dijalankan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai kepemimpinan politik kepala desa petahana. Studi ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi kosntitusi pendidikan bidang politik dalam mempersiapkan mahasiswa yang professional untuk menjadi pemimpin penerus bangsa.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ialah salah satu bagian penting dari sebuah penelitian. Tinjauan pustaka menjelaskan terkait hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topik yang akan diteliti. Tinjauan pustaka digunakan untuk melihat keserasian serta gambaran penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Terkait dengan penelitian tentang Kepemimpinan Politik, telah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti atau para sarjana. Persoalan tentang kepemimpinan politik Kepala Desa, gaya kepemimpinan yang dijalankan bukanlah hal yang baru, namun secara mendalam belum ada yang meneliti lebih lanjut tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Tiga Periode (Petahana) di Desa Sikasur Kabupaten Pematang Jaya. Penulis belum menjumpai peneliti terdahulu terkait penelitian ini, akan tetapi penulis mencoba mencari penelitian yang relevan dengan topik yang akan dikaji.

E.1 Studi kemenangan petahana dalam kaitannya dengan strategi politik

Dalam kajian yang ditulis oleh Khoiron (2018) tentang kemenangan petahana dengan judul “*Kemenangan Petahana (Incumbent) pada Pilkada 2015 di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang: Strategi Politik dan Marketing Politik*”. Kajian ini memberikan penjelasan terkait kemenangan yang diraih oleh kandidat petahana dalam pilkada. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, kajian ini mampu mendeskripsikan bahwa keterpilihan calon kandidat petahana disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor modal sosial (social capital), merebut simpati para pemilih dengan cara menyampaikan keberhasilan yang dicapai pada saat memimpin di periode sebelumnya, memaksimalkan program kerja desa, dan menitik beratkan proses kampanye pada metode door to door pada seluruh warga masyarakat. Kajian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi penulis dalam menyusun kerangka teori.

Dalam pesta demokrasi yang ada di Indonesia, kemenangan kandidat petahana dalam pemilu bukanlah hal yang baru. Kemenangan petahana tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti strategi dan lain sebagainya. Hal ini berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2020), dengan judul “*Strategi Marketing Politik Kepala Desa Petahana pada Pilkades di Desa Sidomukti Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur*”. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa untuk memenangkan pemilu, kades petahana di Sidomukti menggunakan beberapa strategi marketing politik seperti merumuskan visi dan misi serta program kerja yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat desa. Strategi yang dilakukan selanjutnya adalah kegiatan kampanye secara terus-menerus dan konsisten baik dalam forum formal maupun informal. Dalam strategi kampanye yang dilakukan, kandidat petahana ini menjual nama dirinya dengan hasil kerja nyatanya pada periode sebelumnya dan keberhasilan program kerjanya. Penulis juga mengatakan bahwa kandidat kepala desa dapat menjaga eksistensinya sehingga dapat terpilih kembali untuk ketiga kalinya karena dipengaruhi oleh dirinya yang melibatkan birokrasi dalam pemerintahan desa.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan Dzul Fadli (2018) adalah kemenangan kandidat petahana dengan melihat perspektif powercube yang berjudul “*Kemenangan Petahana dalam Kontestasi Pilkada Serentak Tahun 2018: Ditinjau dari Perspektif Powercube*” dapat dijadikan rujukan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Menurut kajian Dzul Fadli, kemenangan petahana dalam Pilkada 2018 dipengaruhi oleh beroperasinya teori kubus kekuatan bentuk-bentuk kekuasaan yang kasat mata dan tersembunyi, termasuk peluang merebut simpati publik melalui pemaparan program-program pembangunan yang telah diwujudkan sebagai bentuk investasi politik dan politisasi birokrasi melalui mobilisasi aparat sipil negara. Penelitian ini dan penelitian-penelitian lainnya memiliki beberapa kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan salah satu variabel penelitian ini

sesuai dengan percakapan yang akan penulis analisis. Untuk menulis skripsi, penulis dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber informasi. Variabel penelitian kedua terkait dengan model kepemimpinan ialah letak perbedaan dengan penelitian selanjutnya.

Studi selanjutnya dari Muzadi (2020) dalam kajiannya yang berjudul “*Kemenangan Hatrick: Strategi Keterpilihan Een Rusmiyati dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kota Cirebon*”. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Een Rusmiyati yang kembali memenangkan pemilu legislative tahun 2019 di Kota Cirebon dan saat ini sedang menjalankan periode ketiganya. Dalam penelitian ini menunjukkan bekerjanya hukum “reward and punishment” karena kandidat petahana ini mampu mempertahankan konstituennya dengan tetap menjalankan fungsi representasi politiknya sehingga berpengaruh pada keterpilihannya.

Yang menjadi salah satu faktor dari kemenangan petahana adalah tentang strategi yang dijalankan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abrori (2019) dengan judul “*Strategi Pemenangan Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015*”. Dari penelitian tentang strategi ini, penulis menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh tim sukses kandidat petahana untuk memenangkan pemilu adalah dengan cara melakukan gerakan structural, dengan melakukan gerakan langsung pada partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menggerakkan NU beserta banom-banomnya seperti IPNU, IPPNU, Anshor, dan Muslimat. Selain gerakan structural, kandidat petahana ini juga melakukan gerakan non structural yang meliputi pendekatan kepada ormas, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha dan penguatan birokrasi. Strategi lain yang juga dilakukan adalah strategi pendekatan. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat baik tokoh agama ataupun tokoh lain. Strategi inilah yang akhirnya dapat memenangkan kembali kandidat petahana pada pilkada di Surabaya tahun 2015.

Zeliana, dkk (2021) tentang “*Strategi Pemenangan Petahana Pasangan Hj. Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2015*”. Dalam kajian ini, penulis menyatakan bahwa strategi pemenangan yang dilakukan oleh calon kandidat petahana adalah menggunakan kekuatan politik mulai dari kekuatan media untuk membuat citra yang positif untuk pasangan calon, dan menggunakan kekuatan birokrasi. Kekuatan politik yang paling penting pada strategi ini adalah kekuatan yang berasal dari 6 parati yang mengusung pasangan calon petahana ini dengan membentuk tim pemenangan yang dapat menambah masa pemilih disetiap wilayah.

Studi lain oleh Rohman (2010) tentang “*Strategi Pemenangan Petahana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ngawi 2010*”. Dalam kajian tentang strategi pemenangan,

penulis berpendapat bahwa kemenangan petahana pada pemilu di Ngawi diperoleh melalui beberapa strategi seperti koalisi partai pengusung, pembentukan tim pemenangan yang solid, strategi jaringan politik, pemanfaatan jabatan yang dipegang oleh kandidat petahana, praktik money politik, dan pelaksanaan kampanye. Persamaan kajian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah variabelnya membahas tentang strategi pemenangan petahana. Namun, kajian ini hanya memfokuskan pada strategi kemenangan.

E.2 Studi kemenangan petahana dalam kaitannya dengan kepemimpinan yang dijalankan oleh aktor politik

Dalam kajian terdahulu yang ditulis oleh Kurniasih (2020) tentang kepemimpinan petahana yang berjudul "*Citra Kepemimpinan Jokowi sebagai Petahana pada Pemilihan Presiden 2019: Analisis Semiotika dalam Infografis di Media Sosial Mojok.co*". Kajian ini menjelaskan bahwa dalam kepemimpinannya, Jokowi memiliki sifat-sifat superior seperti unggul, dominan, kuat, dapat mengelola pemerintahan dengan baik. Selain itu, Jokowi sebagai seorang pemimpin petahana juga berjiwa muda dalam menjalankan kepemimpinannya dengan mewujudkan sikap dinamis, percaya diri, cerdas, dan modis. Namun, dibalik hal itu Jokowi sebagai seorang pemimpin tetap menanamkan sikap membumi dengan kesederhanaan sebagai ciri khasnya. Kepemimpinan yang dijalankan olehnya selama ini telah membentuk citra Jokowi dihadapan masyarakat sebagai petahana pada pilpres tahun 2019.

Studi lain dari Lagantondo (2019) dengan judul "*Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tampemadoro Kec. Lage Kab. Poso*". Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan teknik kualitatif untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Penulis cukup membuktikan bahwa kepala desa di Tampemadoro menggunakan bentuk kepemimpinan yang konsultatif, partisipatif, demokratis, dan memotivasi. Namun, pendekatan kepemimpinan umum belum berjalan dengan baik. Penelitian ini memiliki variabel penelitian yang sama dengan penelitian penulis selanjutnya yaitu model atau gaya kepemimpinan yang digunakan oleh kepala desa saat ini di Desa Sikasur, Kab. Pematang. Maka dari itu kajian ini dapat dijadikan bahan acuan dalam penulisan skripsi.

E.3 Studi kemenangan petahana dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang dimiliki oleh kandidat petahana

Kajian selanjutnya adalah kajian yang dilakukan oleh Wahyundri (2021) dengan fokus kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan petahana dengan judul "*Faktor-faktor Kemenangan Petahana pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Solok Pada Masa Pandemi*". Menurut penulis, yang menjadi faktor dari kemenangan kandidat petahana dalam

pilkada tersebut adalah status sosial dari pemimpin petahana yang telah menjabat pada periode sebelumnya, peranan birokrasi yang dijalankan selama ini juga menjadi salah satu pengaruh pada kemenangannya, adanya kerja sama tim kemenangan yang apik sehingga dapat membantu kandidat petahana untuk memperoleh suara, selain itu kandidat petahana ini juga memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana dalam proses pemasaran pencalonannya sebagai calon kepala daerah, dan juga yang menjadi faktor lain adalah pemanfaatan dukungan yang didapat dari elit lokal maupun pemuka agama yang ada di daerah setempat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitrianingrum dan Sukmajati (2017) tentang “*Analisis Kemenangan Petahana (Studi Kasus Badingah, Bupati Gunung Kidul Dua Periode)*”. Dalam penelitiannya, penulis mengatakan bahwa status yang dipegang oleh kandidat petahana diibaratkan sebagai pisau yang memiliki dua mata yang tajam. Dalam hal ini, kandidat petahana memiliki potensi kemenangan yang tinggi tetapi disisi lain juga memiliki beberapa keterbatasan serta kritik dari masyarakat. Pada kasus ini, Bupati Gunung Kidul dapat mempertahankan jabatan politiknya karena kecerdasan sosial yang dimiliki olehnya dan kepiawaiannya dalam membangun komunikasi politik dengan warganya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu metode riset yang digunakan untuk mengeksplorasi atau memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial (Cresswell, 2013).

Penelitian kualitatif ini akan dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Menurut Cresswell (2014) pendekatan studi kasus merupakan sebuah strategi dalam penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki suatu hal secara cermat dengan cara mengumpulkan informasi-informasi menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat mengkaji isu teoritis dengan data-data yang telah dikumpulkan di lapangan. Maka dari itu, diperlukan deskripsi secara rinci dan mendalam terhadap suatu kondisi atau fenomena tentang fakta yang sebenarnya terjadi. Observasi dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan sebuah instrument untuk menggali informasi lebih mendalam (Semiawan, C.R, 2010).

2. Sumber dan Jenis Data

Untuk mendapatkan informasi atau data penelitian, terdapat dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah ide yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli atau sumber yang pertama memuat tentang informasi atau data penelitian (Rahmadi, 2011). Sumber data primer pada penelitian ini adalah Kusin sebagai Kepala Desa Sikasur tiga periode. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kusin sebagai kepala desa tiga periode dan beberapa staf pemerintah desa Sikasur.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang diperoleh dari sumber yang dibuat oleh orang lain atau peneliti terdahulu bukan langsung dari lapangan (Nugrahani, 2014). Buku-buku, jurnal penelitian, artikel, website, dan media cetak dan elektronik yang mencakup pokok bahasan penelitian ini dijadikan sebagai sumber data sekunder untuk penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, baik pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan observasi dilakukan untuk mendapatkan potret riil dari suatu fenomena untuk menjawab sebuah pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan pengamatan langsung di lapangan yaitu di Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, untuk mengamati bagaimana gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin sebagai kepala desa petahana sejak periode pertama hingga periode terakhirnya dengan melihat bagaimana interaksi yang dilakukan oleh Kusin sebagai kepala desa pada saat pelaksanaan musyawarah desa, serta melihat bagaimana hubungan yang terjalin antara Kusin dengan perangkat desa lain dan lembaga-lembaga yang ada di desa seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kemudian bagaimana hubungan yang terjalin antara Kusin dengan masyarakat dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kusin selama menjabat sebagai kepala desa apakah kebijakan yang dibuat pro rakyat atau malah sebaliknya. Setelah proses observasi dilaksanakan, segala informasi yang telah ditemukan akan diproses serta dianalisis secara mendalam dalam bentuk laporan penelitian (Rahardjo, 2011).

b. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi atau tanya jawab antara dua pihak yaitu *interviewer* (pewawancara) dan *interviewee* (yang diwawancarai). Metode ini merupakan sebuah proses untuk mendapatkan fakta-fakta atau data dengan cara melakukan komunikasi langsung dengan responden (Supardi, 2005). Dalam proses wawancara, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tujuan untuk menggali pengalaman, pendapat, dan fakta terkait kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala desa petahana tersebut.

Dalam proses wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan informan secara langsung dengan cara mendatangi kantor desa di Desa Sikasur ataupun dengan cara mendatangi kediaman informan. Proses tanya jawab dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada informan dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Beberapa informan atau narasumber yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Desa Sikasur, Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, dan Kepala Dusun Siparuk), Ketua BPD Desa Sikasur, Ketua BUMDes Mahardika Sikasur, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama.

c. Studi Dokumen dan Literatur

Dokumentasi merupakan sumber data terkait catatan peristiwa yang digunakan untuk melengkapi penelitian berbentuk tertulis, ataupun karya-karya monumental yang memberikan informasi untuk proses penelitian yang dilakukan (Nilamsari, 2014). Kegiatan dokumentasi ini bertujuan untuk menambah informasi yang ada dalam bentuk surat, peta, catatan, arsip foto, hasil rapat, maupun jurnal kegiatan yang dihasilkan pada saat observasi lapangan. Hal ini dapat melengkapi dan menguatkan penemuan-penemuan yang ada dilapangan sebagai bukti kebenaran dan keabsahan data. Studi dokumen seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, ataupun notulensi hasil musdes yang ada di Desa Sikasur, merupakan data pendukung yang membantu penulis dalam mengembangkan analisis terhadap data-data yang terkait dengan kajian penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses yang dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan, dokumen-dokumen berupa laporan, sehingga dapat menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi substansif (Moloeng, 1988). Teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik induktif. Teknik induktif merupakan teknik analisis data dengan cara memahami sesuatu dengan membuat pengamatan khusus yang kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan berdasarkan pada hasil pengamatan tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga elemen dasar yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2018).

a. Reduksi Data

Reduksi data, mereduksi data berarti menguraikan atau membuat laporan terperinci terkait data yang telah diperoleh pada proses wawancara. Reduksi data merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus dalam proses pengumpulan, memilih data-data penting yang berhubungan dengan penelitian sampai pada saat laporan akhir tersusun secara lengkap. Selain itu reduksi data juga mendukung analisa yang tajam dan tersusun sehingga dapat diambil kesimpulan akhir.

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, tahapan selanjutnya adalah proses penyajian data yang akan memudahkan penulis untuk memahami dan memberikan analisis data. Penyajian informasi yang terkumpul dalam penelitian kualitatif ini disusun dalam bentuk teks yang nantinya akan digunakan dalam proses penarikan kesimpulan pada hasil penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Pada proses ini, kesimpulan yang dibuat haruslah disusun dengan rapi dan didalamnya mencakup penjelasan terkait model kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin sebagai kepala desa di Desa Sikasur. Hal ini dikarenakan kesimpulan yang ditulis oleh peneliti harus dapat dipertanggung

BAB II

KERANGKA TEORI

Pada bab ini akan membahas tentang definisi konseptual yang terdiri dari penjelasan mengenai konsep dasar kepemimpinan, definisi elektabilitas, dan definisi kandidat petahana. Selain membahas tentang definisi konseptual, bab ini juga membahas tentang kerangka teori yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Terdapat dua kerangka teori yaitu teori gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ronald Lippit & Ralph K. White dan teori legitimasi Politik yang dikemukakan oleh David Beetham untuk menganalisis dan melihat bagaimana gaya kepemimpinan yang di jalankan oleh Kusin sebagai kepala desa yang telah menjabat selama tiga periode berturut-turut di Desa Sikasur Kecamatan Belik.

A. Penjelasan Konseptual

1. Konsep Dasar Kepemimpinan

Kepemimpinan dapat dipahami dalam dua cara yang berbeda yaitu sebagai kemampuan untuk memotivasi dan mempengaruhi orang lain, serta sebagai strategi untuk membuat orang setuju untuk melakukan sesuatu secara sukarela. Kepemimpinan adalah proses di mana pemimpin harus mengambil tindakan untuk membimbing tim atau organisasi. Menurut John Gardner (1988, dalam Syaridudin, 2004), kepemimpinan memerlukan lebih dari sekedar memegang posisi kekuasaan.

Selain itu, kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi strategi, tujuan, dan komitmen untuk menegakkan, dan menciptakan budaya organisasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Harbani (2008) bahwa kepemimpinan adalah kemampuan membangun komunikasi dengan pihak atau individu lain dalam rangka membujuk mereka untuk secara sadar bersedia mengikuti kehendak pemimpin, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi berbagai kegiatan yang terlibat dalam setiap kegiatan dalam tim atau organisasi.

Kepemimpinan digambarkan sebagai proses kompleks yang digunakan seorang pemimpin untuk memotivasi pengikutnya untuk melaksanakan tugas, mencapai tujuan, dan mewujudkan visi dan misinya. Seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang baik seperti sikap percaya diri, etika, pengetahuan yang luas dan berbagai keahlian lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Syarifudin (2004) berpendapat bahwa kepemimpinan adalah metode untuk meyakinkan orang-orang di dalam dan di luar organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam situasi dan lokasi tertentu.

Kepemimpinan ialah proses mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan yang berkaitan dengan kelompok (Djarmiko dan Hayati, 2002). Definisi kepemimpinan ini memiliki tiga elemen penting, yaitu: (1) Kepemimpinan melibatkan banyak orang, baik pengikut maupun bawahan. (2) Kekuasaan harus didistribusikan secara merata di antara anggota kelompok dan pemimpin. (3) Kemampuan untuk mempengaruhi tindakan pengikut melalui penggunaan berbagai bentuk kekuasaan.

Pada hakikatnya, kepribadian, keterampilan, dan kemampuan seorang pemimpin merupakan beberapa karakteristik yang dapat menjadikan mereka sebagai seorang pemimpin. Kepemimpinan juga diartikan sebagai rangkaian kegiatan seorang pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dari kedudukan atau posisi pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan merupakan sebuah hubungan antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mendapatkan sebuah amanah dengan memiliki sikap dan gaya ataupun perilaku yang baik untuk mengatur orang lain atau mengatur sebuah organisasi (Wahjosumidji, 1987).

Menurut Young (1996, dalam Pratiwi, 2018), kepemimpinan adalah semacam bentuk dominasi berdasarkan keterampilan pribadi individu yang mampu menginspirasi atau mengajak orang lain untuk mencapai sesuatu berdasarkan penerimaan kelompok. Tiga komponen penting termasuk dalam sebuah definisi, yaitu:

- 1) Kepemimpinan adalah suatu konsep relasi, dimana kepemimpinan dapat berjalan jika ada proses relasi dengan orang lain atau dengan pengikutnya
- 2) Kepemimpinan merupakan sebuah proses, dimana ada pemimpin maka pemimpin tersebut harus melakukan sesuatu
- 3) Dalam kepemimpinan, seorang pemimpin harus bisa membujuk seseorang untuk mengambil sebuah tindakan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan otoritasnya, menciptakan model kepemimpinan sendiri yang dapat menjadi teladan, menentukan sasaran dan mengkomunikasikan visi dan misinya terhadap pengikutnya.

Seorang pemimpin harus memiliki karakter dan kepribadian yang lebih unggul dan harus memperlihatkan keberaniannya untuk memimpin para pengikutnya dengan disertai rasa tanggung jawab yang tinggi. Setiap manusia tentu saja memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Maka dari itu agar dapat mempunyai seorang pemimpin yang unggul perlu adanya proses pembangunan karakter dan kepribadian untuk membentuk jiwa kepemimpinan sejak dini. Mulai dari memimpin diri sendiri hingga memimpin bangsa dan negara (Sholeh, 2013).

Menurut Hayati (2002), kepemimpinan dilihat sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi segala kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan anggota kelompok. Kepemimpinan menurut Hayati (2006) diklasifikasikan dalam beberapa definisi sebagai berikut:

- 1) Kepemimpinan sebagai focus dalam proses kelompok
- 2) Kepemimpinan sebagai suatu kepribadian
- 3) Kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi orang lain
- 4) Kepemimpinan sebagai penggunaan pengaruh
- 5) Kepemimpinan sebagai tindakan ataupun tingkah laku
- 6) Kepemimpinan sebagai hubungan kekuasaan
- 7) Kepemimpinan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan
- 8) Kepemimpinan sebagai hasil dari proses interaksi
- 9) Kepemimpinan sebagai perbedaan peran
- 10) Kepemimpinan sebagai inisiasi dari struktur

Dengan berdasarkan beberapa definisi kepemimpinan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan seorang pemimpin untuk dapat mempengaruhi orang lain atau pengikutnya dalam situasi tertentu agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu.

2. Elektabilitas

Secara bahasa elektabilitas berasal dari kata "*elect*" yang artinya memilih. Elektabilitas merupakan sebuah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas dapat ditingkatkan dengan pencitraan politik. Citra politik memiliki keterkaitan dengan pembentukan pendapat umum. Hal ini dikarenakan, sebuah pendapat umum yang muncul pada dasarnya adalah berawal dari citra politik (Meliala dan Nurdiansyah, 2019). Sedangkan menurut Sugiyono (2008, dalam KKBI) untuk meningkatkan sebuah elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan populer. Dalam dunia politik, terdapat sebuah konsep elektabilitas, maka elektabilitas dari calon kandidat adalah calon kandidat yang mendapatkan kepercayaan dari publik, sehingga publik memiliki keinginan untuk memilih.

Kata elektabilitas secara umum selalu berkaitan dengan pemilu, baik itu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah seperti bupati, atau walikota hingga pemilihan kepala desa yang mulai muncul jelang pemilu yang ada di Indonesia. Kata elektabilitas bisa dikaitkan dengan sosok yang nantinya akan dipilih dalam proses pemilu. Elektabilitas dapat tercipta jika calon kandidat sudah memiliki popularitas sebelumnya. Popularitas merupakan sebuah tingkat keteneran seseorang dimata public. Meskipun begitu, dengan memiliki popularitas tidak menjamin seorang kandidat layak untuk dipilih dan masyarakat juga belum tentu memilih

kandidat tersebut hanya dengan tingkat popularitasnya saja. Hal yang sangat menentukan peningkatan popularitas dan elektabilitas dari calon kandidat adalah teknik kampanye yang dilakukan (Yolanda, 2017).

Menurut Kurniawan (2018) pemerintah atau calon kandidat yang berelektabilitas akan didukung dan diterima oleh mayoritas masyarakat dengan sendirinya, karena masyarakat telah mengenal tokohnya dan memberikan kepercayaan penuh dan menilai bahwa kepentingan masyarakat dapat dilindungi oleh tokoh tersebut karena memiliki elektabilitas yang bagus. Dalam hal ini, pemerintah dipercaya dapat mengatasi segala masalah baik secara politik maupun secara teknis. Maka dari itu pemerintah dianggap kuat dan berwibawa, kuat dalam hal ini berarti kandidat tersebut memiliki dukungan yang luas, sedangkan berwibawa berarti segala keputusan dan kebijakannya dapat diterima dan diikuti oleh rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi tentang elektabilitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa elektabilitas merupakan sebuah hal yang meliputi perilaku, sikap dan kepribadian, dan persepsi. Perilaku tersebut berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh calon kandidat atau pemerintahan, kepribadian dan sikap berkaitan dengan perasaan dan emosi, dan persepsi berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan penilaian yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, elektabilitas dapat diukur dengan memperhatikan sikap dan dukungan yang diberikan oleh publik.

3. Kandidat Petahana

Petahana merupakan salah satu hal yang berhubungan dengan pemilihan umum. Dalam kamus besar bahasa indonesia (KKBI) petahana memiliki makna yang sama dengan incumbent. Incumbent merupakan kata yang berasal dari bahasa inggris yang artinya seseorang yang sedang memegang jabatan atau pemegang jabatan. Sedangkan makna petahana menurut Simanungkalit (2008) adalah sebuah kedudukan, martabat, kebesaran, ataupun kemuliaan. Petahana atau incumbent merupakan seseorang yang sedang memegang sebuah jabatan politik tertentu yang kemudian maju kembali dalam pemilihan yang sama.

Dalam pelaksanaan pemilu yang ada di indonesia, kandidat petahana atau incumbent memiliki keuntungan tersendiri. Karena kandidat petahana sangat diuntungkan karena memiliki faktor jabatan yang telah dimiliki sebelumnya dan telah melekat pada status sosial masyarakat. Dalam sistem demokrasi yang saat ini berjalan, pemimpin harus mampu melayani masyarakat dengan sepenuhnya. Sehingga dengan begitu, kandidat petahana dapat dekat dengan masyarakat atau dapat dikatakan tidak ada dinding pembatas antara pemimpin dan masyarakat. Dengan begitu, kandidat petahana dapat mempertahankan jabatan publiknya kembali di periode mendatang karena telah berhasil mendapatkan simpati publik.

Menurut Tiran (2013) petahana adalah pemimpin yang masih memiliki pengaruh dalam suatu wilayah daerah pemilihan karena orang atau pemimpin tersebut pernah menjabat pada periode sebelumnya. Salah satu tolak ukur terhadap kekuatan kandidat petahana adalah menguatnya kepercayaan publik. Selain itu, kekuatan kandidat petahana juga bisa didapatkan melalui dukungan para elit lokal.

B. Teori

1. Gaya Kepemimpinan

Pada hakikatnya, gaya berasal dari kata “*style*” yang artinya mode seseorang yang selalu nampak dan menjadi sebuah ciri khas dari orang tersebut. Gaya juga dapat diartikan sebagai kebiasaan yang melekat pada diri seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan kepemimpinannya. Menurut Stoner (2006, dalam Pasolong, 2015) gaya kepemimpinan atau *leadership style* dapat dikatakan sebagai sebuah pola atau tingkah laku yang dijalankan oleh seorang pemimpin dalam kegiatan mengarahkan ataupun mempengaruhi pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan suatu norma atau perilaku yang dijalankan oleh seseorang pada saat orang tersebut berusaha untuk mempengaruhi orang lain Thoha (2014).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan sebuah cara yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi, mengarahkan, mendorong, dan mengendalikan pengikutnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi secara efisien dan efektif.

Pemimpin harus memiliki gaya kepemimpinan sendiri ketika memimpin sebuah institusi. Menurut Luthan (2001), gaya kepemimpinan merupakan sebuah cara atau tindakan yang digunakan seorang pemimpin untuk membimbing, mendorong, dan mengendalikan bawahannya agar berhasil mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pemimpin di desa maka peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan Teori Ronald Lippit dan Ralph K. White (1960, dalam Pasolong, 2015) yang menjabatkan tiga indikator gaya kepemimpinan yaitu:

a. Gaya Kepemimpinan Otokratis

Gaya kepemimpinan otokratis adalah gaya di mana pemimpin memiliki kendali penuh atas semua aspek otoritas. Otokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan secara mutlak (*centre of authority*). Gaya kepemimpinan otokratis adalah gaya di mana pemimpin bertindak atau berperilaku dengan cara otoriter. Gaya kepemimpinan ini berpusat sepenuhnya pada keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin itu sendiri (Hasibuan, 2003). Ketika dipraktikkan, pemimpin mengambil alih kepemilikan penuh atas semua kegiatan dan kewajiban, sedangkan bawahan hanya menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka.

Menurut Ronald (dalam Pasolong, 2015) gaya kepemimpinan otokratis merupakan sebuah gaya kekuasaan atau wewenang yang dipegang oleh pemimpin yang digunakan untuk mengintimidasi dan menekan bawahannya yang diikuti dengan pengawasan ketat yang apabila perintahnya dibantah maka akan mendapatkan sanksi. Dalam gaya kepemimpinan ini komunikasi lebih banyak dilakukan dari atas ke bawah. Namun yang menjadi kelebihan dari gaya kepemimpinan ini adalah dapat memberikan tekanan untuk menghasilkan kinerja yang teratur (Deswati, 2014).

Robbins (2014) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan otokratis adalah gaya dimana seorang pemimpin memusatkan segala kendali pada kekuasaan diatas dirinya sendiri dan dalam membuat keputusan dilakukan secara sepihak dan juga membatasi atau meminimalisir partisipasi karyawan. Otokrat sendiri dapat diartikan sebagai kekuatan, maka gaya kepemimpinan otokrat ini dapat diartikan sebagai kekuasaan yang bersifat absolut.

Gaya kepemimpinan ini menjadikan seorang pemimpin sangat berpegang pada kekuasaan yang mutlak dan harus dipatuhi oleh para anggotanya. Dalam hal ini, pemimpin selalu ingin menjadi pemain tunggal dalam proses berjalannya suatu organisasi. Setiap kebijakan yang ditetapkan dibuat tanpa berkoordinasi dengan anggota atau bawahannya.

Adapun kelebihan dari gaya kepemimpinan otokratis ini adalah segala keputusan yang diambil dapat ditentukan secara cepat karena keputusan tersebut mutlak hak pemimpin, dalam pelaksanaannya pengawasan dapat dilakukan dengan mudah, lebih mudah mencapai tujuan, dan tidak pernah terjadi konflik kepentingan dalam organisasi. Sedangkan kekurangan dari gaya kepemimpinan ini adalah dalam suatu organisasi, anggota organisasi tidak dapat berinovasi, anggota juga tidak dapat menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam gaya ini pemimpin bertindak terlalu berkuasa sehingga biasanya sering terjadi *abuse of power*.

b. Gaya Kepemimpinan Demokratis

Gaya kepemimpinan demokratis merupakan gaya yang dijalankan oleh seorang pemimpin dengan selalu berusaha memanfaatkan kelebihan anggotanya. Dalam gaya kepemimpinan demokratis ini, pemimpin memposisikan diri berada ditengah para anggotanya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Pemimpin selalu memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan oleh kelompok serta dalam proses pembagian tugas pemimpin sangat mempertimbangkan kesanggupan anggotanya.

Pemimpin yang menjalankan gaya kepemimpinan demokratis ini biasanya bersedia diberi masukan dan saran dari bawahan ataupun masyarakat (Hasian, 2010). Proses komunikasi yang berjalan pada gaya ini adalah komunikasi dua arah yang dilakukan secara aktif. Menurut

Daswati (2014), kelebihan dari gaya kepemimpinan ini adalah dapat memberikan komitmen secara langsung melalui partisipasi pemimpinnya. Sedangkan kekurangannya adalah dalam prosesnya menghabiskan lebih banyak waktu.

Menurut Lippit & White (1960, dalam Pasolong, 2015) gaya kepemimpinan demokratis ditandai dengan segala kebijakan yang dibuat oleh penguasa dirumuskan melalui musyawarah dan diputuskan bersama-sama dengan kelompok. Gaya kepemimpinan demokratis adalah sebuah kepemimpinan yang ditandai dengan adanya pengambilan keputusan yang dilakukan secara kooperatif. Dalam kepemimpinan demokratis ini, para anggota atau bawahan justru lebih memiliki moral yang tinggi, kerja sama dapat terjalin dengan baik, dan lebih fokus terhadap kualitas kerja (Dimiyati, 2014).

Adapun kelebihan dari gaya kepemimpinan demokratis ini adalah pemimpin dapat mengkomunikasikan visi dan misinya dengan jelas, dapat membangun semangat anggotanya, dengan gaya kepemimpinan ini pemimpin dapat memperlihatkan sifatnya yang berkharisma dan dapat dipercaya sehingga bisa mendapatkan dukungan dari para pengikutnya, dan dapat memanfaatkan kelebihannya semaksimal mungkin. Sedangkan kelemahan dari gaya kepemimpinan ini adalah para pemimpin mudah mengambil keputusan yang beresiko, pemimpin cenderung memiliki khayalan bahwa apa yang dilakukan merupakan sebuah kebenaran.

Kepemimpinan yang demokratis biasanya memiliki beberapa ciri-ciri seperti organisasi yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar, otoritas yang dimiliki sepenuhnya diberikan kepada bawahan dengan masing-masing dari individu yang ada didalam kelompok menyadari akan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan, mengutamakan pencapaian tujuan dan kesejahteraan umum serta kerja sama yang kompak. Dengan begitu, seorang pemimpin demokratis dapat memfungsikan dirinya sebagai penggerak perubahan guna meningkatkan kerja sama dan pencapaian tujuan organisasi.

Dalam bentuk kepemimpinan ini, kepala desa memberdayakan para pengikutnya dengan memberi mereka keleluasaan dan kesempatan untuk menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing individu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Gaya kepemimpinan ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan utama organisasi pemerintahan yang berfungsi dengan baik.

c. Gaya Kepemimpinan Laissez Faire (*Laissez Faire Leadership Style*)

Gaya kepemimpinan laissez faire merupakan gaya kepemimpinan dengan model kendali bebas. Gaya kepemimpinan ini berbanding terbalik dari gaya kepemimpinan otoriter. Gaya ini juga disebut liberal karena kepemimpinan dengan gaya ini dalam pelaksanaannya banyak

memberikan kebebasan, dengan asumsi bahwa suatu tugas diberikan kepada kelompok yang dapat menentukan cara tersendiri untuk mencapai tujuan tertentu didalam suatu organisasi. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin tidak melibatkan dirinya atau tidak berpartisipasi sedikitpun dalam segala kegiatan yang ada didalam organisasi.

Seorang pemimpin dalam gaya kepemimpinan ini hanya menjadikan dirinya sebagai seorang penasihat. Pemimpin memberikan tugas dan wewenangnya kepada kelompok dan para anggotanya serta meminta para anggota kelompok untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan kemampuan para individu. Pemimpin dan anggota kelompok melakukan komunikasi secara horizontal dalam gaya kepemimpinan ini.

Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini adalah dapat memicu kemungkinan munculnya inisiatif dari para anggota kelompok untuk melakukan suatu pekerjaan yang dianggap sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota tanpa harus ada campur tangan dari atasan atau pemimpinnya. Namun, gaya kepemimpinan ini juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari gaya kepemimpinan *laissez faire* ini adalah kelompok dapat terombang ambing atau tidak terkontrol karena tidak ada arahan yang jelas dari pimpinan (Daswati, 2014).

2. Legitimasi Politik

Secara bahasa, legitimasi berasal dari kata "*lex*" yang artinya hukum. Sedangkan menurut istilah, legitimasi merupakan sebuah pengakuan dan bentuk penerimaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu kewenangan atau kekuasaan (Alfian, 2009). Menurut Hidayat (2015), legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memimpin, memerintah, membuat serta melaksanakan keputusan politik. Legitimasi dapat diterapkan secara luas seperti mencakup pemerintahan, otoritas, organisasi, dan lain sebagainya. Secara konseptual, yang disebut legitimasi politik dapat diartikan sebagai sebuah simpati yang diberikan oleh public dengan memberikan kepercayaan pada diri orang-orang yang diperintah terhadap hak moral seorang pemimpin untuk memerintah dan para pengikutnya atau orang yang memberikan kepercayaan tersebut memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah tersebut.

Suatu sistem politik dapat bertahan apabila dalam proses berjalannya mendapatkan dukungan secara keseluruhan, seperti penerimaan maupun pengakuan dari masyarakat. Maka dari itu, legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah tetapi juga untuk unsur-unsur lain dalam system politik. Jadi, legitimasi dapat dikatakan sebagai dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap pemerintah yang bawenang. Menurut Lamb (2014) legitimasi merupakan sebuah kelayakan dukungan. Artinya, legitimasi merupakan sebuah perasaan yang menyatakan bahwa seseorang memiliki kewajiban moral untuk mendukung sesuatu yang dianggap baik atau

benar. Easton (dalam Rusdianto, 2018) berpendapat bahwa legitimasi ialah sebuah bentuk kepercayaan yang didapatkan dari public dengan menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar untuk menerima dengan baik serta mematuhi penguasa dan memenuhi tuntutan yang berikan oleh pemerintahan yang sedang berjalan.

Sebagai seorang pemimpin, untuk mempertahankan kepemimpinannya perlu memahami seberapa besar dukungan yang kemungkinan didapatkan. Menurut beberapa studi, legitimasi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk dukungan yang diberikan secara sukarela (Lamb, 2014). Easton (dalam Rusdianto, 2018) menyatakan bahwa agar suatu sistem politik tidak hanya berlangsung begitu saja melainkan dapat mentransformasikan tuntutan menjadi sebuah kebijakan umum memerlukan tiga objek penting yaitu komunitas politik, rezim, dan pemerintahan. Selain itu, menurut Efriza (2016) didalam sebuah sistem politik terdapat beberapa objek yang membutuhkan legitimasi agar sebuah sistem politik mampu mempertahankan keberlangsungannya dalam waktu yang lama. Adapun objek tersebut meliputi masyarakat, hukum, politik, pemimpin dan juga kebijakan.

Sebagai alat untuk melihat dan menganalisis sebuah legitimasi politik masyarakat Desa Sikasur dalam kemenangan yang di raih Kusin di Pilkadaes 2018 yang selama ini telah menjabat selama dua periode berturut-turut, penulis menggunakan teori David Beetham (1988, dalam Sumarlin 2019) tentang legitimasi politik yang dikemukakan dalam bukunya "*Legitimation of Power*" yang menyatakan tentang sebuah kekuasaan yang hanya dapat dikatakan sah apabila pemegang kekuasaan memenuhi tiga kondisi dibawah ini:

1. Kekuasaan yang dijalankan harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan

Tingkatan yang paling mendasar dalam mengukur sebuah legitimasi adalah kesesuaian aturan dengan definisi hukum yang berlaku. Kekuasaan dapat dikatakan sah apabila kekuasaan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian dapat dikatakan sebagai kekuasaan yang sah apabila kekuasaan tersebut diperoleh dengan cara yang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Beetham (1988) menyebutkan bahwa aturan yang dibuat oleh penguasa untuk menjalankan sebuah kekuasaan disebut sebagai aturan kekuasaan. Menurut Beetham, sebuah kekuasaan dapat dikatakan tidak sah apabila seorang pemimpin atau pemegang kekuasaan berada pada hal yang bertolak belakang atau tidak sejalan dengan aturan yang berlaku seperti perebutan kekuasaan secara paksa, ataupun berusaha menjatuhkan kepemimpinan yang sedang berjalan atau kudeta.

2. Aturan yang ditetapkan harus dianggap benar dan diyakini bersama antara pihak yang memerintah dan pengikutnya

Pada bagian kedua, sebuah kekuasaan dapat dianggap sebagai kekuasaan yang sah apabila aturan kekuasaan yang dibuat tersebut dibenarkan dan dipercaya oleh pemegang kekuasaan dan pengikutnya yaitu masyarakat. Kekuasaan yang dipegang harus didapatkan dengan cara yang sah dan harus bersumber pada otoritas yang sah. Aturan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh para pemegang kekuasaan juga harus sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat atau yang diperintah. Struktur kekuasaannya juga harus dibuat dengan tujuan untuk mengutamakan kepentingan umum yang nyata, bukan hanya untuk menguatamakan kepentingan dari pihak yang memiliki kekuasaan. Beetham (1988, dalam Sumarlin 2019). Beberapa ciri dari hubungan kekuasaan adalah perbedaan keadaan, peluang, dan nilai-nilai antara pemegang kekuasaan dan pengikutnya yaitu masyarakat. Pada pengukuran legitimasi ditingkat kedua ini, menyatakan bahwa sebuah kekuasaan tidak akan mendapatkan legitimasi apabila kekuasaan yang dijalankan tidak dibenarkan dan tidak diyakini bersama Beetham, (1988, dalam Sumarlin, 2019)

3. Legitimasi wajib ditunjukkan melalui bentuk persetujuan dari para pengikutnya

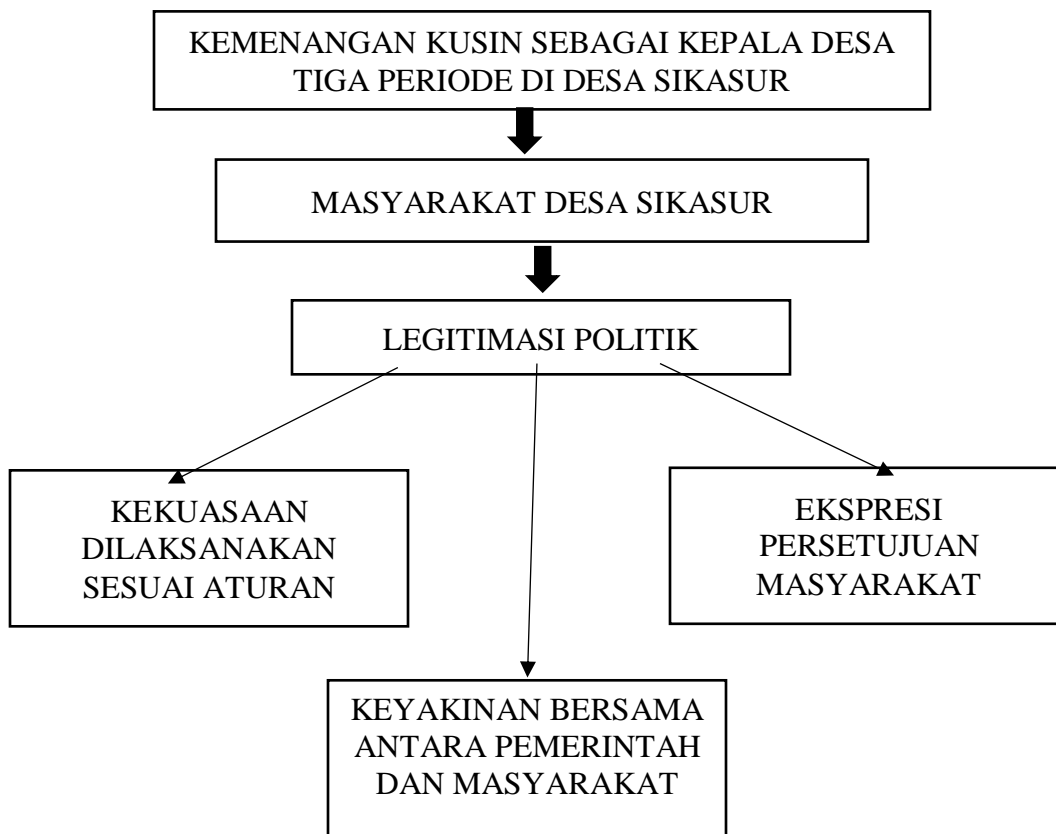
Pada tingkatan legitimasi yang ketiga yaitu mengikutsertakan bentuk persetujuan yang terbukti dengan keterlibatan masyarakat dengan kekuasaan yang sedang berjalan dan di percaya oleh masyarakat melalui perilaku yang memberikan bukti persetujuan. Sejalan dengan pendapat Beetham (1988, dalam Sumarlin 2019) bahwa, tindakan yang menyimpulkan bahwa pihak yang berkuasa berjanji untuk bersumpah setia dan mengambil bagian dalam pemilihan merupakan bentuk penting dari kontribusi masyarakat dalam membuat atau memberikan legitimasi.

Menurut Beetham (1988) ekspresi persetujuan dapat dibuktikan dengan dua cara. Pertama, adalah bahwa tindakan yang menunjukkan perilaku persetujuan, bukan semata-mata hanya karena kepentingan individu melainkan untuk kepentingan bersama. Kedua, tindakan tersebut merupakan sebuah bentuk kekuatan di hadapan publik. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai persetujuan yang tegas dari masyarakat terhadap posisi yang berkuasa, akhir-akhir ini hal tersebut dapat dijadikan sebagai bentuk konfirmasi legitimasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap pihak ketiga yang secara langsung tidak terlibat dalam hubungan, atau mereka yang belum memberikan bukti persetujuan terhadap kekuasaan yang berjalan. Persetujuan merupakan sebuah komponen penting dalam sebuah legitimasi.

Berdasarkan pemaparan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori yang kemukakan Beetham (1988, dalam Sumarlin) tentang legitimasi politik memberikan pendapat bahwa agar pemegang kekuasaan sebuah kekuasaan dapat dikatakan sah maka, tiga hal yang mendasari lahirnya legitimasi sangat dibutuhkan. Seperti halnya dengan kesesuaian aturan yang

dijalankan, jika aturan yang ditetapkan, dan dibenarkan dengan bukti bahwa aturan tersebut bertujuan pada keyakinan bersama, persetujuan tegas dari masyarakat, atau yang paling signifikan di antara mereka, terhadap suatu kekuasaan tertentu. Ketiga hal tersebut sangat membantu pada pemberian legitimasi, dengan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat pada konteks tertentu. Untuk melahirkan suatu legitimasi yang diberikan masyarakat, pemerintah harus memelihara tiga hal penting tersebut agar sebuah pemerintahan dapat dikatakan legitimate karena mendapat pengakuan dari masyarakat.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teori David Beetham



BAB III

LANDSCAPE DESA SIKASUR DAN PROFIL KEPALA DESA

Pada bab ini penulis akan menguraikan landscape Desa Sikasur dan Profil Kepala Desa Kusin. Pada landscape Desa Sikasur penulis akan menguraikan tentang kondisi geografis dan demografis Desa Sikasur, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Desa Sikasur, dan sejarah pemerintahan Desa Sikasur. Kemudian penulis akan menguraikan juga profil Kusin sebagai Kepala Desa Sikasur dengan menjabarkan profil genealogis, profil pendidikan dan perjalanan karir Kusin sebagai guru hingga menjadi Kepala Desa, dan perjalanan karir politik Kusin.

A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Sikasur

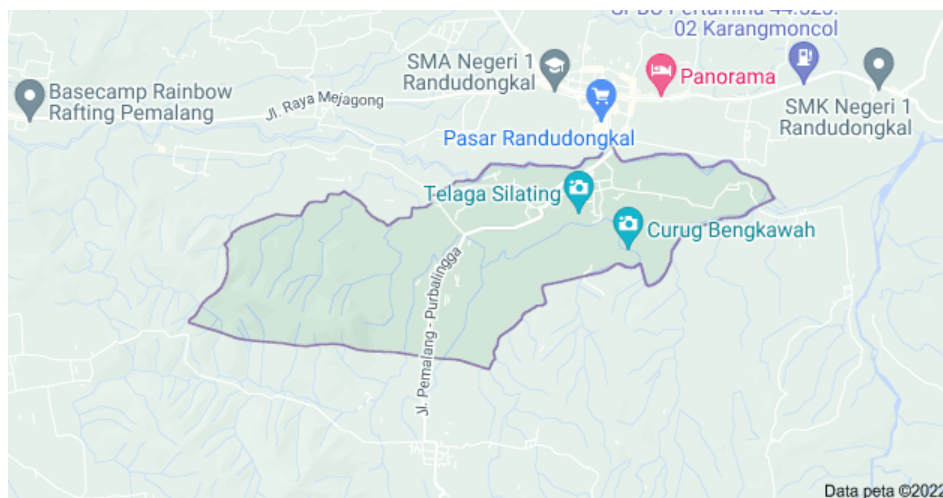
1. Kondisi Geografis Desa Sikasur

Desa Sikasur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Belik Kabupaten Pematang. Dari pusat kecamatan Desa Sikasur berjarak \pm 11 Km dan dari pemerintahan Kabupaten \pm 35 Km, sedangkan dari pusat pemerintahan Provinsi adalah \pm 485 Km. Secara geografis Desa Sikasur terletak antara 109.3232 Bujur Timur dan 7.11027 Lintang Selatan. Desa Sikasur memiliki luas wilayah sebesar 638.975 Ha.

Secara administratif, Desa Sikasur terbagi dalam tiga dusun yaitu Dusun Sodong, Dusun Krajan dan Dusun Sikasur. Namun setelah Dusun Sodong mengalami pemekaran menjadi Desa Sodong Basari, saat ini Desa Sikasur hanya terdiri dari dua dusun dan secara kelembagaan terdiri dari 4 (empat) RW dan 22 (dua puluh dua) RT. Adapun batas wilayah dari Desa Sikasur adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Randudongkal
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simpur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalisaleh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bulakan

Gambar 1 Peta Desa Sikasur



Sumber : <https://sikasur.desa.id>

Secara geografis, Desa Sikasur merupakan sebuah desa yang ada di Kecamatan Belik yang memiliki letak strategis yaitu berada di lintas jalan provinsi Jawa Tengah yang menghubungkan antar kabupaten dan antar kota di wilayah Jawa Tengah seperti Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kota Purwokerto dan kota-kota lainnya. beberapa potensi wisata seperti Telaga Silating, dan Curug Bengkawah.

2. Kondisi Demografis Desa Sikasur

Berdasarkan data BPS Kab. Pemalang tahun 2019 bahwa jumlah penduduk Desa Sikasur sampai tahun 2021 adalah sebanyak 12.313 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk perempuan sebanyak 6.026 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6.287 jiwa. Namun seiring berjalannya waktu, Desa Sikasur semakin maju dan berkembang pesat dari tahun ketahun baik dari jumlah penduduk, agama, pendidikan dan juga lain-lain. Meskipun mengalami kemajuan, jumlah penduduk Desa Sikasur tentu saja mengalami penurunan dikarenakan Dusun Sodong secara resmi telah berhasil melakukan pemekaran sebagai Desa Sodong Basari terhitung sejak 22 September 2022. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa setelah pemekaran Desa Sodong Basari, jumlah penduduk Desa Sikasur mengalami penurunan drastis yaitu yang semula 12.313 jiwa sekarang menjadi 7.548 jiwa.

Table 1 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Sikasur Tahun 2022

No.	RW	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah
1.	RW.004	1.114	1.054	2.168
2.	RW.005	1.367	1.319	2686
3.	RW.006	806	758	1554
4.	RW.007	578	562	1.140
	JUMLAH TOTAL	3.865	3.693	7.548

Sumber: Data Pemerintah Desa Sikasur Tahun 2022

Dari seluruh jumlah masyarakat tersebut, masing-masing dari warga masyarakat Desa Sikasur tentu saja memiliki berbagai mata pencaharian. Mata pencaharian merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menunjang kelangsungan hidup manusia baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Mata pencaharian masyarakat Desa Sikasur tentu saja beragam, ada yang bekerja sebagai petani, buruh, guru, karyawan swasta dan lain sebagainya. Berikut data jumlah penduduk Desa Sikasur berdasarkan pekerjaan.

Table 2 Jumlah Penduduk Desa Sikasur Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2022

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Belum/Tidak Bekerja	1.157
2.	Pelajar/Mahasiswa	857
3.	PNS/TNI/POLRI	101
4.	Guru/Dosen	92
5.	Karyawan Swasta	220
6.	Petani	2.341
7.	Buruh	2.033
8.	Pedagang	204
9.	Wiraswasta	367
10.	Lain-lain	176
	Total	7.548

Sumber: Data Pemerintah Desa Sikasur Tahun 2022

Berdasarkan data diatas, mayoritas masyarakat Desa Sikasur bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Sebanyak 2.341 jiwa penduduk yang ada di Desa Sikasur bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dikarenakan tipologi Desa Sikasur itu sendiri adalah persawahan. Dari keseluruhan luas wilayah Desa Sikasur, sebanyak 365.000 (Ha) tata lahannya adalah persawahan, maka tidak heran jika mayoritas masyarakat Desa Sikasur berprofesi

sebagai petani, baik itu petani padi, jagung, palawija, kelapa, dan lain-lain (RPJMDes Desa Sikasur Tahun 2019-2024). Kemudian, sebanyak 2.033 berprofesi sebagai buruh. Sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai buruh adalah masyarakat yang notabeneanya tidak memiliki lahan untuk bertani. Sebanyak 57,9% masyarakat Desa Sikasur berprofesi sebagai petani dan buruh, sedangkan sebanyak 11,3% berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa, kemudian 15,5% berprofesi sebagai guru/dosen, PNS/TNI/POLRI, pedagang, karyawan swasta, dan lain-lain. Sedangkan sebanyak 15,3% masyarakat Desa Sikasur berstatus belum/tidak bekerja yang meliputi ibu rumah tangga dan pengangguran.

Banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani dan buruh tidak hanya disebabkan oleh tipologi desa itu sendiri, tetapi hal ini juga disebabkan karna tingkat Pendidikan masyarakat Desa Sikasur yang masih minim. Sebagian besar masyarakat Desa Sikasur hanya menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SD/Sederajat atau bahkan tidak bersekolah. Berikut data jumlah penduduk Desa Sikasur berdasarkan tingkat pendidikannya.

Table 3 Jumlah Penduduk Desa Sikasur Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

No.	Jenjang Pendidikan	RW.004	RW.005	RW.006	RW.07	Total
1.	Tidak/Belum Sekolah	892	1.078	558	476	3004
2.	SD/Sederajat	848	922	614	445	2829
3.	SLTP/Sederajat	219	335	160	140	854
4.	SLTA/Sederajat	179	253	154	59	645
5.	Diploma I/II/III	6	32	16	5	59
6.	Diploma IV/Strata I	24	62	50	14	150
7.	Strata II		4	2	1	7
8.	Strata III					
	Total	2168	2.686	1554	1140	7548

Sumber : Data Pemerintah Desa Sikasur Tahun 2022

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 39,7% masyarakat Desa Sikasur tidak/belum bersekolah, sebanyak 37,4% hanya menyelesaikan pendidikannya d tingkat SD/Sederajat, 11,3% lulusan SLTP/Sederajat, 8,5% lulusan SLTA/Sederajat, 0,7% lulusan Diploma I/II/III, 1,9% lulusan Strata I, dan 0,09% merupakan lulusan Strata II. Maka dapat dikatakan bahwa tingkat Pendidikan masyarakat Desa Sikasur masih tergolong rendah dengan mayoritas penduduknya tidak bersekolah atau hanya selesai pada tingkat SD/ Sederajat. Hal ini dapat terjadi karena minimnya lembaga Pendidikan yang tersedia di Desa Sikasur. Adapun lembaga Pendidikan yang tersedia di Desa Sikasur adalah sebanyak 4 buah TK/PAUD dan 4 buah SD/MI (RPJMDes Desa Sikasur Tahun 2019-2024).

Desa Sikasur merupakan sebuah desa yang hamper seluruh masyarakatnya ber etnis Jawa. Walaupun hanya terdiri dari satu etnis, masyarakat Desa Sikasur juga memiliki ragam kepercayaan. Dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit mereka tentu saja memiliki agama dan keyakinan masing-masing. Berikut data jumlah penduduk Desa Sikasur menurut agama.

Table 4 Jumlah Penduduk Desa Sikasur Berdasarkan Agama

No	No. RW	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghuchu	TOTAL
1.	RW.004	2.166		2				2.168
2.	RW.005	2.677	7	2				2.686
3.	RW.006	1.550	3	1				1.554
4.	RW.007	1.140						1.140
	TOTAL	7.533	10	5				7.548

Sumber: Data Pemerintah Desa Sikasur Tahun 2022

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Sikasur berdasarkan agama yang dianut dapat disimpulkan bahwa 99,8% penduduk yang ada di Desa Sikasur menganut agama islam. Dengan adanya jumlah penduduk yang mayoritas menganut agama islam, Desa Sikasur memiliki 30 Masjid/Musholla (RPJMDes Desa Sikasur Tahun 2019-2024).

3. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Desa Sikasur

Desa Sikasur merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Ibu Kota Kecamatan. Nama Desa Sikasur berasal dari kata “Kasur” yang menurut sumber informasi bermula pada masa Kerajaan Mataram saat akan melakukan penyerangan ke Batavia melawan Belanda terdapat sebuah tempat di Dusun Karangmulya yang disinggahi oleh Raja dan pasukannya yaitu diatas batu yang berbentuk memanjang seperti kasur. Kemudian, Raja itu berdaulat bahwa tempat persinggahannya adalah Desa Sikasur (RPJMDes Desa Sikasur Tahun 2019-2024).

Didalam kehidupan sosial, manusia selalu melakukan proses interaksi atau hubungan timbal balik antar individu dengan individu ataupun antar individu dengan kelompok. Meskipun masyarakat Desa Sikasur mayoritas beragama islam, tetapi sikap toleransi yang dimiliki oleh masyarakat desa sangatlah tinggi. Terkait upaya menjaga toleransi antar sesama umat, kepala desa di Desa Sikasur selalu menghimbau kepada masyarakatnya agar selalu menghargai satu sama lain dan memandang semua warganya dalam derajat yang sama. Artinya, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak ada yang dinilai mayoritas maupun minoritas.

Pada tahun 1936-1947 pemerintahan pertama yang dipimpin oleh Surya Tirta Disastra taraf kehidupan masyarakat Desa Sikasur sangatlah rendah. Hasil pertanian pada masa itupun belum maksimal dan tidak dapat mencukupi kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dalam proses pengolahan pertanian karena penajahan masih berlangsung sehingga

masyarakat Desa Sikasur mengalami masa-masa kekurangan pangan. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman semakin maju, kini masyarakat Desa Sikasur sudah berada pada taraf kehidupan yang tinggi dan tingkat perekonomian yang stabil.

Kondisi perekonomian merupakan salah satu aspek penting yang sangat menentukan kemajuan suatu wilayah atau desa. Jika suatu perekonomian disuatu wilayah dapat dikatakan stabil, maka masyarakat daerah setempat juga akan merasa aman, begitu juga sebaliknya jika kondisi ekonomi disuatu wilayah tidak stabil maka masyarakatnya juga akan resah. Struktur perekonomian masyarakat Desa Sikasur sebagian besar bergantung pada sektor pertanian. Hal ini dikarenakan sejak Desa Sikasur ada, untuk menunjang kehidupan sehari-hari masyarakatnya hanya mengandalkan pada hasil tani. Hal tersebut berlanjut hingga saat ini.

Namun seiring berjalannya waktu, Desa Sikasur kini sudah mulai melakukan pengembangan di bidang pariwisata dengan tujuan untuk mendongkrak perekonomian desa. Pengembangan wisata yang dilakukan ini adalah pengembangan di wisata Curug Bengkawah yang terdapat di Desa Sikasur. Pengembangan wisata milik desa ini dilakukan dengan cara pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa, seperti pembuatan jalan menuju daerah wisata, pembuatan gapura atau pintu masuk menuju wisata, penambahan wahana wisata alam seperti rafting dan lain sebagainya.

Gambar 2 Wisata Alam Curug Bengkawah di Desa Sikasur



Sumber: Youtube Desa Wisata Sikasur

Perkembangan wisata di Desa Sikasur dapat memberikan alternatif lain bagi mata pencaharian masyarakat sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Hal ini tentu saja memberikan dampak positif bagi masyarakat desa setempat seperti peningkatan taraf perekonomian, perubahan mata pencaharian, dan lain sebagainya. Pada perubahan

matapencaharian, sebelum wisata di Desa Sikasur semakin berkembang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan buruh harian lepas. Sedangkan setelah bidang pariwisata berkembang timbul beragam kesempatan kerja bagi masyarakat mulai dari membuka usaha warung atau restoran di sekitar daerah wisata, usaha transportasi seperti kereta wisata menuju Curug Bengkawah, UMKM makanan khas daerah disekitar tempat wisata, serta pekerjaan dibidang pariwisatalainnya. Hal ini terbukti dengan adanya Pasar Krempyeng atau pasar pagi di sepanjang jalan menuju Curug Bengkawah, yang menggandeng UMKM-UMKM dari warga masyarakat Desa Sikasur untuk turut serta dalam program pasar krempyeng tersebut.

Selain perkembangan di bidang wisata, Desa Sikasur juga termasuk salah satu desa selalu menjaga dan melestarikan budaya setempat. Kabupaten Pemalang memiliki peninggalan budaya sejarah tari yang memiliki ciri khas tersendiri yang melambangkan unsur kedaerahannya. Peninggalan budaya tersebut adalah kesenian “Sintren”.

Gambar 3 Kesenian Sintren Khas Pemalang



Sumber: Website Media Pemalang

Sintren merupakan kesenian tradisional masyarakat Jawa yang terkenal di pesisir utara pulau Jawa yang terkenal di Indramayu, Cirebon, Subang, Majalengka, Pemalang, Tegal, Pekalongan, dan Banyusan serta dikenal sebagai tarian mistis atau magis. Berbeda dengan daerah lain, kesenian sintren dari Pemalang dalam proses pementasannya menggunakan lagu daerah dengan sentuhan gendang yang rancak. Desa Sikasur tergolong sebuah desa yang “*nguri-uri budaya*”. Maksudnya, untuk tetap menjaga dan melestarikan kesenian sintren khas Pemalang tersebut, Desa Sikasur membentuk persatuan kesenian sintren yang diberi nama Sintren Cipta Rasa dengan menggandeng para seniman desa baik generasi tua maupun generasi muda (Bahtiar, 2022)

4. Sejarah Pemerintahan Desa Sikasur

Dalam sejarah menunjukkan bahwa asal-usul dari terbentuknya sebuah kepemimpinan desa di Indonesia sangatlah beraneka ragam. Hal ini dikarenakan latar belakang yang dimiliki oleh masyarakat memiliki perbedaan sesuai dengan sejarah masing-masing daerah. Di Pulau Jawa, terbentuknya desa-desa itu didasarkan pada ikatan daerah. Hal ini disebabkan karena terbentuknya desa di Jawa dilandasi oleh kepentingan yang sama atas daerahnya, bukan karena hubungan daerah. Maka dari itu ikatan komunitas tidak terlalu kuat, sehingga kepemimpinan yang ada di desa dari zaman dahulu tidak ditentukan atau ditetapkan berdasarkan peraturan adat, melainkan berdasarkan pada sistem pemilihan (Raharjo, 1999).

Pemerintahan Desa Sikasur sudah dimulai dari tahun 1936. Pada pemerintahan yang pertama, Desa Sikasur dipimpin oleh Surya Tirta Disastra. Karena pada saat itu penjajahan masih berlangsung, dan masyarakat Desa Sikasur pada saat itu belum mengenal bahkan belum mengenal sistem demokrasi bahkan belum mengenal istilah pilkades atau pemilihan kepala desa, pemimpin Desa Sikasur pada saat itu di pilih langsung oleh rakyat dengan berdasarkan penilaian dari warga masyarakat. Surya Tirta Disastra dianggap mampu dan dipercayai oleh masyarakat untuk memimpin Desa Sikasur. Pada pemerintahan pertama yang di pimpin oleh Surya Tirta Disastra, kondisi masyarakat desa setempat dapat dikatakan berada pada taraf hidup yang sangat rendah mengingat masih terjadi penjajahan. Masa kepemimpinan Surya Tirta Disastra berakhir pada tahun 1947 karena meninggal dunia (RPJMDes Desa Sikasur Tahun 2019-2024).

Karena telah memasuki masa kemerdekaan, pemilihan kepala desa pada masa itu diawali dengan musyawarah antar perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk menjalankan pemilihan kepala desa. Pada pilkades pertama di Desa Sikasur tahun 1947, calon kepala desa memiliki beberapa persyaratan seperti tidak buta huruf, dapat menulis, dan cakap kelakuannya. Kemudian dalam pelaksanaannya masing-masing dari calon kepala desa mengambil kertas secara acak yang berisi gambar tanaman palawija seperti padi, kelapa, jagung, ubi, ketela, dan lain untuk dijadikan sebagai tanda atau identitas dari calon kepala desa. Para masyarakat melakukan pemilihan dengan cara mencoblos kertas yang berisi gambar tanaman palawija tersebut. Hasil dari pilkades tersebut dimenangkan oleh Karta Warsito. Karta Warsito dalam menjalankan tugasnya seorang pemimpin dianggap kurang stabil, maka dari itu kepemimpinannya digantikan oleh H. Maksudi sampai dengan tahun 1979 (RPJMDes Desa Sikasur Tahun 2019-2024).

Pada tahun 1979, Desa Sikasur dipimpin oleh Sumarmo sebagai kepala desa dan Rokhman sebagai sekretaris desa. Karena telah memasuki masa orde baru, proses pemilihan kepala desa yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sumarmo menjabat sebagai kepala desa dari tahun 1979-1987. Setelah Sumarmo habis masa jabatan, yang menjadi bakal calon kepala desa selanjutnya adalah istrinya yaitu Martini. Martini berhasil memenangkan

pilkades yang dilaksanakan pada tahun 1987. Kepemimpinan Martini sebagai Kepala Desa berlangsung selama kurang lebih 11 tahun, dan berakhir pada tahun 1998 (RPJMDes Desa Sikasur Tahun 2019-2024).

Pada tahun 1998, Desa Sikasur melaksanakan pemilihan kepala desa kembali, namun yang menjadi calon kandidat hanya satu orang yaitu Duradjat Subekti. Karena hanya memiliki satu calon kepala desa, maka proses pemungutan suara dilaksanakan dengan melawan tong kosong. Meski begitu, Duradjat Subekti berhasil menjabat sebagai Kepala Desa dan Kholiri sebagai sekretaris desa. Kepemimpinan yang dijalankan oleh Duradjat Subekti adalah dari tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2006. Sejak tahun 2006, hingga sekarang Desa Sikasur dipimpin oleh Kusin yang saat ini telah menjabat selama tiga periode berturut-turut (RPJMDes Desa Sikasur Tahun 2019-2024).

B. Profil Kepala Desa Sikasur

1. Profil Genealogis Kusin

Kusin merupakan seorang Kepala Desa yang telah memimpin Desa Sikasur selama tiga periode berturut-turut. Kusin lahir di Pemalang, 24 September 1963. Kusin lahir dari keluarga sederhana dari pasangan suami istri Kaswan dan Rubes yang saat ini sudah almarhum. Sebagai anak ketiga dari lima bersaudara, Kusin tumbuh dan besar ditengah keluarga yang sederhana dan mengharuskan ia untuk menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, disiplin, dan pekerja keras sehingga hal tersebut tumbuh menjadi sebuah karakter yang menjadi ciri khas Kusin sebagai seorang pemimpin. (Wawancara, Kusin, 7 November 2022)

Setelah meniti karir dan sudah berprofesi sebagai seorang guru, Kusin menikah dengan warga asli Desa Sikasur yaitu Turiyah. Setelah menikah, Kusin dan Turiyah bertempat tinggal di Desa Sikasur dan dikaruniai tiga orang putri yaitu Arini Ika Bhuana Putri, Linda Dwi Bhuana Putri, dan Salsabila Tri Bhuana Putri. Sebagai sosok orang tua yang tegas dan dapat mendidik anaknya dengan baik, saat ini putri kedua dari pasangan Kusin dan Turiyah telah berhasil meniti karirnya sebagai anggota DPRD Kab. Pemalang. Sikap tangguh, tegas, dan disiplin terutama dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin juga diwariskan kepada anak-anaknya. (Wawancara, Kusin, 7 November 2022)

Sebelum berkecimpung didunia politik sebagai kepala desa, sebelumnya Kusin dikenal sebagai seorang guru yang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dikenal sebagai sosok

yang populis dan dekat dengan masyarakat. Hubungan yang dijalin oleh Kusin dengan masyarakat setempat sebelum ia terjun dalam dunia politik menjadi salah satu hal yang mendorong elektabilitas Kusin sangat tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan keterpilihannya sebagai Kepala Desa di Desa Sikasur pada periode pertamanya. (Wawancara, Kusin, 7 November 2022)

2. Profil Pendidikan dan Perjalanan Karir Kusin Sebagai Guru Hingga Menjadi Kepala Desa

Untuk mencapai cita-citanya, Kusin menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri 1 Sikasur, Kecamatan Belik dan lulus pada tahun 1976. Setelah lulus dari sekolah dasar, Kusin melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Randudongkal di Kecamatan Randudongkal dan lulus pada tahun 1980. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah pertama (SMP), Kusin melanjutkan pendidikannya kembali di Sekolah Guru Olahraga (SGO) Purwokerto di Kota Purwokerto dan lulus pada tahun 1983. (Wawancara, Kusin, 7 November 2022)

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Guru Olahraga (SGO) Kusin memulai karirnya dengan menjadi seorang guru olahraga di Sekolah Dasar yaitu di SD Negeri 1 Sikasur. Setelah mengabdikan diri sebagai guru honorer selama satu tahun, Kusin diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1984. Ditengah karirnya sebagai guru Kusin mempersunting Turiyah dan mulai membangun keluarga di Desa Sikasur dengan sederhana. Selama menjalani karirnya sebagai seorang guru, Kusin gemar menjalin hubungan baik dengan sekelilingnya bahkan tidak jarang menolong antar sesama. Karena Kusin gemar menolong dan menjalin hubungan yang baik, Kusin dikenal sebagai sosok yang ramah dan disukai oleh sekelilingnya. Berawal dari hubungan baik yang ia bangun dengan masyarakat, menjadikan Kusin mendapatkan dorongan untuk mencalonkan dirinya sebagai Kepala Desa. Pada tahun 2006, bertepatan dengan habisnya masa jabatan Kepala Desa Duradjat Subekti, di Desa Sikasur mulai muncul desas-desus kabar pencalonan Kusin sebagai Kepala Desa. Kabar tersebut ternyata datang dari orang-orang yang menginginkannya untuk maju mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. (Wawancara, Kusin, 7 November 2022)

Setelah mengabdikan dirinya sebagai guru sekolah dasar selama kurang lebih 23 tahun, Kusin mencalonkan dirinya sebagai Kepala Desa di Desa Sikasur dengan dukungan warga dan sanak saudara, dan dengan harapan dapat memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat Desa Sikasur. Pada pilkades yang diikutinya tahun 2006, Kusin berhasil mendapatkan jabatan publiknya sebagai Kepala Desa periode 2006 s/d 2012. Sembari menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, Kusin tetap ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Guru Olahraga (SGO) dan menjadi guru, Kusin tetap

melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Semarang dengan jurusan Pendidikan dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2012. (Wawancara, Kusin, 7 November 2022)

3. Perjalanan Karir Politik Kusin

Kusin sebagai salah satu warga masyarakat Desa Sikasur mengawali karirnya sebagai seorang guru. Kusin menjalani karirnya sebagai guru di SD Negeri 01 Sikasur selama kurang lebih selama 23 tahun. Pada tahun 2006, atas dorongan dari beberapa warga yang mempercayakan dan menilai bahwa Kusin mampu mengemban tugas sebagai Kepala Desa, beliau mencalonkan dirinya sebagai Kepala Desa di Desa Sikasur.

Pada pencalonannya di periode pertama, Kusin bersaing dengan 4 calon kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan publiknya di periode pertama, Kusin berusaha semaksimal mungkin untuk menjalin komunikasi antar semua elemen masyarakat baik dari kelompok tani, alim ulama desa, dan seluruh masyarakat desa. Jaringan komunikasi yang dibangun ini merupakan strategi utama yang Kusin lakukan untuk mendapatkan simpati warga. Komunikasi yang dijalin oleh Kusin dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dengan warga masyarakat secara langsung atau blusukan ke rumah-rumah warga, mendengar keluh kesah dan keinginan warganya. Jaringan silaturahmi yang dibentuk oleh Kusin merupakan factor utama kemenangannya di pilkades Desa Sikasur tahun 2006.

“Saya ini awalnya seorang guru olahraga di SD Negeri 01 Sikasur, setelah menjadi guru selama 23 tahun ya kurang lebih saya memiliki niat untuk memajukan desa saya ini. Awalnya memang tidak ada niat, namun dari beberapa kelompok warga masyarakat itu menginginkan saya mencalonkan diri. Sebenarnya keinginan itu hanya saya anggap sebagai angin lalu, karna saya hanya seorang guru biasa, dari keluarga sederhana pula dan tidak memiliki modal untuk mencalonkan diri. Namun setelah saya berdoa, untuk dapat memilih pilihan terbaik, saya seperti mendapat panggilan jiwa negarawan untuk memberanikan diri untuk maju sebagai calon kepala desa. Akhirnya dengan dukungan sanak saudara dan beberapa kelompok masyarakat saya berani untuk mencalonkan diri. Pada pilkades tahun 2006, itu ada 5 kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala desa termasuk saya. Usaha saya untuk pilkades ini yang paling utama adalah menjalin silaturahmi dengan seluruh masyarakat dengan merangkul kelompok tani, para alim-ulama yang ada di Desa, menjalin hubungan baik dengan RT-RT. Kalau strategi lain mungkin strategi umum ya seperti kampanye dan lain-lain. Namun alhamdulillah atas kehendak Allah dan strategi yang saya lakukan saya dapat memenangkan pilkades ini” (Wawancara, Kusin, 7 November 2022).

Pada kampanye yang dilakukan untuk pilkades tahun 2006, Kusin bahkan tidak memberikan satu janji pun kepada masyarakat. Pada prinsipnya, Kusin tidak ingin memberikan banyak janji melainkan ingin membuktikan kepada warga masyarakat yang telah mempercayakan dirinya menjadi kepala desa dengan memberikan hasil kerja nyata dengan menampung segala keinginan dan aspirasi masyarakat desa setempat. Kusin juga melakukan penyisiran terhadap tokoh-tokoh agama yang ada di Desa. Dengan cara menjalin hubungan baik dengan seluruh elemen masyarakat dari mulai proses kampanye hingga menjadi kepala desa, berdasarkan hal tersebut Kusin mulai mendapatkan citra baik di mata masyarakat Desa Sikasur.

Selama menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa di periode pertamanya Kusin selalu memegang teguh prinsipnya sebagai seorang pemimpin untuk tidak membedakan warganya. Semua warga dirangkul oleh Kusin. Kusin memposisikan diri sebagai bapak dari rakyat-rakyatnya yang sebisa mungkin mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Pada periode pertamanya, Kusin menggandeng seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali untuk sama-sama menjaga dan memajukan Desa Sikasur. Kusin bahkan menggandeng para preman-preman desa untuk meningkatkan stabilitas atau keamanan desa, dengan menggandeng preman-preman desa tersebut Kusin bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan, jangan sampai preman-preman lain desa berani masuk untuk melakukan kejahatan di Desa Sikasur.

Pada pencalonannya di periode kedua yaitu pada pilkades tahun 2012, Kusin masih menggunakan strategi politik yang sama yaitu membangun jalinan silaturahmi seperti pada periode sebelumnya. Jika sebelumnya, masih terdapat orang-orang yang tidak pro dengan kepemimpinan Kusin, setelah melihat kepemimpinan yang dijalankan di periode sebelumnya, maka lingkaran jalinan silaturahmi yang dibangun oleh Kusin menjadi semakin meluas. Bahkan, pada pencalonannya yang kedua, sebagian besar proses kampanyenya dilakukan oleh sebagian besar pendukungnya yang dapat dikatakan fanatic. Dengan semakin meluasnya dukungan yang didapatkan, Kusin dapat lebih mudah mempertahankan jabatan publiknya.

“Di periode kedua sama saja strategi yang saya lakukan, mungkin bedanya hanya komunikasi yang saya bangun sekarang lebih luas setelah menjabat sebagai kepala desa. Jika dulu pada periode pertama saya melakukan pendekatan terhadap warga ada yang secara terang-terangan menolak dan berkata tidak mendukung saya, sekarang setelah melihat satu periode saya menjabat kini masyarakat dapat menilainya sendiri. Karena saya tidak banyak janji dulu, prinsip saya memang begitu, tidak perlu berjanji yang penting keinginan warga dapat terealisasi. Saat kampanye, saya hanya memohon doa restu kepada warga, jika terpilih menjadi kepala desa dapat menjadi kepala desa yang amanah dan tidak

mengecewakan rakyat. Saya hanya menampung segala aspirasi yang diberikan kepada warga, seperti missal warga sodong menginginkan jalan makam diperbaiki, saya usahakan untuk diperbaiki, alhamdulillah terealisasi. Begitu seterusnya, jadi di pencalonan kedua saya hanya memperkuat lingkaran silaturahmi yang saya buat diperiode sebelumnya, terlebih dengan tokoh agama” (Wawancara Kusin, 7 November 2022).

Setelah masa jabatannya sebagai Kepala Desa di Periode kedua selesai, Kusin berniat untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai kepala desa. Namun, beberapa kelompok masyarakat Desa Sikasur masih menginginkan Kusin mencalonkan dirinya kembali. Akhirnya Kusin mencalonkan dirinya kembali sebagai kepala desa. pada pencalonannya yang ketiga lingkaran silaturahmi yang dibangun sejak periode pertama hingga saat ini sudah terbentuk dengan sempurna. Seluruh masyarakat Desa Sikasur sudah menyatu menjadi pendukung setia Kusin, hanya segelintir masyarakat yang mendukung calon kandidat lain. Dengan bukti kinerjanya pada periode pertama dan periode keduanya sebagai Kepala Desa menjadikan Kusin memiliki kepercayaan dan simpati public yang tinggi dari masyarakat Desa Sikasur.

BAB IV

GAYA KEPEMIMPINAN YANG DIJALANKAN OLEH KUSIN SEBAGAI KEPALA DESA TIGA PERIODE DI DESA SIKASUR

Pada bab ini penulis akan menguraikan data dan Analisa temuan di lapangan yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin sebagai kepala desa yang menjabat selama tiga periode berurut-turut. Kusin sebagai Kepala Desa di Desa Sikasur dipandang sebagai sosok yang populis dan ramah terhadap sesama telah dikenal luas oleh masyarakat Desa Sikasur. Peran dan kontribusinya dalam memajukan Desa Sikasur menjadikan Kusin memiliki kepercayaan dan simpati dari masyarakat yang tinggi. Analisis yang dilakukan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dengan pengumpulan data melalui wawancara, dan studi literatur dengan berbagai dokumen pendukung. Dalam bab ini, akan diuraikan analisa mendalam dengan berdasarkan pada teori Ronald Lippit & Ralp K. White tentang gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin selama menjadi Kepala Desa di Desa Sikasur sejak periode pertamanya hingga saat ini.

A. Pola Interaksi Kusin sebagai Kepala Desa dalam Musyawarah Desa

Sistem demokrasi di Indonesia merupakan sebuah sistem yang dilaksanakan berdasarkan muasyawah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Pada sistem pemerintahan ini memberikan panduan bahwa pemerintahan harus berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Maka dari itu, dalam berjalannya sebuah pemerintahan harus menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat yang artinya kekuasaan harus dilaksanakan untuk rakyat dengan dasar musyawarah. Hadirnya musyawarah mufakat sangat penting untuk menjamin sebuah keputusan politik yang berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan bersama.

Musyawarah desa merupakan sebuah forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa. Musyawarah desa diadakan untuk mempertemukan seluruh elemen masyarakat untuk membahas dan menetapkan sebuah peraturan maupun kebijakan untuk nantinya diambil keputusan atas hal yang strategis di Desa. Dalam menetapkan kebijakan, Kusin selalu mengadakan musyawarah desa terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan pendapat Lippit & White (1960) bahwa dalam kepemimpinan yang demokratis, segala kebijakan yang akan dibuat dirumuskan melalui proses musyawarah dan diputuskan bersama dalam kelompok. Yang artinya, sebagai pemimpin yang demokratis sebelum menetapkan dan memutuskan sebuah kebijakan yang dibuat sebaiknya melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana opini publik terhadap kebijakan atau aturan yang akan ditetapkan, maka Kusin harus membangun interaksi pada proses musyawarah tersebut. Interaksi yang dibangun oleh Kusin pada pelaksanaan musyawarah desa atau musdes di Desa Sikasur merupakan salah satu upaya mempertahankan jabatan publiknya sebagai kepala desa dengan berusaha untuk mendengar dan menerima opini masyarakat. Salah satu desa yang

secara rutin menyelenggarakan musyawarah desa adalah Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

Pelaksanaan musyawarah desa di Desa Sikasur terbagi dalam dua macam yaitu Musdes Terencana dan Musdes Mendadak (tidak terencana). Dalam setahun, pelaksanaan musyawarah desa di Desa Sikasur biasanya dilaksanakan sebanyak tiga kali bahkan lebih, tergantung dengan kebutuhan. Jika ada hal-hal mendesak yang harus di musyawarahkan bahkan bisa lebih dari jumlah tersebut. Pelaksanaan musyawarah desa biasanya di selenggarakan oleh BPD bersama dengan pemerintah desa dengan membahas hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan pemerintahan desa seperti musyawarah penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan lain sebagainya. Seperti halnya yang disampaikan oleh informan yang penulis wawancarai.

“Kalau musdes, musrenbangdes itu sudah pasti dilaksanakan. Setiap setahun minimal tiga kali, bahkan bisa lebih bisa sampai delapan kali, sepuluh kali, dua belas kali tergantung kebutuhan, tapi rata-rata desa kita dalam setahun itu enam kali. Penyelenggaranya itu BPD dan pemdes, biasanya setahu saya sebelum BPD menyelenggarakan musdes itu mereka mengadakan rapat internal dulu, yang dilaksanakan antar ketua dan anggota BPD saja untuk membahas aspirasi masyarakat apa saja, nanti disampaikan oleh pihak BPD terkait pandangannya mewakili masyarakat. Musdes itu kan untuk membahas macam-macam. Biasanya setelah pelantikan kepala desa baru, kurang lebih tiga bulan setelah pelantikan itu kita adakan musdes, untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) itu wajib dilakukan. Kemudian ada juga yang membahas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dari semua opsi, mana yang harus didahulukan, mana yang sifatnya urgent. Sama juga dengan BPD, sebelum musdes dilaksanakan itu kan dari dusun harus sudah melaksanakan musdus (musyawarah dusun), jadi para kepala dusun dalam pelaksanaan musdes itu menampung masukan dari warganya, apa saja yang diinginkan. Kemudian jika semuanya sudah tertampung, dalam musdes nanti disampaikan dari Dusun Siparuk apa aspirasinya, dari Dusun Krajan apa aspirasinya. Jadi semua ada prosesnya” (Wawancara, Tono Amboro, Sekretaris Desa, 3 November 2022)

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas menunjukkan bahwa sebelum proses musyawarah desa berlangsung, antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Dusun melakukan rapat internal atau jika ditingkat dusun biasa disebut sebagai musyawarah dusun dengan tujuan untuk memetakan aspirasi-aspirasi yang diberikan oleh masyarakat untuk kemudian di sampaikan kepada Kepala Desa dalam pelaksanaan musyawarah desa. Musyawarah desa di Desa Sikasur dilaksanakan untuk menyusun segala kebijakan maupun program kerja untuk menunjang berjalannya sebuah pemerintahan desa kedepannya. Hal ini sejalan dengan gaya kepemimpinan demokratis yang dikemukakan oleh Lippit & White (1960)

bahwa seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh penguasa harus dirumuskan melalui proses musyawarah. Pemetaan aspirasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut diharapkan dapat menjadi sumber acuan untuk menyusun kebijakan maupun rencana kerja pemerintah desa kedepannya.

Kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan penanggung jawab pelaksanaan musyawarah desa. Kerjasama yang sinergis antara kedua lembaga inilah yang menentukan keberhasilan musyawarah desa. Agar musyawarah desa (musdes) dapat berhasil, dari kedua lembaga tersebut harus melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam penyelenggaraan musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa peran utama seperti menyiapkan musyawarah desa bersama dengan kepala desa dan jajarannya, membentuk kepanitiaan, mendata dan mengundang peserta, serta menyelenggarakan musyawarah desa tersebut. Sedangkan peran utama dari pemerintah desa dalam musdes adalah memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa dengan sebaik-baiknya. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa juga menjadi salah satu indikator penting untuk keberhasilan musyawarah desa. Semakin banyak unsur masyarakat yang dilibatkan maka legitimasi hasil musdes menjadi semakin kuat pula. Maka dari itu musyawarah desa di Desa Sikasur di buat untuk umum dan tidak bersifat rahasia, dengan memberikan hak kepada seluruh warga desa untuk hadir sebagai peserta musyawarah desa.

“Yang menjadi penanggung jawab dalam musyawarah desa itu pihak BPD dan pemerintah desa. Yang membentu struktur kepanitiaan dalam musdes itu BPD, menentukan siapa-siapa saja yang diundang juga BPD, nah pihak desa berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan musdes. Musdes itukan dapat berjalan jika pesertanya ada, masyarakatnya ada jadi setiap musdes kita selalu undang dari seluruh elemen masyarakat supaya musdes ini dapat berjalan dengan lancar. Selain undangan juga kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk seluruh warga masyarakat Desa Sikasur yang ingin hadir dalam musyawarah desa” (Wawancara, M. Aslam Mudiyo, Anggota BPD, 9 November 2022)

Pelaksanaan musyawarah desa di Desa Sikasur diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perwakilan dari unsur masyarakat. Adapun perwakilan masyarakat yang di ikutsertakan dalam musyawarah desa antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan pemuda, dan perwakilan kelompok disabilitas. Adapun unsur yang dilibatkan dalam musyawarah desa di Desa Sikasur diutamakan yang memiliki kepentingan langsung dengan materi yang akan di musyawarahkan.

Agar proses musyawarah desa dapat berjalan secara demokratis masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan dan mengutarakan pendapatnya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pendapat Robbins (2014), karena mneurutnya dalam gaya kepemimpinan

otokratis pemimpin membatasi dan meminimalisir partisipasi karyawan dalam memberikan saran atau masukan. Hal ini membuktikan bahwa Kusin bukanlah pemimpin yang otokrat, melainkan pemimpin yang mengedepankan asas demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Dalam proses musyawarah, Kusin yang bertindak sebagai Kepala Desa membuka forum untuk diskusi dengan terlebih dahulu memberikan paparan tentang materi yang akan diberikan dalam musyawarah tersebut. Setelah proses pemaparan selesai, Kusin sebagai Kepala Desa melakukan interaksi dengan peserta rapat dengan cara menanyakan terkait masukan-masukan yang ingin diberikan dan memberikan ruang untuk penyampaian aspirasi ataupun masukan-masukan yang diberikan oleh peserta rapat. Masukan-masukan yang diberikan pada saat musyawarah tersebut nantinya akan dijadikan sebagai rencana kerja pemerintah desa kedepannya.

“Yang diikutsertakan dalam musdes sudah pasti dari pihak pemerintah desa, BPD, kemudian perwakilan dari masyarakat. Perwakilan dari masyarakat itu ada tokoh masyarakat, tokoh agama biasanya pada kyai para ustadz, dari pemuda juga diikutsertakan, biasanya perwakilan dari karang taruna. Perwakilan perempuan biasanya di ambil dari kelompok ibu-ibu PKK, ada juga perwakilan dari masyarakat disabilitas tujuannya agar mereka juga dapat menyampaikan usulan atau pendapatnya. Sebenarnya kita selalu melibatkan masyarakat dari seluruh unsur, namun terkadang tidak semuanya bisa hadir dalam musdes. Interaksi pak Kusin ketika musdes menurut saya pak Kusin terhitung aktif ya. Karna beliau selalu menanyakan terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan warganya, mempersilahkan menyampaikan pendapat saat rapat, dan termasuk tanggap atas semua masukan dan usulan yang diberikan” (Wawancara, Cahyani, Perangkat Desa, 3 November 2022)

Interaksi yang dibangun oleh Kusin dalam pelaksanaan musyawarah desa dilakukan dengan cara membuka forum diskusi, menanyakan apa saja pendapat atau keinginan dari warganya melalui perwakilan yang hadir dalam musyawarah. Dalam hal musyawarah, Kusin juga memberikan ruang terbuka untuk menampung segala aspirasi ataupun masukan yang diberikan dari seluruh elemen masyarakat, baik melalui perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau aspirasi yang telah dihimpun oleh Kepala Dusun melalui musdus, maupun aspirasi yang diberikan secara langsung oleh masyarakat. Masukan atau saran yang diberikan oleh peserta musyawarah desa (musdes) tentu saja beragam, tidak hanya satu. Maka dari itu, segala masukan yang diberikan oleh peserta musyawarah nantinya akan diakomodir oleh penanggung jawab pelaksanaan musyawarah desa yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Itu dalam satu tahun untuk istilahnya membahas perencanaan desa yang besar itu diadakan musdes yang dihadiri BPD, tokoh masyarakat, ketua RT/RW dan sebagainya dalam kaitannya dengan pembangunan biasanya dilaksanakan lebih dari tiga kali dalam

setahun sesuai dengan kebutuhannya. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan aspirasi dari masing-masing dusun disampaikan di balaidesa melalui musdes itu. Kemudian merencanakan, misalnya kadus siparuk mengusulkan keinginan masyarakat, dan dusun-dusun lain juga menyampaikan. Hasil daripada kesepakatan musdes itulah yang menjadi pedoman kita untuk merancang kegiatan pembangunan di tahun kedepannya lagi. Cara saya membangun interaksi gini, di musdes itu kan di pimpin oleh BPD kemudian kamu dari pihak desa bersikap welcome ayo barangkali ada usulan apa dari mereka yang hadir saya persilahkan untuk menyampaikan segala usulannya, kemudian aspirasi tersebut kita serap. Misal ada beberapa usulan yang disampaikan dalam musdes kemudian anggaran yang tersedia berapa, misal sekian kita sesuaikan dengan usulan yang dinilai paling utama untuk dibangun dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Biasanya masing-masing dusun memberikan 3 usulan. Namun karena anggaran yang tersedia tidak begitu memadai, maka nantinya akan di putuskan masing-masing dusun hanya diterima salah satu usulannya. Kemudian dalam proses pengambilan keputusan mengenai segala hal ada perwakilan perempuan, ada tokoh masyarakat, ada RT/RW, kemudian BPD sudah pasti, kemudian masyarakat duabel juga kita undang juga agar mereka bisa menyampaikan aspirasinya. Dari berbagai profesi juga kita undang, dari kelompok tani, kelompok budaya ada. Segala elemen kita libatkan untuk proses pengambilan keputusan. Usulan yang ditetapkan sebagai rencana pembangunan tahun kedepannya itu atas musyawarah dan mufakat seluruh peserta musyawarah terutama pihak BPD dan desa sehingga menghasilkan keputusan yang mufakat.” (Wawancara, Tono Amboro, Sekretaris Desa, 7 November 2022)

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas, Desa Sikasur termasuk desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, hal ini dapat dilihat dari berjalannya proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan musyawarah desa. Sama halnya yang disebutkan Musyawarah desa di Desa Sikasur dalam pelaksanaannya selalu menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat. Keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama menjadi keputusan akhir dari hasil musyawarah yang dilaksanakan. Seluruh peserta yang hadir dalam musyawarah pada akhirnya harus menyepakati hasil musyawarah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil. Sama halnya yang dikemukakan oleh Lippit & White (1960, dalam Pasolong, 2015) bahwa dalam kepemimpinan yang demokratis, pengambilan keputusan dilakukan secara kooperatif dan mengedepankan kepentingan bersama.

Untuk dapat melakukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertindak sebagai pimpinan musyawarah dapat lebih dahulu menyiapkan rancangan keputusan yang disesuaikan dengan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan dalam musyawarah tersebut.

“Dalam musdes kita selalu menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat. Jadi segala keputusan yang akan ditetapkan harus kita musyawarahkan dulu. Kita tanyakan pendapat seluruh peserta musyawarah, setuju atau tidak dengan hal yang akan ditetapkan. Jika tidak, pasti kan ada masukan lain. Nanti kita pertimbangkan lagi, dengan memperhatikan sebab dan akibatnya. Setelah ditemukan titik tengah, sebelum keputusan dibuat 100% seluruh peserta musyawarah harus menyepakati keputusan tersebut. Kalau yang sepakat hanya beberapa orang, itu belum bisa dikatakan sah. Seluruh peserta musyawarah harus kompak suaranya untuk mendapatkan hasil yang mufakat. Jika sampai akhir tidak mencapai kesepakatan, dalam artian adanya pendirian sebagian peserta musyawarah desa yang tidak dapat disepakati dengan peserta lainnya, maka solusinya adalah mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dengan melakukan polling” (Wawancara, Tono Amboro, Sekretaris Desa, 3 November 2022)

Dalam pelaksanaan musyawarah desa di Desa Sikasur apabila tidak tercapai kesepakatan diantara peserta musyawarah karena adanya pendirian sebagian peserta musyawarah desa yang tidak dapat disepakati dengan peserta lainnya, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Mekanisme pengambilan keputusannya dapat dilakukan baik secara terbuka maupun rahasia. Keputusan yang diambil dengan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila keputusan yang akan diambil tersebut menyangkut tentang kebijakan. Sementara keputusan dengan suara terbanyak yang diambil secara rahasia apabila keputusan tersebut menyangkut orang atau masalah lain. Keputusan berdasarkan suara terbanyak dinyatakan sah apabila diambil oleh peserta dengan jumlah $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai peserta musyawarah dan disetujui oleh separuh ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Desa Sikasur merupakan sebuah desa yang dipimpin oleh Kusin sebagai kepala desa tiga periode berturut-turut yang secara rutin melaksanakan proses musyawarah desa (musdes). Dalam pelaksanaan musdes yang ada di Desa Sikasur, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa khususnya pemerintah desa bertindak sebagai penanggungjawab. Dalam proses musyawarah desa tersebut, Kusin sebagai kepala desa membangun interaksi dengan peserta musyawarah dengan cara membuka forum diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini, Kusin menanyakan pendapat atau usulan dari masing-masing kelompok yang nantinya akan disampaikan oleh perwakilan kelompok. Dalam proses pengambilan keputusan terutama dalam musdes dilakukan secara demokratis, Kusin selalu mengambil keputusan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan seluruh peserta musyawarah yang terdiri dari BPD, Pemerintah Desa, Ketua RT/RW tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh budaya, dan perwakilan masyarakat lainnya.

B. Hubungan Kusun sebagai Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa

1. Hubungan Kusun sebagai Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Hubungan antara Kusun sebagai Kepala Desa merupakan hubungan yang sangat menentukan berjalannya sebuah pemerintahan di desa ditentukan oleh kinerja pemerintah desa (kepala desa dan staf pemerintah desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hubungan antar kepala desa dan BPD tersebut merupakan sebuah sinergi yang menjadi unsur utama dalam mendorong kemajuan sebuah desa. Dalam berjalannya sebuah pemerintahan desa, baik Kepala desa maupun BPD tentu saja memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Secara normatif pertanggung jawaban Kepala Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu kepala desa wajib :“(1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, (2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada masa akhir jabatan kepada Bupati/Walikota, (3) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran, (4) Memberikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran”. Hal-hal yang terkandung dalam Undang-undang tersebut wajib hukumnya bagi Kepala Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin rakyat yang bertanggung jawab terhadap kelompok yang dipimpinnya dan juga bertanggung jawab terhadap rakyatnya.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55, menjelaskan bahwa fungsi BPD adalah “Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa”. Adapun tugas lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menyelenggarakan musyawara desa (musdes) bersama pemerintah desa.

Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu bentuk dari berjalannya sebuah pemerintahan yang ada di Desa. Adanya pemerintah desa dan BPD ini diharapkan bisa berjalan beriringan dengan satu visi dan misi dan dapat bekerja sama dengan baik untuk menata desa. Kedudukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra dalam berjalannya sebuah Pemerintahan Desa, karena dalam hal ini seorang Kepala Desa bertugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan disamping itu BPD secara institusional sebagai wakil dari masyarakat bertindak sebagai pengawas terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

“Kalau hubungan kades dan BPD di Desa Sikasur tentu saja sangat baik. Karena hubungan kerja antara kades dan BPD diibaratkan seperti mitra kerja. Jika kades dan jajarannya yaitu perangkat desa bekerja menjalankan sebuah pemerintahan sebagaimana mestinya, maka BPD bertugas mengawasi jalannya pemerintahan tersebut. Ya intinya kami saling memiliki keterkaitan” (Wawancara M. Aslam Mudiyo, Anggota BPD, 9 November 2022)

Hubungan kemitraan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal pembuatan peraturan desa, sebuah rancangan peraturan desa baik yang berasal dari Kepala Desa maupun yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus dibahas secara bersama, kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan bersama untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa. Namun sebelum mendapat pengesahan bersama terlebih dahulu di mintakan persetujuan dari masyarakat desa lewat musyawarah Desa yang khusus diadakan untuk membicarakan hal ini.

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal menjalankan pemerintahan desa melakukan kerja sama. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan-kebijakan ataupun aturan yang ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, kemudian kepala desa bersama stafnya Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Segala keputusan dan kebijakan yang ditetapkan harus berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD.

“Selama saya menjabat sebagai Kepala Desa hubungan dengan BPD alhamdulillah terjalin dengan baik. Ya saling bekerja sama dan saling mengisi dan menjalankan tugas masing-masing. Sebagai contoh, saya sebagai kepala desa dan perangkat desa ingin membuat peraturan desa, atau ingin memutuskan suatu hal dalam kaitannya yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu tidak serta merta saya memutuskan dan membuatnya sendiri karena semua ada prosedurnya ada undang-undangnya. Tetapi, atas persetujuan BPD dan jajarannya juga. Biasanya untuk memutuskan suatu hal kita adakan rapat terlebih dahulu.” (Wawancara, Kusin, Kepala Desa, 7 November 2022)

Peraturan desa merupakan hasil dari sebuah kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses pemerintahan desa. Peraturan desa ini hukumnya wajib untuk dibuat karena aturan tersebut akan digunakan sebagai bahan acuan agar berjalannya sebuah pemerintahan desa tidak melenceng dari aturan yang berlaku. Kondisi demikian, seperti yang digambarkan oleh Lippit & White (1960, dalam Pasolong, 2015) bahwa dalam kepemimpinan yang demokratis, sebuah organisasi dapat berjalan dengan lancar karena adanya kerja sama yang

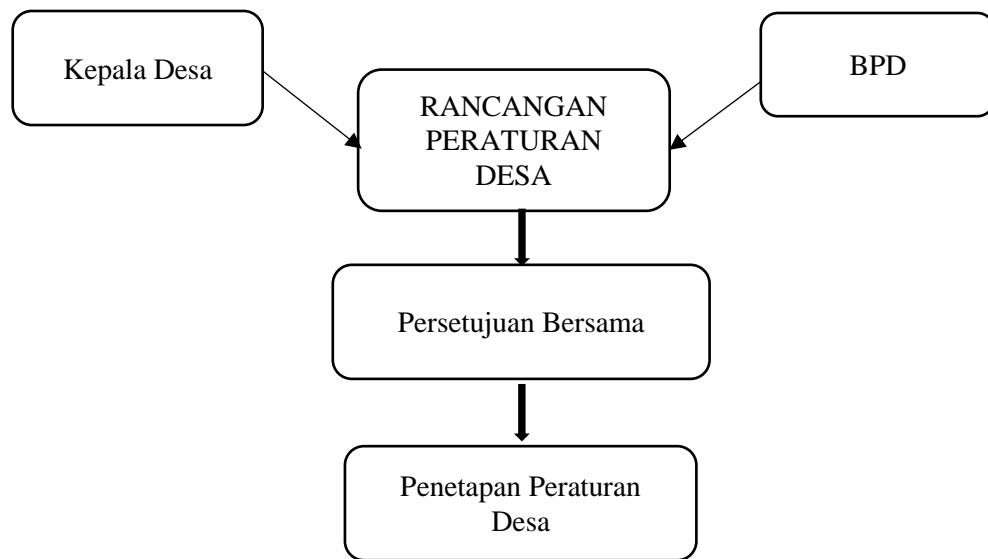
terjalin dengan baik. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kusin dalam menjalin hubungan kerja dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kerja samanya dapat terjalin dengan baik dalam proses perancangan peraturan desa.

Untuk menghasilkan sebuah peraturan desa yang baik maka Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu menyusun sebuah draf rancangan peraturan desa. Segala peraturan desa yang dibuat harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, yaitu melalui tahap awal persiapan yang terdiri dari perencanaan dan persiapan pembentukan peraturan desa, serta tahap kedua yaitu perumusan pembahasan dan teknik penyusunan peraturan desa, pengesahan, dan tahap terakhir yaitu penyebarluasan peraturan desa. Seluruh tahap mekanisme penyusunan peraturan desa tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Sikasur.

“Dalam pembuatan dan penetapan peraturan desa di Desa Sikasur ini selalu dibuat bersama dengan BPD. Karna memang prosedurnya kan seperti itu, bersama-sama membuat peraturan desa untuk menunjang pemerintahan desa kedepannya. Kemudian peraturan yang dibuat juga penuh dengan banyak pertimbangan, karena perlu melalui beberapa tahapan. Seperti awal tahun kemarin, kita baru saja membuat peraturan desa terkait pengelolaan sampah di Desa Sikasur. Karena semakin hari volume sampah di Sungai Paku semakin meningkat, jika dibiarkan mungkin bisa menimbulkan hal-hal negatif seperti banjir dan lain sebagainya. Makanya saya dan BPD bersama-sama membuat dan menetapkan peraturan desa terkait pengelolaan sampah. Tapi tidak berhenti disitu saja, kita juga harus memikirkan solusinya, dengan cara yang seperti apa agar sampahnya juga tidak menumpuk. Alhamdulillah setelah peraturan desa tersebut disahkan, secara kebetulan kami mendapatkan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana berupa mobil sampah dari anggota DPRD Kab. Pematang. Karena peraturan tersebut sudah disahkan, jika ada yang melanggar maka akan dikenakan denda yang sudah berlaku di perdes tersebut, yang nantinya denda tersebut masuk kedalam kas desa yang digunakan untuk dana pengelolaan sampah”. (Wawancara Kusin, Kepala Desa Sikasur, 7 November 2022)

Berdasarkan penjelasan informan diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam pembuatan peraturan desa di Desa Sikasur itu dibuat, di musyawarahkan, dan ditetapkan bersama antara Kusin sebagai Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja. Berikut akan penulis uraikan pola kemitraan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kaitannya dengan pembuatan Peraturan Desa yang akan digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 1 Skema Pola Kemitraan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan Peraturan Desa



Sumber: Analisis Data Primer

Berdasarkan skema diatas menunjukkan hubungan kemitraan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kaitannya dengan pembuatan rancangan peraturan desa, bahwa sebuah rancangan peraturan desa yang baik adalah yang berasal dari Kepala Desa maupun yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian dibahas bersama untuk mencapai persetujuan bersama dan dijadikan sebuah peraturan desa yang ditetapkan secara resmi. Namun, sebelum rancangan peraturan desa tersebut benar-benar ditetapkan, terlebih dahulu di mintakan pendapat dan persetujuan dari masyarakat desa melalui musyawarah desa atau musdus yang khusus diadakan untuk membuat sebuah peraturan desa.

Selain menjalin hubungan secara kemitraan atau bekerja sama dalam proses pembuatan peraturan desa, hubungan kerja antara Kusin sebagai kepala dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dilakukan dalam bentuk konsultasi. Bentuk konsultasi yang jalin dilakukan dalam hal-hal tertentu seperti dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, rencana peringatan hari-hari besar nasional maupun kegamaan, pengangkatan perangkat desa, dan hal lain yang menyangkut proses berjalannya sebuah pemerintahan desa.

Dalam proses pengangkatan atau seleksi perangkat desa di Desa Sikasur yang dilaksanakan pada tahun 2017, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai tim seleksi. Sebagai tim seleksi, yang menentukan segala alur atau proses pengangkatan perangkat desa tersebut adalah Kusin dan jajaran perangkat desa dan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai tim seleksi Kepala Desa dan BPD berperan dalam hal menyusun agenda seleksi,

“Membuat peraturan desa itu memang salah satu tugas pasti ya bagi BPD. Diluar membuat peraturan desa, kan ada juga tugas lainnya. Ya misalnya, jika desa mengadakan acara-acara tertentu seperti Maulid Nabi, peringatan tahun baru Islam, wungon di acara tujuh belasan itu kan juga ada campur tangan BPD dibalikinya. Sebelum dilaksanakan, kita rapatkan dulu dengan pemerintah desa, dan tokoh lain yang terlibat. Kemudian dulu pada tahun 2017, kan disini ada seleksi perangkat desa untuk mengisi jabatan kaur kesra, kaur pemerintahan, dan kepala dusun itu juga saya dan anggota BPD lain turut serta dalam proses seleksi. Dari segi pemerintah desa ada Pak Kusin sebagai kades dan beberapa perangkat desa lain juga termasuk dalam proses penyusunan dan pelaksanaan alur seleksi. Saya dan Pak Dadang dari perwakilan BPD menjadi salah satu dewan penilai pada tes pidato dan tes wawancara. Ya intinya, selama ini saya selaku bagian dari BPD Desa Sikasur dan rekan-rekan lain selalu dilibatkan dalam hal apapun di ranah pemerintahan desa.” (Wawancara Suwarso Aji, Ketua BPD, 9 November 2022)

Adapun hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dilihat dalam bentuk koordinasi dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari pemerintah, baik itu program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya adalah program bantuan sosial (BPNT, PKH, KIP, Bedah Rumah) atau program lainnya. Sebelum program-program tersebut dilaksanakan, dari pihak pemerintah desa harus berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar proses pelaksanaan dan pengawasannya dapat dilakukan dengan mudah.

“Kita juga selalu berkoordinasi dengan BPD, dalam kaitannya dengan hal-hal yang berasal dari pemerintah. Misalnya dalam penetapan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT Dana Desa juga kita diskusikan dulu dalam musdes. Selalu dalam hal apapun kita selalu berkoordinasi terlebih dahulu, karena memang kan aturannya seperti itu. Tujuannya supaya dalam menetapkan KPM tersebut kita tepat sasaran, BPD kan juga menerima aspirasi dari masyarakat, kalau ada yang sekiranya harus ditetapkan sebagai KPM, tapi ternyata tidak dapat bantuan tersebut berarti kan harus dikaji ulang, supaya tidak salah sasaran”. (Wawancara, Kusin, Kepala Desa, 7 November 2022)

Koordinasi yang dilakukan oleh Kusin dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan KPM BLT Dana Desa di Desa Sikasur merupakan sebuah bentuk kerja sama yang sudah terjalin dengan baik. Kerja sama yang dilakukan oleh Kusin dan BPD tersebut dilakukan guna mencapai tujuan bersama dan kesejahteraan umum, hal tersebut sejalan dengan pendapat Lippit & White (1960, dalam Pasolong, 2015) bahwa dalam sebuah kepemimpinan yang demokratis ditandai dengan ciri-ciri seperti mengutamakan pencapaian tujuan bersama, mengedepankan kesejahteraan umum, dan kerja sama yang kompak. Dengan adanya koordinasi

dalam penetapan KPM BLT Dana Desa tersebut diharapkan bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus berjalan beriringan dan seimbang untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan mengadakan rapat atau musyawarah untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa setempat. Musyawarah desa merupakan perwujudan asas demokrasi permusyawaratan, yaitu model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai permasalahan yang dihadapi. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kusin sebagai Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya baik di bidang pembangunan dan maupun penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat selama ini selalu memperhatikan saran dan masukan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa ataupun masyarakat Desa. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, harus bersinergi dengan baik, dan mempunyai pemikiran yang sejalan. Maka dari itu hubungan antara Kusin dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijalin dalam berbagai berbentuk seperti kemitraan, konsultasi, koordinasi, keharmonisan dan sinergitas antara Kepala Desa dan BPD. Sehingga kebijakan-kebijakan, maupun program pemerintahan desa yang di hasilkan bersama dapat di pertanggung jawabkan secara bersama untuk mewujudkan kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

“Sebagai Kepala Desa, dari awal hingga saat ini saya selalu terbuka dengan yang namanya kritik, saran, atau masukan, baik itu kritik dari staf pemdes, dari BPD, maupun dari rakyat. Saya sebisa mungkin menampung dan mencarikan jalan keluar akan keluhan-keluhan maupun masukan dari warga. Ya dalam hal apapun saya sebisa mungkin menomor satukan kepentingan rakyat diatas segalanya” (Wawancara Kusin, Kepala Desa, 7 November 2022)

“Pak Kusin menurut saya orangnya tidak anti kritik ya, beliau sebisa mungkin menerima segala kritik atau masukan yang diberikan baik oleh perangkat desa pada saat rapat atau mendiskusikan hal lain, kemudian terhadap warga juga beliau terbuka. Warga masyarakat Desa Sikasur, semuanya dipersilahkan untuk menyampaikan kritik atau saran kepada beliau. Segala kritik atau saran yang masuk pasti dicari jalan tengah atau jalan keluarnya ya intinya beliau tanggap dengan yang namanya kritik yang diberikan oleh siapapun” (Wawancara Aminudin, Tokoh Masyarakat, 9 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua narasumber diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kusin dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin yang ada di Desa

bersedia menerima kritik dan saran yang diberikan baik oleh warga masyarakat maupun rekan kerjanya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lippit & White (1968) yang menyatakan bahwa dalam gaya kepemimpinan demokratis biasanya bersedia diberi kritik, masukan, atau saran dari bawahannya ataupun dari masyarakat. Lebih lanjut, hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga terjalin dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Berkaitan dengan penyampaian aspirasi, masyarakat dapat mengajukan kritik, saran, maupun masukan-masukannya terhadap kinerja pemerintah desa melalui Kepala Dusun maupun melalui anggota Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) untuk disampaikan kepada Kepala Desa.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam bentuk kemitraan, konsultasi dan koordinasi ini dijalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kemitraan, konsultasi dan koordinasi diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Sekretariat Desa dan aparatur Desa lainnya, bersama Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing sehingga dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, aspiratif, partisipatif dan akuntabel.

2. Hubungan Kusin sebagai Kepala Desa dengan Perangkat Desa

Selain menjalin hubungan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kusin juga menjalin hubungan dengan staf pemerintah desa atau perangkat desa yang dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai kepala desa bersinggungan langsung dengan para perangkat desa seperti sekretaris desa, kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan, kaur perencanaan, kasi pelayanan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan kepala dusun. Sebagai Kepala Desa di Desa Sikasur, Kusin merupakan seorang pemimpin yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dengan para staf pemerintah desa atau perangkat desa di lingkungan kantor Desa Sikasur. Komunikasi yang terjalin antara Kepala Desa dan para stafnya adalah komunikasi dua arah yang ditandai dengan selalu mengharapkan menerima umpan balik dari perangkatnya, kondisi demikian sejalan dengan kerangka pemikiran Lippit & White (1988, dalam Pasolong 2015) yang menyatakan didalam kepemimpinan yang demokratis, komunikasi yang berjalan adalah komunikasi dua arah yang dilakukan secara aktif atau saling merespon. Bentuk komunikasi ini mencerminkan adanya proses gaya komunikasi dua arah antara Kepala Desa dengan perangkat desa dengan bertanya pendapat atau opini dari perangkat desa berkaitan dengan hal-hal yang ingin di diskusikan.

“Hubungannya baik, seperti bapak dan anak. Kalau ada hal yang harus ditanyakan atau dibahas ya kita komunikasikan secara langsung, kemudian jika memberi perintah juga disampaikan secara langsung. selama ini komunikasinya aktif ya, Bapak juga selalu menanyakan pendapat para stafnya jika ingin mendiskusikan sesuatu. Ya saling sharing dalam segala hal”. (Wawancara, Slamet Riyadi, Perangkat Desa, 7 November 2022)

Berdasarkan pendapat informan diatas maka dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dijalankan oleh Kusin sebagai Kepala Desa dan staf nya mencerminkan adanya proses gaya komunikasi dua arah antara Kepala Desa dengan perangkat desa. Komunikasi yang dibangun oleh Kusin dengan para staf pemerintah desa lain dibangun agar dalam pemerintahan yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Menurut Kusin, dengan adanya komunikasi yang lancar antara pimpinan dengan bawahan akan memudahkan informasi yang di peroleh dapat diberitahukan kepada yang bersangkutan.

“Komunikasi dari dulu baik, apa lagi sama perangkat yang setiap hari bekerja sama ya sudah seperti orang tua dan anak. Bahkan dari awal hingga sekarang ini. Ya kita bersama-sama lah jika ada yang ingin saya sampaikan ya saya sampaikan langsung bisanya ketika apel pagi, atau ketika rapat. Kalau tidak bisa secara langsung, ya melalui telepon kan seperti itu. Dengan selarasnya hubungan kepala desa dan perangkat itu nantinya akan terbentuk sebuah pemerintahan desa yang kompak dan berjalan dengan lancar. Kemudian kita ada yang ingin saya diskusikan mengenai apa saja, ya saya tanyakan kepada mereka dalam rapat, yang ini baiknya mana, ini kudu kepiye kudu kepiye nanti mereka juga memberikan umpan balik berupa masukan-masukan, begitu ya”. (Wawancara, Kusin, Kepala Desa, 7 November 2022)

Kesediaan Kusin sebagai Kepala Desa dalam meluangkan waktunya untuk dapat berkomunikasi dan mendekati diri serta bertukar pendapat dengan para perangkat desa, merupakan salah satu tindakan yang menunjukkan bahwa Kepala Desa mampu membina hubungan baik dengan para perangkat desa. Seperti halnya yang diungkapkan diatas bahwa komunikasi dapat membantu keberhasilan pemimpin, komunikasi memiliki peranan penting dalam organisasi demi berjalannya kelancaran suatu organisasi, komunikasi yang lancar antara pimpinan dengan bawahan akan memudahkan informasi yang di peroleh dapat diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Sebagai seorang pemimpin yang ada di Desa, Kusin harus mampu membagi waktunya untuk para bawahannya atau para staf pemerintah desa. Dengan begitu, Kusin dapat mendengar dan mengerti keluhan yang dialami bawahannya kemudian dapat mendengar saran dan masukan yang diberikan oleh para staf pemerintah desa yang nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pemerintah desa kedepannya. Dengan begitu maka akan tumbuh kepercayaan antara Kepala Desa dan perangkat desa dengan bersedia melimpahkan tugasnya jika Kepala

Desa berhalangan untuk melakukan tugas tersebut. Hal ini menunjukkan jika Kepala Desa memiliki sikap kepercayaan kepada perangkat desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa di Desa Sikasur, selama ini Kusin selalu memberikan tugas pada para staf pemerintah desa yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“Betul, tugas yang diberikan oleh Pak Kusin kepada kita memang sesuai dengan tupoksinya masing-masing krena semua sudah ada bagiannya masing-masing. Penyampaiannya juga secara langsung, bisa pada saat rapat Bersama, atau pada saat apel. Terkadang juga by telpon. Tugas yang di berikan juga sesuai dengan kemampuan masing-masing”. (Wawancara, Mustakim, Perangkat Desa, 3 November 2022)

“Ya semua tugas disampaikan secara langsung oleh pak Kusin pada kita semua, sesuai dengan bagiannya masing-masing ya, tidak ada yang melewati batas. Namun, jika ada tugas tertentu yang sifatnya umum, biasanya pak Kusin memberikan tugas tersebut kepada yang dianggap lebih ahli dan menguasai, saling membantu juga lah diantara kita dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa”. (Wawancara, Cahyani, Perangkat Desa, 3 November 2022)

Dalam penyampaian tugas yang diberikan oleh Kusin, disampaikan secara langsung kepada para staf pemerintah desa yang dikomunikasikan pada saat rapat atau pada saat apel di kantor desa. Tugas yang diberikan oleh Kusin sebagai Kepala Desa kepada para bawahannya adalah tugas yang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing bawahannya, tanpa ada paksaan. Namun meski begitu, sama seperti yang diungkapkan Lippit & White (1988, dalam Pasolong, 2015) meskipun tidak ada paksaan, para bawahan perangkat desa harus menyadari akan tugas masing-masing dan kewajiban yang harus dilakukan. Hal tersebut dilakukan oleh Kusin agar dalam penyampaian tugas yang dilakukan secara langsung diharapkan mendapatkan respon atau feedback dari para staf pemerintah desa berkaitan dengan kendala yang dialami. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara Kusin sebagai Kepala Desa dengan perangkat desa diharapkan dapat membentuk sinergitas yang baik dalam upaya memajukan desa. Sebagai Kepala Desa, dalam kaitannya dengan pemberian tugas, Kusin selalu memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada staf pemerintah desa atau perangkat desa untuk menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Atau dapat dikatakan, tidak ada pemaksaan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan.

C. Hubungan Kusin sebagai Kepala Desa dengan Masyarakat Umum

Untuk mendapatkan sebuah kepercayaan maupun simpati dari masyarakat hal yang dilakukan oleh Kusin sebagai Kepala Desa adalah menjalin hubungan dengan masyarakat umum baik dengan berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Kusin,

komunikasi merupakan salah satu cara untuk membangun hubungan yang lebih baik dalam sebuah kelompok, sehingga terciptanya komunikasi yang lebih efektif. Seperti halnya yang disampaikan oleh Young (1996, dalam Pratiwi, 2018) bahwa kepemimpinan merupakan sebuah konsep relasi, yang artinya kepemimpinan dapat berjalan jika ada proses relasi antara seorang pemimpin dan pengikutnya. Agar kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin dapat dikatakan berjalan dengan baik, maka dari itu Kusin mulai membangun relasi dengan pengikutnya yaitu masyarakat Desa Sikasur dengan cara menjalin hubungan baik dengan seluruh elemen masyarakat.

Dengan membangun hubungan yang lebih baik dan terciptanya sebuah komunikasi yang efektif, maka untuk proses saling memahami dan dipahami antara manusia satu dengan manusia lainnya akan lebih mudah untuk dilakukan, karena kebanyakan manusia cenderung susah dan tidak akan bisa mengerti jika cara komunikasi yang kita lakukan belum bisa dikatakan sebagai komunikasi yang efektif, jika komunikasi yang kita lakukan sudah efektif maka bisa membuat orang lain paham dan mengerti akan apa yang sedang kita komunikasikan.

Sebagai seorang pemimpin di lingkup desa, Kepala Desa harus memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan atau komunikasi yang baik dengan warganya. Dalam mengambil simpati masyarakat, Kusin sebagai Kepala Desa di Desa Sikasur melakukannya dengan cara menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan warganya. Kusin sebagai Kepala Desa yang telah menjabat dalam waktu yang lama dikenal sosok pemimpin yang dekat dengan warganya dan memiliki sifat yang ramah, dan suka berbaur dengan warganya tanpa pandang bulu. Sebelum Kusin menjadi seorang pemimpin di Desa Sikasur, beliau juga secara intens menjalin komunikasi dengan masyarakat umum. Komunikasi tersebut diawali dari beliau berkarir sebagai guru olahraga di SD Negeri 01 Sikasur dengan selalu aktif bermasyarakat dengan semua kalangan, baik dari kalangan atas maupun masyarakat dikalangan bawah.

“Menurut saya faktor yang sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pak Kusin itu sangat bergantung dengan kepribadian beliau sendiri. Bahkan sebelum menjadi kepala desa beliau sudah dikenal baik oleh masyarakat karna sikapnya yang ramah, suka menolong menolong orang. Ya intinya dari hal-hal kecil saja yang beliau lakukan itu menurut saya sangat mempengaruhi penilaian dari warga ya. Jadi pada saat beliau mencalonkan diri, sebagian masyarakat sudah mengenalnya karna terkenal sebagai sosok yang ramah” (Wawancara Hendratno, Masyarakat Umum, 3 November 2022)

“Kalau menurut saya, sejak pak Kusin jadi kepala desa dari awal hingga saat ini beliau tidak pernah berubah. Bahkan semakin kesini, menurut saya kedekatannya dengan warga semakin rangket, maksudnya semakin dekat begitu ya. Dari awal menjabat, dia menjadi sosok kepala desa yang sangat ramah, dan terkenal suka menolong. Kemudian,

beliau termasuk yang selalu tanggap terhadap keluhan kesah warga” (Wawancara, Rohidin, Masyarakat Umum, 11 November 2022)

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan kedua informan di atas maka dapat dikatakan bahwa hubungan yang dijalin oleh Kusin sebagai kepala desa dengan masyarakat umum dapat dikatakan terjalin dengan baik bahkan sebelum Kusin menjadi pemimpin di Desa Sikasur. Dengan komunikasi yang terjalin dengan baik masyarakat mulai memandang beliau sebagai orang yang peduli dan bersedia menerima masukan serta memahami kebutuhan dari masyarakat. Dengan begitu, Kusin dapat mendapatkan simpati dari masyarakat melalui gaya kepemimpinan yang dijalankan dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat umum. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Wahjosumidji (1987) yang menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan hubungan antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Kusin dalam hal ini telah menjalin hubungan baik dengan masyarakat umum, sesuai dengan kondisi atau situasi dari masyarakat itu sendiri.

Menciptakan hubungan yang baik tidak terlepas dari cara berkomunikasi dengan melakukan pendekatan antar individu maupun antar kelompok. Dengan terciptanya sebuah komunikasi yang baik antara Kepala Desa dan masyarakat akan menghasilkan hubungan yang harmonis. Sama halnya yang dilakukan oleh Kusin, beliau menjalin hubungan dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Sikasur dengan menjalin komunikasi yang baik dengan para kelompok tani, generasi muda, alim ulama desa, dan lain sebagainya. Seperti yang informan sampaikan:

“Yang menjadi salah satu kekuatan utama saya menjadi kepala desa kan kepercayaan masyarakat setempat. Nah untuk mendapatkan itu yang saya lakukan ya menjalin hubungan yang baik dengan seluruh elemen warga, tanpa terkecuali. Sederhana saja, masyarakat itu kalau kita tanggap dan ramah dengan mereka juga pasti sudah senang. Kalau minggu pagi saya jalan-jalan ke sawah menyapa rombongan orang derep itu ya namanya juga sudah komunikasi. Saya senang mereka juga senang. Kemudian dengan pemuda, biasanya kalau malam minggu rame pemuda tongkrongan di pos ronda, ya saya datang dan ikut nimbrung ngobrol apa saja. Seperti itu kan juga komunikasi, bahkan dari hal kecil seperti itu saya pribadi bisa lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat juga mungkin akan lebih nyaman berkomunikasi dengan saya kalau setiap harinya dari hal kecil kita sudah saling sapa. Kalau menurut saya itu” (Wawancara Kusin, Kepala Desa, 7 November 2022).

Berdasarkan pemaparan informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa untuk menjalin hubungan yang akrab dengan masyarakat, Kusin memulai komunikasi dengan masyarakat melalui hal-hal sederhana seperti saling menyapa jika bertemu di jalan, turut bergabung pada perkumpulan pemuda dan lain sebagainya. Dengan pendekatan-pendekatan seperti itu Kusin

mengharapkan akan semakin dekat dengan masyarakat dan dapat tercipta sebuah hubungan antara Kepala Desa dan masyarakat yang harmonis.

Kusin juga menjalin hubungan yang baik dengan seluruh elemen masyarakat Desa Sikasur tanpa terkecuali, baik dari kelompok tani, para alim ulama yang ada di Desa Sikasur, pemuda, dan lain-lain. Hubungan baik yang terjalin antara Kusin dan masyarakat umum sudah terbangun sejak Kusin berprofesi sebagai seorang guru. Kusin selama menjabat dalam menjalin hubungan atau komunikasi dengan masyarakat dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti mengadakan pengajian umum pada peringatan hari-hari besar Islam sebagai contoh peringatan Maulid Nabi, peringatan Tahun Baru Islam dan lain sebagainya. Dengan segala kegiatan yang dijalankan tersebut menghasilkan hubungan yang sangat baik antara Kusin dengan masyarakat umum. Kemudian, hal lain yang Kusin lakukan agar hubungan dapat terjalin dengan baik dan terjaga dilakukan dengan cara menghadiri setiap undangan yang diberikan oleh masyarakat, baik itu undangan hajatan, atau undangan untuk menghadiri suatu acara yang dibuat oleh Dusun sebagai kepala desa atau dengan cara menghadiri warga masyarakat yang berduka dengan memberikan sedikit bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah.

“Komunikasi antara Pak Kades dan masyarakat menurut saya selama ini terjalin dengan baik. Baik disini karena saya melihat beliau itu sosok pemimpin yang ramah dengan warganya kemudian sering menolong juga apabila warganya ada yang kesusahan. Beliau juga kalau mendapat undangan dari masyarakat selalu datang. Terkadang ada yang memberi undangannya lewat saya karena ada warga yang tidak berani memberikan secara langsung. Beliau mendatangi undangan tersebut bersama dengan saya, mau itu undangan hajatan atau undangan lain semisal ada acara di Dusun beliau juga datang. Terus, jika ada warga yang meninggal beliau juga mendatangi warga tersebut dengan memberikan bantuan secara pribadi. Jadi mungkin warga juga senang dan menilai bahwa Pak Kades itu orang yang dermawan”. (Wawancara Aminudin, Tokoh Masyarakat, 9 November 2000)

“Hubungan Pak Kusin dengan masyarakat menurut saya baik. Jika dilihat dari kepribadian beliau yang terkenal ramah dan loman tentu saja baik hubungannya. Pak Kusin dalam menjalin hubungan dengan warga masyarakat tidak hanya melalui tegur sapa. Tapi untuk menciptakan masyarakat yang guyub dan rukun beliau juga mengadakan acara-acara keagamaan secara rutin seperti dalam peringatan hari-hari besar Islam, tujuannya ya itu agar silaturahmi tetap terjaga antar semua elemen masyarakat”. (Wawancara Mustakim, Perangkat Desa, 3 November 2022)

Berdasarkan pernyataan kedua narasumber di atas maka dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dijalin oleh Kusin sebagai Kepala Desa dengan masyarakat umum terjalin adalah komunikasi dua arah yang terjalin dengan baik. Dalam teori Lippit & White (1968) juga

disebutkan bahwa dalam gaya kepemimpinan demokratis, komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi dua arah yang dilakukan secara aktif. Maksud dari komunikasi dua arah dalam hubungan antara Kusin sebagai Kepala Desa dan masyarakat umum adalah dalam komunikasi yang dilakukan mendapatkan timbal balik atau saling berinteraksi dengan aktif. Sebagai kepala desa Kusin tidak hanya menjalin hubungan dengan cara berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi juga membedayakan dan menggerakkan masyarakat desa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Dalam upaya menggerakkan masyarakat, Kusin juga telah melakukan segala cara salah satunya adalah dengan selalu intens menghadiri acara-acara, seperti acara keagamaan, adat, dan sosial. Salah satunya, seperti di acara pengajian yang diadakan di masjid, hajatan atau pesta, dan ketika melakukan gotong royong, seperti melakukan pembenahan fasilitas, renovasi tempat pemakaman, dan renovasi saluran irigasi yang ada di Desa Sikasur. Sebagai seorang pemimpin, beliau selalu menyempatkan diri untuk selalu memberikan arahan-arahan kepada masyarakat yang menghadiri kegiatan tersebut.

Kusin sebagai seorang Kepala Desa dalam menjalin hubungan dengan masyarakat selalu merasa bahwa saran-saran atau masukan yang diberikan oleh masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan untuk kemajuan kepemimpinan yang dijalankan olehnya dan untuk kemajuan Desa Sikasur kedepannya. Dalam hal ini, beliau mengaku dan selalu menerima apapun bentuk keluhan dari bawahan dan tentunya juga masyarakat Desa Sikasur. Dengan memberikan ruang terbuka kepada masyarakat untuk memberikan kritik atau saran diharapkan dapat menjadi salah satu terjalannya sebuah hubungan yang harmonis antara Kepala desa dan warganya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan saling terbuka.

“Kalau dengan masyarakat dari dulu saya selalu berhubungan baik, sebisa mungkin saya menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Untuk itu kan saya membuat ruang terbuka kepada masyarakat untuk tidak segan-segan mengkomunikasikan kritik atau sarannya dengan terbuka kepada kita. Jadi masyarakat tidak perlu segan untuk mengeluarkan unek-uneknya, nanti kan akhirnya hubungan yang terjalin baik saya sebagai kades atau pemerintah desa dapat berjalan beriringan tanpa memiliki unek-unek” (Wawancara, Kusin, Kepala Desa, 7 November 2022)

Sebagai seorang pemimpin yang baik, memang sudah selayaknya bagi Kusin untuk segala bentuk aspirasi- aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang di mana aspirasi yang disampaikan tersebut juga tak semata membuat pemimpin menjadi rendah ketika menerima sebuah teguran akan sebuah kesalahan yang dilakukan, melainkan dengan menerima sebuah teguran dan memperbaikinya akan menimbulkan sebuah efek yang positif terhadap masyarakat dengan begitu masyarakat tidak akan pernah berpikir tentang sebuah kepemimpinan diktator.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Kusin sebagai Kepala Desa Sikasur dalam menjalin hubungan atau komunikasi dengan masyarakat umum adalah sebagai berikut: (1) Sebagai pemimpin beliau selalu aktif untuk ikut dan menghadiri kegiatan- kegiatan masyarakat,

(2) Selalu intens memberikan pengarahan-pengarahan disetiap kegiatan yang dihadiri masyarakat banyak. (3) Aktif dan selalu berupaya menghadirkan solusi dari setiap permasalahan yang dilaporkan oleh warga, (4) Selalu memberikan edukasi dan selalu terbuka kepada masyarakat terkait mekanisme program desa. Hal tersebut diperjelas pendapat narasumber sebagai berikut,

“Saya pribadi memang sangat mengenal pak Kusin. Dia orang sifatnya seperti apa kepribadiannya seperti apa saya tahu. Bahkan beliau itu jiwa sosialnya sangat tinggi. Kalau ada kegiatan yang diadakan oleh masyarakat beliau selalu hadir, kemudian dalam kegiatan yang diadakan oleh desa yang dihadiri oleh masyarakat beliau selalu mengingatkan kita untuk selalu menjaga kerukunan, menjadi masyarakat yang guyub dan arahan-arahan positif lainnya. Bahkan dulu, Pak Kusin itu pernah menerima masukan mengenai dari perwakilan masyarakat yang meminta dibuatkan jalan menuju makam, agar aksesnya mudah. Tidak berpikir panjang, beliau langsung terima masukan tersebut dengan baik dan mencari solusi untuk merealisasikan hal tersebut apalagi berkaitan dengan anggaran. Kadang ada juga masyarakat yang meminta untuk dibuatkan fasilitas ini dan itu, padahal di sini masyarakat belum tau bagaimana mekanisme dan regulasi sehingga bisa dikerjakannya suatu program, tetapi pak kepala desa selalu sabar, selalu memberikan edukasi, dan pemahaman terkait mekanisme pengerjaan suatu program”. (Wawancara, Tono Amboro, Sekretaris Desa, 3 November 2022)

Sebagai seorang kepala desa tentunya tidak bisa terlepas dari cara membangun sebuah hubungan dengan masyarakat banyak. Hal ini, tentunya bisa menjadi salah satu faktor dan berpengaruh penting untuk menjadi pendukung dalam gaya komunikasi yang dilakukan. Kusin merupakan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat umum termasuk sosok pemimpin yang tergolong dekat dengan warganya, bahkan setiap ada kegiatan sosial dan keagamaan, Kusin selalu duduk berbaur dan berkomunikasi dengan warganya. Dari tindakan yang beliau lakukan tersebut menimbulkan sebuah feedback, yaitu timbulnya rasa kepercayaan dan simpati masyarakatnya terhadap segala bentuk komunikasi yang beliau sampaikan. Kepercayaan merupakan elemen yang mendasar dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, kepemimpinan berkaitan erat dengan kepercayaan. Pada kepemimpinan, kepercayaan berperan dalam perilaku bawahan dan masyarakat, kepercayaan terhadap pemimpin memiliki hubungan positif terhadap berbagai hasil, seperti perilaku kinerja, kepuasan, dan semakin besar kepercayaan antara pemimpin dan bawahannya, maka pertukaran informasi semakin akurat, pemahaman tujuan kinerja semakin baik, dan kualitas komunikasi yang berkembang semakin tinggi.

D. Kebijakan-kebijakan Kusin Selama Menjadi Kepala Desa

Kebijakan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan desa, maka dari itu dalam hal ini kebijakan harus tepat sasaran sesuai dengan standar kebijakan. Yang artinya kebijakan dalam implementasi rencana kerja pemerintah desa harus bisa memecahkan masalah-masalah yang ada pada lingkup masyarakat. Oleh karena itu kebijakan merupakan hal yang sangat menunjang dan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Kebijakan pemerintah secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa program, peraturan dan lain-lain. Sebuah kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila didukung oleh berbagai macam faktor, salah satunya ketepatan pemilihan kebijakan atau keputusan sesuai dengan yang dibutuhkan publik, serta didorong oleh dukungan responsibilitas masyarakat yang partisipatif terhadap suatu kebijakan pemerintah termasuk taat kepada hukum dan peraturan. Namun sebuah negara hukum tentunya tidak begitu saja dapat menjalankan fungsi yang sebenarnya dari hukum itu sendiri, Diantaranya masih diperlukan kesadaran hukum dari setiap warganya, kesadaran tersebut tidak hanya sebatas kepatuhan, akan tetapi pemahaman secara mendalam terhadap tujuan suatu kebijakan yang merupakan intisari suatu keputusan, selain dari pada hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan, seperti ketepatan pengambilan keputusan, serta implementasi yang baik dan benar, juga dengan dukungan dari berbagai elemen dan faktor-faktor yang berpengaruh.

Salah satu kewenangan seorang kepala desa adalah menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Kusin adalah kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik yaitu Kusin sebagai Kepala Desa mengharuskan seluruh perangkat desa lebih mengutamakan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat yang dijiwai rasa pengabdian.

“Kebijakan itu ada banyak yang bapak buat, salah satunya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi bapak mengharuskan kita para staf pemerintah desa terkhusus pada kasi pelayanan untuk mengutamakan dan memudahkan segala jenis pelayanan yang masyarakat desa butuhkan baik dari pembuatan surat menyurat dan lain-lain”. (Wawancara Rizky Mundiati, Perangkat Desa, 12 November 2022)

Dalam bidang pelayanan publik, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di Desa Sikasur dengan mempermudah segala bentuk pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. Maka dari itu masyarakat dapat lebih mudah dalam mengurus sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan administratif. Kondisi tersebut sama Sejak menjabat sebagai Kepala Desa, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Kusin tentu saja beragam. Dalam kebijakan yang dibuat oleh Kusin yang berkaitan dengan pelayanan publik tentu saja mendapatkan respon dari masyarakat, terutama respon positif dari masyarakat.

Dalam kebijakan pelayanan publik yang diterapkan oleh Kusin tersebut, masyarakat Desa Sikasur merasa sangat puas dan terbantu terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa.

“Untuk pelayanan memang dari pihak perangkat desa sangat ramah dan sangat membantu. Jika ada kebutuhan surat-menyurat pasti sangat tanggap. Pengalaman saya pada saat akan membuat surat bawah nikah untuk anak saya juga dilayani dengan baik, ramah-ramah dan cepat jadi” (Wawancara, Ediyanto, Tokoh Masyarakat, 6 November 2022)

“Menurut saya pelayanan perangkat desa dalam melayani masyarakat dapat dikatakan bagus. Responnya cepat, jika ada warga yang kesusahan atau tidak paham dengan persyaratan-persyaratan untuk mengurus administrasi juga dijelaskan secara mendetail. Ya mungkin itu sudah menjadi aturan dari pihak pemerintah desa untuk melakukan pelayanan public dengan baik. Dengan begitu tentu saja masyarakat akan sangat terbantu” (Wawancara, Hendratno, Masyarakat Umum, 3 November 2022)

Berdasarkan pendapat kedua narasumber diatas maka dapat dikatakan bahwa dengan diterapkannya kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada di Desa Sikasur memberikan dampak positif berupa kepuasan dari msyarakat yang merasa sangat terbantu dengan kualitas pelayanan yang baik yang diberikan oleh para perangkat desa, terutama dalam proses pengurusan administrasi. Terdapat kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Kusin yang merupakan bentuk realisasi dari program pemerintah Kabupaten Pemalang. Salah satunya adalah pengadaan mobil siaga desa. Pengadaan mobil siaga desa merupakan realisasi dari program pemerintah Kabupaten Pemalang.

“Kebijakan kan macam-macam, salah satu itu pengadaan mobil siaga. Ya menindaklanjuti program pemerintah kabupaten pemalang, pak Kusin merealisasikan program tersebut di desa kita. Tahun 2020, alhamdulillah kita sudah punya mobil siaga. Dengan direalisasikan kebijakan ini kan bisa menjadi solusi bagi warga untuk kebutuhan mendesak. Dengan mobil siaga ini, masyarakat tak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk sewa kendaraan. Karna dapat dipakai secara gratis oleh masyarakat. Jadi lebih meringankan beban warga yang terkena musibah dan meminimalisir biaya operasional untuk pergi ke rumah sakit” (Wawancara Tono Amboro, Sekretaris Desa, 3 November 2022).

Kebijakan pemerintah Desa Sikasur dalam pengadaan mobil siaga desa merupakan salah satu kebijakan yang populis dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Kondisi tersebut seperti halnya yang digambarkan oleh Lippit & White (1960, dalam Pasolong, 2015) bahwa dalam kepemimpinan yang demokratis lebih mengutamakan pencapaian tujuan dan kesejahteraan umum. Adanya mobil siaga desa ini dapat berguna untuk meningkatkan kualitas hidup dan rujukan waga Desa Sikasur yang sakit atau ingin periksa dilayanan kesehatan seperti

puskesmas dan rumah sakit, Pemerintah Desa Sikasur menyediakan mobil siaga yang tersedia selama 24 jam penuh untuk warga desa yang membutuhkan. Dengan kebijakan pengadaan mobil siaga Desa Sikasur merasa sangat terbantu, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Seperti halnya yang disampaikan oleh narasumber dibawah ini,

“Ya Alhamdulillah sekarang sudah ada mobil siaga. Jadi kalau ada warga yang ingin berobat kerumah sakit besar yang jaraknya lumayan dan tidak bisa ditempuh pakai motor kita diperbolehkan pinjam kapan saja, tinggal datang saja ke balai desa. Jadi kita bisa mengirit ongkos sewa mobil, karena gratis kalau pakai mobil siaga. Ya paling untuk bensin, dan uang makan supir saja kadang kita memang tanggung. Tapi itu saja sudah sangat alhamdulillah sekali. Bahkan jika pada saat kita meminjam ketemu sama pak lurah dan tau kita akan berobat malah diberi uang untuk berobat. Pak lurah memang orangnya kan dermawan sekali” (Wawancara, Nurjanah, Masyarakat Umum, 12 November 2022)

Kebijakan yang dibuat oleh Kusin tidak hanya pada bidang kesehatan, melainkan di beberapa bidang baik itu dibidang pendidikan, lingkungan hidup, ekonomi, dan olahraga. Dalam bidang lingkungan hidup, Kusin membuat kebijakan dalam pengalokasian anggaran dana desa (ADD) digunakan untuk pembangunan drainase pada ruas jalan di sepanjang jalan Desa Sikasur. Pembangunan drainase ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya banjir pada saat musim hujan berlangsung. Karena biasanya, pada saat musim hujan ada beberapa rumah warga yang berada di tingkat yang lebih rendah dari jalan raya terkena banjir dari air yang mengalir di jalan raya.

“Ya macam-macam, kalau kaitannya dengan bidang lingkungan hidup saya memutuskan untuk menggunakan ADD untuk membangun drainase supaya kalau musim hujan tidak banjir. Karena beberapa warga yang rumahnya berada dibagian yang lebih rendah dari jalan raya itu kebanjiran karena kena grujungan air dari jalan. Makannya disepanjang jalan itu alhamdulillah sudah dibangun drainase, supaya airnya mengalir ditempat yang tepat. Aspalnya kan juga jadi lebih awet, kalau airnya tidak tergenang dijalan raya” (Wawancara, Kusin, Kepala Desa, 7 November 2022)

Dengan dibangunnya drainase tersebut, beberapa masyarakat Desa Sikasur yang sebelumnya terkena banjir pada saat musim hujan saat ini sudah teratasi. Beberapa masyarakat yang sering terkena banjir merasa sangat puas dengan kebijakan yang dibuat oleh Kusin tersebut. Seperti halnya yang disampaikan oleh narasumber dibawah ini,

“Betul mba, dulu itu kan hampir setiap musim hujan itu rumah saya kebanjiran. Ya karena rumah saya kan dibawah, kemudian kalau hujan deras air yang dari jalan atas nggrujungnya ke rumah saya. Tidak sekali dua kali, sepertinya yang kebanjiran ga cuma saya karena ada beberapa warga lainnya juga ada yang rumahnya dibawah jalan seperti bu Kami, bu Tur, bu Senen itu kan juga sama kaya saya. Sekarang alhamdulillah sudah

gak banjir lagi mba setelah ada drainase” (Wawancara, Nurjanah, Masyarakat Umum, 12 November 2022)

Salah satu peran kepala desa adalah dalam proses pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari peran fasilitatif yang dapat berupa pemberian dukungan fasilitas dalam berbagai bidang yang dapat digunakan oleh masyarakat. Salah satunya di bidang olahraga. Pada bidang olahraga Kusin telah membuat beberapa kebijakan yang telah memberikan sumbangsih kepada masyarakat berupa fasilitas olahraga yang memadai di Desa Sikasur. Salah satu kebijakan di bidang olahraga adalah pembuatan gor desa yang telah teralisasi pada tahun 2009 yaitu Gor Mahardika Desa Sikasur. Kemudian pembangunan lapangan volley dan yang saat ini sedang berjalan adalah pembangunan mini stadion di lapangan sepak bola milik Desa Sikasur. Seperti halnya yang disampaikan informan bahwa:

“Dari awal beliau menjabat disini itu memang sangat luar biasa banyak gebragan-gebragan terutama dalam pembangunan, kebijakan pembangunan yang pertama kaitannya dengan sarpras yang ada di Sikasur, jadi beliau di periode pertama itu langsung membuat sarana kaitannya dengan olahraga yaitu gedung olahraga ya atau gor yang kita tahu. Selain pembangunan Gedung olahraga atau gor beliau juga membangun lapangan volley, dan yang saat ini sedang berjalan itu pembangunan lapangan sepak bola yang di Karangmulya, itu sedang di baguskan lagi menjadi semi stadion. Kemudian, kalau gor itu kan setiap harinya memang rame dan sering digunakan untuk pelaksanaan turnamen, jadi dari berjalannya gor dari tahun 2009 sampai sekarang itu pemasukannya sudah lumayan banyak. Nah dari hasil PAD yang didapatkan dari gor pak Kusin membuat program bedah rumah, yang isi kebijakannya menyatakan bahwa seluruh hasil yang didapatkan dipergunakan untuk program bedah rumah yang dibuat khusus oleh Desa Sikasur. Sampai saat ini, sudah ada tiga rumah yang berhasil kita bangun dari hasil PAD Gor Mahardika Sikasur”. (Wawancara Cahyani, Perangkat Desa, 3 November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan sebuah kepemimpinan, kebijakan yang dibuat oleh Kusin tidak hanya melihat dari segi pemenuhan fasilitas publik, tapi melihat dari sisi keuntungannya juga yang dapat digunakan untuk menambah pendapatan asli desa (PAD). Kebijakan yang dibuat oleh Kusin untuk menunjang sarana dan prasarana dibidang olahraga bagi masyarakat Desa Sikasur telah memberikan dampak positif. Maka dapat dikatakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kusin merupakan kebijakan yang sangat populis dilihat dari pemanfaatan dan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lippit (1968) bahwa seorang pemimpin yang demokratis dapat memfungsikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang mengutamakan pencapaian tujuan dan kesejahteraan umum terurama bagi rakyatnya. Dengan terealisasinya kebijakan diatas yang memberikan dampak positif terutama bagi warga,

membuktikan bahwa Kusin sebagai seorang pemimpin di Desa Sikasur bertindak sebagai penggerak perubahan terutama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Sikasur dengan pelaksanaan program kerja bedah rumah dengan sumber dana yang berasal dari pendapatan asli desa (PAD) Desa Sikasur.

Kemudian dalam kaitannya dengan kebijakan belanja desa di Desa Sikasur, segala kebijakan yang dibuat memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran pada belanja yang berkaitan dengan program atau kegiatan tertentu. Kebijakan belanja desa di Desa Sikasur diupayakan dengan melakukan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif. Adapun efisiensi utama dalam penggunaan dana APBDes menurut Kusin adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat. Salah satunya yaitu kebijakan di bidang pengembangan usaha ekonomi produktif yang di ungkapkan oleh informan dalam wawancara.

“Dalam membuat kebijakan, saya selalu bertolak pada prinsip peningkatan perekonomian dan kesejahteraan warga terutama dalam hal pembangunan. Untuk meningkatkan tingkat perekonomian warga Desa Sikasur saya berupaya dengan membuat kebijakan untuk mengalokasikan dana desa pada pembangunan pasar desa di Dusun Siparuk. Hal tersebut saya lakukan agar dapat mendongkrak perekonomian masyarakat dan menambah mata pencaharian masyarakat dengan berdagang. Kemudian tidak berhenti disitu, saya juga membangun jembatan antar desa yaitu antar Desa Sikasur dan Desa Karangmoncol, serta antar Desa Sikasur dan Desa Mendelem, tujuannya untuk apa? Ya agar akses antar desa lebih mudah jadi masyarakat desa lain dapat berkunjung ke pasar desa yang kita bangun. Jadi segala kebijakan yang saya tetapkan terutama dalam pembangunan itu semuanya saling berkesinambungan. Jembatan yang terbangun juga tidak hanya bertujuan untuk mengundang pendatang, tetapi ternyata juga memberikan banyak dampak positif bagi warga desa, terutama bagi petani. Dengan dibangunnya jembatan, akses petani yang sedang panen lebih mudah untuk membawa hasil panennya, kemudian harga tanah/sawah juga semakin naik dengan akses jalan yang mudah. Dengan begitu kan sedikit demi sedikit perekonomian masyarakat dapat meningkat. Kemudian, di bidang pariwisata saya juga menetapkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di bidang wisata dengan tujuan untuk memajukan wisata alam yang kita miliki untuk nantinya meningkatkan perekonomian desa dengan tingginya pendapatan asli desa”. (Wawancara Kusin, Kepala Desa, 7 November 2022)

Dengan dibuatnya kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi produktif seperti yang telah di paparkan oleh narasumber diatas pada kenyataanya telah mendapatkan respon

positif dari warga masyarakat Desa Sikasur. Dengan adanya program tersebut masyarakat merasa sangat terbantu terutama dalam bidang ekonomi. Dengan dibangunnya pasar desa, masyarakat Desa Sikasur yang mayoritas berprofesi sebagai petani baik itu petani padi maupun petani sayur merasa sangat terbantu dan dimudahkan untuk menjual hasil taninya pada pasar desa yang aksesnya lebih dekat.

“Ya senang mba sekarang ada pasar, orang sini kalau mau belanja dekat. Saya juga merasa sangat terbantu karna bisa menjual hasil tani saya disitu. Ya saya kan biasanya kalau panen kacang atau panen kangkung jualnya ke randudongkal, berangkat jam 3 pagi karna kalau tidak pagi nanti keburu kedatangan penjual dari desa lain. Tapi sekarang semenjak ada pasar, saya jualnya jadi lebih deket, berangkatnya juga bisa lebih santai karena lebih deket, yang beli ya orang-orang desa sendiri, ada juga orang desa lain. Ya saya terima kasih sekali kepada pak lurah, kita sudah di bangun pasar yang bisa untuk usaha” (Wawancara, Sugiyanto, Masyarakat Umum, 14 November 2022)

Kebijakan lainnya yang dibuat oleh Kusin dalam bidang pembangunan desa adalah dalam pembangunan pariwisata. Untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata yang ada di Desa Sikasur yaitu Curug Bengkawah dan Telaga Silating. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut dan pengeluaran dari pihak desa yang tidak sedikit diharapkan dapat memberikan dampak positif dengan meningkatnya perekonomian desa dan masyarakat desa. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kusin untuk dapat merubah Desa Sikasur menjadi desa yang lebih maju dengan pendapatan asli desa yang tinggi.

“Saya juga membuat kebijakan untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata, karena desa kita kan memiliki potensi, satu kita punya curug bengkawah dan kedua kita punya telaga silating. Untuk hal ini saya sebenarnya terinspirasi dari umbul ponggok yang ada di Klaten. Itu kan desanya maju sekali, karena bisa memanfaatkan potensi. Maka dari itu saya membuat kebijakan untuk pengembangan dibidang pariwisata. Sampai saat ini alhamdulillah sudah 100%, jalan menuju wisata sudah bagus, pintu gerbang wisata sudah jadi, alat rafting sudah terbeli, ya tinggal memaksimalkan brandingnya supaya makin dikenal banyak orang. Saat ini alhamdulillah tamunya sudah banyak, kemarin dari dinas Kab. Pemalang datang, termasuk pak Bupati juga sudah datang kesini bersama rombongannya” (Wawancara Kusin, Kepala Desa, 7 November, 2022)

Upaya yang dilakukan oleh Kusin untuk meningkatkan perekonomian desa dan perekonomian warga adalah dengan membuat kebijakan dalam pembangunan pariwisata. Menurut pendapat beberapa warga, hal tersebut merupakan sebuah kebijakan yang tepat untuk diterapkan di Desa Sikasur. Dengan adanya pengembangan pariwisata tentu saja dapat meningkatkan perekonomian warga, dengan semakin majunya wisata maka dampaknya akan

berimbang para perekonomian warga masyarakat pula. Seperti halnya yang disampaikan narasumber dibawah ini

“Menurut saya tepat sekali ya kalau wisata di Desa Sikasur ini dikembangkan. Jadi keindahan alam yang desa kita miliki juga tidak sia-sia karna bisa dimanfaatkan. Karna sekarang wisata curug sudah semakin bagus, jadi banyak pengunjung yang berdatangan dari lain kecamatan. Di sekitar wisata curug itu juga sekarang sudah banyak warga yang berjualan dan ramai. Jadi dengan begitu kan bisa menambah pendapat warga desa dengan semakin majunya wisata” (Wawancara, Amin, Tokoh Masyarakat, 9 November 2022)

Berdasarkan data hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa selama Kusin menjabat sebagai Kepala Desa dari Periode pertama hingga saat ini telah menetapkan berbagai macam kebijakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengalokasian dana desa. Kebijakan tersebut terdiri dari berbagai macam bidang namun dengan tujuan yang sama yaitu mensejahterakan rakyat. Semua kebijakan yang dibuat oleh Kusin terutama dalam bidang pembangunan merupakan kebijakan yang populis. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lippit (1960) bahwa seorang pemimpin yang demokratis dapat memfungsikan dirinya sebagai penggerak perubahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan terealisasinya segala kebijakan yang dibuat terbukti dengan dampak positif yang didapatkan oleh masyarakat Desa Sikasur salah satunya dengan tingkat perekonomian masyarakat yang semakin membaik.

Berdasarkan hasil analisis data diatas maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin adalah gaya kepemimpinan yang relatif demokratis. Dari beberapa aspek yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan bagaimana gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin sebagai Kepala Desa yang telah menjabat selama tiga periode berturut-turut, seperti bagaimana Kusin berinteraksi dalam musyawarah desa, bagaimana Kusin menjalin hubungan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, maupun dengan masyarakat umum, dan bagaimana Kusin menetapkan sebuah kebijakan selama menjadi Kepala Desa di Desa Sikasur menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang dijalankan adalah relatif demokratis. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lippit & White (1968) tentang gaya kepemimpinan demokratis. Namun, karena dokumen atau data pendukung yang didapatkan tidak begitu kuat, maka penulis menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin adalah relatif demokratis.

BAB V

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN YANG DIJALANKAN KUSIN TERHADAP KEMENAGANNYA KEMBALI DI PILKADES TAHUN 2018

Bab ini membahas tentang legitimasi politik masyarakat Desa Sikasur terhadap kemangan Kusin di Pilkades Tahun 2018 sehingga mempengaruhi jabatan publiknya dan menjadi kepala desa satu-satunya di Kecamatan Belik yang menjabat selama tiga periode berturut-turut. Untuk mengetahui legitimasi masyarakat Desa Sikasur, penulis menggunakan teori David Beetham sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

Konsep legitimasi secara langsung berkaitan dengan sikap atau kepercayaan masyarakat dengan sebuah kepemimpinan atau sebuah birokrasi. Yang artinya, apakah masyarakat dapat menerima dan mengakui kepemimpinan yang berjalan untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang berkaitan dengan masyarakat dalam sebuah organisasi. Legitimasi merupakan sebuah kepercayaan, penerimaan, atau pengakuan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Untuk menganalisis kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin dalam waktu yang lama yaitu tiga periode berturut-turut maka penulis akan menganalisisnya menggunakan teori David Beetham tentang legitimasi politik. Untuk memelihara sebuah legitimasi politik diperlukan tiga hal penting yaitu :

- 1) Kekuasaan harus dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku
- 2) Aturan tersebut harus dibenarkan dan diyakini bersama antara pemerintah dan yang diperintah
- 3) Harus ada persetujuan dari pihak yang diperintah dengan pihak yang berkuasa

Beetham (1988, dalam Sumarlin 2019) menyatakan bahwa agar sebuah kekuasaan sepenuhnya dapat dikatakan sah jika ketiga hal tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti halnya yang kita ketahui, dalam pilkades tahun 2018 yang dimenangkan oleh Kusin tentu terdapat beberapa perbedaan pendapat terutama bagi pendukung pasangan calon lain, terlebih kemenangannya ini merupakan periode ketiga Kusin menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sikasur. Dukungan masyarakat Desa Sikasur untuk Kusin bukan hanya diberikan pada pilkades tahun 2006, dan pilkades tahun 2012. Bahkan di pilkades tahun 2018 pun masyarakat tetap memberikan dukungan terhadap Kusin. Maka tidak heran jika sejak periode pertamanya Kusin selalu unggul dari calon kepala desa lain hingga periode ketiganya. Untuk mempertahankan jabatan publik bukanlah hal yang mudah, terlebih dalam kaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Namun pada kenyataannya Kusin berhasil mempertahankan jabatan publiknya dalam waktu yang lama yaitu masa maksimal yang diberikan oleh konstitusi untuk menjabat sebagai kepala desa yaitu 3 periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Untuk mengetahui bagaimana Kusin dapat memenangkan pilkades tahun 2018 yang mempengaruhi keterpilihannya sebagai kepala desa

tiga periode berturut-turut maka penulis akan menjabarkan analisis berdasarkan pada teori David Beetham seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

A. Kekuasaan harus berjalan berdasarkan aturan

Pada sistem pemerintahan yang ada Indonesia baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau pemerintah ditingkat terendah yaitu pemerintah desa tentu saja memiliki aturan-aturan yang telah disepakati bersama dengan masyarakat itu sendiri. Menjadi seorang kepala desa merupakan sebuah amanat untuk melayani dan mengayomi masyarakat dan juga membangun desa. Dalam menjalankan roda pemerintahan, aturan-aturan yang diterapkan tersebut harus ditaati oleh Kepala Desa. Hal ini dikarenakan seorang Kepala Desa merupakan ujung tombak dari program-program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Jika dalam jalannya sebuah kekuasaan tidak menaati segala aturan yang berlaku maka kekuasaan yang berjalan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan kemenangan Kusin pada pilkades tahun 2018, menjadikan jabatan public dan kekuasaan di Desa Sikasur jatuh kepada tangannya kembali yang artinya Kusin menjadi pemimpin desa yang telah menjabat selama tiga periode berturut-turut. Sebagai seorang pemimpin, Kusin tentu saja mendapatkan banyak penilaian dari masyarakat desa setempat berkaitan dengan kepemimpinan yang dijalankan.

“Pak Kusin itu kan menjabat sudah lama, jadi menurut saya selama menjadi kepala desa beliau itu termasuk pemimpin yang baik dengan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Ya misalnya tugas kepala desa kan diatur dalam undang-undang, salah satunya beliau sebagai kepala desa harus memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila selama menjadi pemimpin, itupun beliau lakukan apalagi Pak Kusin itu seorang nasionalisme sejati. Kemudian mengayomi masyarakat beliau juga selama ini menurut saya mengayomi. Ya tentu saja selama menjadi kepala desa beliau menjalankan segala tugas dan fungsinya serta menaati aturan yang berlaku”. (Wawancara, Ediyanto, Tokoh Masyarakat, 6 November 2022).

Dari penjelasan narasumber diatas menyatakan kepuasan terhadap kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin. Menurutnya selama Kusin menjadi Kepala Desa dari periode pertama hingga saat ini sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Dalam menjalankan sebuah kekuasaan juga Kusin tergolong seorang pemimpin yang menaati peraturan yang berlaku dengan cara melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Beetham (1988) bahwa kekuasaan yang berjalan dapat dikatakan sah apabila diperoleh dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa narasumber yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

“Selama menjadi pemimpin, menurut saya beliau sudah menjalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan ya. Kalau yang saya ketahui kan sebagai kepala desa yang mengendalikan penggunaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, juga pada kenyataannya beliau alokasikan untuk pembangunan. Bisa kita lihat bersama buktinya, jalan desa hampir 100% sudah halus, kemudian pembangunan drainase untuk menghindari banjir juga sudah dibangun, sarana dan prasarana public juga sekarang lebih memadai, infrastruktur semakin maju. Banyak sekali, artinya apa? Artinya sebagai kepala desa beliau sudah berkerja semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku”. (Wawancara, Ediyanto, Ediyanto, 6 November 2022)

Sistem pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang taat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, maka sudah menjadi sebuah keharusan bagi seorang pemimpin baik yang ada di tingkat pusat maupun ditingkat daerah seperti Kepala Desa untuk menaati aturan yang sudah ditetapkan. Dalam menjalankan pemerintahan, sejauh ini Kusin telah menaati aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kepala Desa. Begitu juga dalam program-program yang diberikan oleh pemerintah, agar pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang ada di Desa Sikasur dapat dijalankan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, maka Kusin mengedepankan prinsip transparansi dan tanpa kerahasiaan dalam proses pelaksanaannya. Sebab berdasarkan aturan yang berlaku, dalam pelaksanaan alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah harus dilaksanakan secara transparan dan efektif.

“Kalau bertanya sesuai ya sesuai. Kalau njenengan bertanya buktinya, ya ada banyak. Misalnya dalam proses pengalokasian dana desa, pemerintah mensosialisasikan pada kita untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam penggunaan anggaran. Ya berdasarkan keputusan bersama antara pak Kusin dan kita semua, kita laksanakan perintah tersebut sebagai wujud dari keterbukaan terhadap masyarakat desa berkaitan dengan penggunaan dana desa. Dan itu dipasang di depan balaidesa, tujuannya agar dapat diketahui warga”. (Wawancara, Tono Amboro, Sekretaris Desa, 3 November 2022)

Prinsip transparansi dana desa merupakan sebuah amanat yang harus dijalankan oleh seluruh pemerintah Desa yang ada di seluruh Indonesia yang dituangkan dalam undang-undang desa. Dalam hal ini, Desa Sikasur telah melaksanakan prinsip transparansi yang diatur dalam undang-undang sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cara memasang baliho APBDes di halaman depan kantor Desa Sikasur. Hal tersebut wajib dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan masyarakat juga mengetahui bahwa mereka berhak untuk mengetahui pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di desa tersebut.

Berdasarkan pendapat beberapa masyarakat Desa Sikasur diatas bahwa pada masa pemerintahan yang dijalankan oleh Kusin sudah dianggap baik oleh masyarakat setempat, karena sebagian besar masyarakat menilai bahwa dalam kepemimpinan Kusin segala hal yang dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Beetham (1988) bahwa sebuah pemerintah dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang sah apabila pemerintahan tersebut sudah dijalankan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin sudah dianggap baik oleh masyarakat karena sudah menaati aturan yang ditetapkan sebelumnya, dan dalam hal ini pemerintahan yang dijalankan oleh Kusin telah mendapatka legitimasi dari masyarakat Desa Sikasur.

B. Aturan yang dibenarkan dan diyakini bersama

Dalam sebuah pemerintahan tentu saja terdapat pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Sama halnya dengan pemerintahan yang ada di Desa, terdapat pihak yang memerintah yaitu Kepala Desa dan yang diperintah yaitu masyarakat. Dalam hal ini, antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah merupakan sebuah hal yang tidak dapat di pisahkan karena keduanya bersifat saling membutuhkan satu sama lain. Maka didalam suatu sistem pemerintahan, apabila ingin membuat suatu kebijakan maka harus melalui pertimbangan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga pemerintah bisa membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk kepentingan bersama.

Kekuasaan yang dijalankan harus diperoleh melalui sumber otoritas yang sah, pihak yang berkuasa juga harus memiliki kualitas yang sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Struktur kekuasaan juga harus dijalankan untuk melayani kepentingan umum yang dapat diakui, dan bukan sekedar kepentingan pihak yang berkuasa. Yang artinya, antara Kepala Desa dan masyarakat sebagai yang diperintah harus memiliki kesepakatan bersama dan memiliki kepercayaan satu sama lain. Sama halnya dalam menentukan sebuah kebijakan yang diimplementasikan untuk kepentingan bersama, maka masyarakat harus diikut sertakan dalam pembuatan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa.

“Saya sebagai masyarakat merasa puas dengan kinerja Kusin sebagai Kepala Desa di Sikasur ini. Selama beliau menjadi kepala desa masyarakat merasa di urusi di semua hal. Seperti contohnya dalam bidang pendidikan, karena PAUD di Siparuk belum memiliki Gedung, beliau bersama dengan jajarannya dan perwakilan beberapa masyarakat dalam musrenbangdes memutuskan untuk membangun gedung PAUD dan beliau sudah merealisasikannya baru-baru tahun 2021 kemarin. Jadi semangat belajar anak-anak di Dusun Siparuk juga semakin meningkat, minat untuk bersekolah juga meningkat”. (Wawancara, Siti Fatiha, Masyarakat Umum, 14 November 2022)

Untuk meningkatkan minat sekolah yang tinggi, Kusin bersama dengan BPD dan perwakilan masyarakat yang hadir dalam proses musyawarah desa menyepakati rencana pembangunan gedung PAUD di Dusun Siparuk karena minimnya sarana dan prasarana yang tersedia di dusun tersebut terutama dalam kaitannya dengan bidang pendidikan. Hal ini sama dengan pendapat Beetham (1988) bahwa dalam menentukan suatu kebijakan, antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah harus memiliki kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kusin diambil dalam proses musyawarah rencana pembangunan desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian tokoh masyarakat, pemuda, perwakilan perempuan, dan lain-lain.

Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah untuk mengayomi dan memenuhi segala keinginan masyarakat. Namun bagi Kusin, hal tersebut sudah menjadi kewajiban baginya sebagai seorang Kepala Desa untuk memenuhi segala aspirasi-aspirasi yang diberikan oleh masyarakat dengan bersedia menerima kritik dan saran yang diberikan sebelum kemudian menetapkan suatu aturan atau kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat. Sebagian besar masyarakat Desa Sikasur merasa puas terhadap kinerja Kusin sebagai Kepala Desa dengan memberikan kepercayaan kembali untuk memimpin Desa Sikasur. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa dibawah kepemimpinan Kusin Desa Sikasur menjadi semakin maju terutama dalam bidang ekonomi.

“Sikasur ini menurut saya semakin maju ya dari pada dahulu. Selama di pimpin pak Kusin ekonomi masyarakat juga semakin membaik. Ya karna adanya pembangunan dan pengembangan wisata curug bengkawah yang ada di Desa Sikasur secara langsung masyarakat juga kecipratan dampak positifnya. Dengan wisata yang semakin maju juga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang masih menganggur, seperti bisa berdagang di area wisata, menjadi tukang parkir untuk pengunjung wisata. Dengan begitu kan perekonomian warga juga semakin meningkat” (Wawancara, Nurjanah, Masyarakat Umum, 12 November 2022)

“Pak Kusin itu memang seorang pemimpin yang berjiwa sosial tinggi dan sangat mementingkan kepentingan rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Buktinya, program kerjanya selalu berdasarkan kepentingan rakyat. Ya misalnya pembangunan pasar, itukan dibangun untuk memudahkan warga desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari supaya tidak perlu kepasar lain. Biasanya kan orang sikasur perginya ke pasar randudongkal yang sudah jelas beda kecamatan juga. Jadi dengan dibangunnya pasar desa dapat dijadikan alternatif warga untuk berbelanja ditempat yang lebih dekat. Masyarakat yang berjualan disitu juga yang diutamakan warga desa kita sendiri, supaya apa? Ya supaya dapat meningkatkan perekonomian warga”. (Wawancara Hendratno, Masyarakat Umum, 11 November 2022)

Berdasarkan pendapat kedua narasumber diatas maka dapat dikatakan bahwa dalam pemerintahan yang di pimpin oleh Kusin selama ini banyak memberikan hal-hal positif terhadap warga. Bahkan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan terutama dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan wisata serta pembangunan pasar desa di Desa Sikasur telah memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kusin sebagai Kepala Desa bersama dengan Pemerintah Desa pada kenyataannya telah membuat masyarakat merasa puas dengan keputusan yang dibuat pemerintah desa yang bertujuan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada pada masyarakat, karena dalam hal menentukan sebuah keputusan maupun kebijakan, pemerintah desa yang dipimpin oleh Kusin selalu melibatkan pendapat masyarakat. Maka dari itu, masyarakat merasa puas dengan apa yang sudah pemerintah lakukan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Beethan (1988) bahwa kekuasaan dapat dikatakan sah jika aturan atau kebijakan yang dibuat dibenarkan dan diyakini bersama antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Pada kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin, antara Kusin dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah saling membenarkan dan mempercayai satu sama lain. Jika dianalisis menggunakan teori Beetham (1988) tentang legitimasi politik, maka dapat dikatakan bahwa kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin sebagai kepala desa yang menjabat selama tiga periode berturut-turut mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

C. Persetujuan dari pihak yang diperintah terhadap pihak yang berkuasa

Pada pemilihan Kepala Desa di Desa Sikasur tahun 2018, Kusin ditetapkan sebagai pemenang pada pilkades tersebut dan disahkan sebagai Kepala Desa periode 2018-2024. Kemangan yang diraih oleh Kusin tersebut bukanlah kemenangan yang pertama karena beliau telah menjabat sebagai kepala desa selama dua periode berturut-turut dan menang kembali pada pilkades 2018 yang artinya Kusin akan menjabat kembali sebagai Kepala Desa selama tiga periode berturut-turut. Meskipun mayoritas masyarakat Desa Sikasur merupakan pendukung Kusin, namun ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak memilih Kusin. Namun dalam hal ini, apakah masyarakat Desa Sikasur dapat menunjukkan persetujuan terhadap kemenangan Kusin di Pilkades 2018 yang artinya akan memimpin atau memerintah Desa Sikasur kembali.

Pada teori yang dikemukakan oleh Beetham (1988, dalam Sumarlin, 2019), persetujuan yang diberikan oleh pihak yang diperintah atau masyarakat dapat dibuktikan melalui hubungan yang terjalin dalam sebuah kekuasaan yang melibatkan masyarakat, dan tindakan yang mencerminkan bukti persetujuan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Agar seorang pemimpin mendapatkan legitimasi dari pihak yang diperintah yaitu masyarakat, maka masyarakat tersebut harus menunjukkan persetujuan atas suatu kekuasaan yang berjalan dengan cara terlibat langsung dalam pemilu sebagai syarat sah dalam proses memilih pemimpin. Secara legalitas, Kusin dapat dikatakan sah menjadi seorang Kepala Desa, namun belum tentu

mendapat legitimasi atau pengakuan dari masyarakat. Seperti halnya yang disampaikan narasumber dibawah ini,

“Pada pilkades kemarin memang saya tidak memilih Kusin, melainkan memilih Nurkholis. Bukan berarti apa-apa, tapi memang calon kepala desa yang merupakan lawan dari Kusin adalah Kerabat saya. Tapi ternyata, pilkades ini dimenangkan kembali oleh Kusin. Artinya masyarakat masih mempercayakan Kusin untuk memimpin kembali Desa Sikasur. Jadi ya memang itu kenyataannya, saya sebagai warga masyarakat Desa Sikasur menghargai dan menerima dengan lapang dada hasil pilkades tersebut yang menyatakan pak Kusin menjabat kembali sebagai Kepala Desa”. (Wawancara, Andi, Masyarakat Umum, 13 November 2022)

“Saya memang tidak memilih pak Kusin. Ya kalau njenengan bertanya alasannya kenapa tentu saja saya punya alasan sendiri. Kan kita berhak memilih untuk mendukung siapa, tidak bisa dipaksakan juga saya harus berada di pihak Kusin. Tapi memang yang berhasil menjadi kepala desa memang Kusin, jadi ya saya tetap sebagai warga negara yang baik tetap mengakui bahwa yang memimpin Desa Sikasur saat ini adalah pak Kusin, yang penting tidak korupsi saja”. (Wawancara, Wardi, Masyarakat Umum, 13 November 2022)

Berdasarkan pernyataan kedua narasumber diatas, maka dapat dikatakan bahwa meskipun mayoritas masyarakat Desa Sikasur merupakan pendukung Kusin yang secara otomatis mengakui kepemimpinan Kusin, tapi beberapa orang yang notabenehnya bukan pendukung Kusin diatas juga menunjukka ekspresi persetujuan dan mengakui bahwa Kusin merupakan kepala desa yang memenangkan pilkades 2018 dan seorang pemimpin di Desa Sikasur.

Dalam berjalannya sebuah pemerintahan yang berjalan harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang diperintah yaitu masyarakat terhadap pihak yang berkuasa yaitu pemimpin atau dalam pemerintahan desa yaitu Kepala Desa. Tanpa terkecuali, seluruh masyarakat harus memberikan ekspresi persetujuan terhadap pihak yang diperintah dengan tujuan agar semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat diterima oleh semua elemen masyarakat.

“Meskipun saya awalnya tidak memilih pak lurah pada pemilihan, tapi ternyata beliau sosok pemimpin yang peduli dengan rakyatnya. Ya itu saya rasakan sendiri, meskipun bukan pendukungnya, pak lurah tidak pernah membedakan warganya. Kemudian sebagai petani, saya merasa sangat terbantu dengan adanya jembatan yang dibangun oleh pak lurah. Jadi saat panen saya tidak perlu menggotong padi jauh-jauh karena sekarang sudah ada jalannya dan jembatannya. Memang pak lurah pantas menjadi pemimpin di desa ini”. (Wawancara, Sugiyanto, Masyarakat Umum, 14 November 2022)

Ekspresi persetujuan yang diberikan oleh masyarakat tersebut tidak serta merta diberikan dengan terpaksa. Melainkan berdasarkan penilaiannya terhadap kinerja Kusin sebagai Kepala Desa. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Kusin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi simpati masyarakat terhadap kepemimpinan yang dijalankan olehnya. Pada saat Kusin menjabat sebagai Kepala Desa, pembangunan di Desa Sikasur menjadi semakin berkembang tidak hanya dipusat desa saja yang pembangunannya begitu pesat, tetapi di dusun-dusun juga. Seperti pemeliharaan fasilitas publik, pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan pendapat narasumber bahwa:

“Meskipun saya bukan orangnya pak Kusin, tapi saya akui beliau memang pemimpin yang hebat. Selama beliau menjadi kepala desa, di setiap periodenya selalu ada perkembangan selalu ada kemajuan. Jalan-jalan desa juga halus semua, perekonomian warga juga dipikirkan. Pembangunan juga jelas, meskipun awalnya meragukan sekarang saya percaya kepada pak Kusin. Bahkan jika tidak ada peraturan, mau pak Kusin memimpin Desa Sikasur selamanya juga tidak apa-apa”(Wawancara, Suwardi, Masyarakat Umum, 14 November 2022)

Pernyataan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap kepemimpinan Kusin sebagai Kepala Desa yang berhasil menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa dengan suksesnya bidang pembangunan. Majunya bidang pembangunan yang ada di Desa Sikasur membuat masyarakat merasa semakin dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Persetujuan yang diberikan oleh masyarakat sesungguhnya sangat bergantung dengan bagaimana kepribadian pemimpin itu sendiri, terlebih pada pak Kusin yang notabenehnya pernah menjabat di periode-periode sebelumnya. Yang menjadi salah satu kekuatan seorang pemimpin adalah dengan memenuhi hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan begitu, seorang pemimpin lebih mudah mendapatkan simpati dari masyarakat. Dari segi kepribadian, maupun gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin selama ini telah menarik banyak perhatian masyarakat secara luas. Dimata masyarakat, Kusin merupakan sosok pemimpin yang rendah hati, berjiwa social tinggi, namun dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas.

Masyarakat Desa Sikasur telah menyetujui kemenangan Kusin pada pilkades tahun 2018 dan menyetujui kepemimpinan yang dijalan dengan menilai bahwa selama menjadi Kepala Desa, Kusin merupakan sosok pemimpin yang baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Beetham (1988, dalam Sumarlin, 2019) bahwa persetujuan akan kekuasaan dapat dibuktikan melalui tindakan yang mencerminkan sikap setuju dari pihak yang diperintah yaitu

masyarakat. Karena masyarakat Desa Sikasur mengakui Kusin sebagai seorang pemimpin maka dapat dikatakan bahwa kepemimpinan yang dijalankan tersebut dinyatakan legitimate.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh David Beetham (1988, dalam Sumarlin, 2019) bahwa menurutnya terdapat 3 bagian penting untuk melahirkan sebuah legitimasi yaitu kekuasaan harus dijalankan berdasarkan aturan yang dibuat, aturan harus dbenarkan dan diyakini bersama antara pemerintah dan yang diperintah, dan pihak yang diperintah harus memberikan ekspresi persetujuan terhadap pihak yang berkuasa. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat karena memenuhi tiga bagian penting yang terdapat dalam teori yang dikemukakan oleh Beetham.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab penutup ini peneliti akan menarik kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian disajikan di bab-bab sebelumnya. Kemudian peneliti juga akan memberikan saran yang diajukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini diharapkan dapat membantu pembaca agar dapat mengetahui dan memahami inti pembahasan dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang penulis lakukan tentang gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin selama menjadi Kepala Desa di Desa Sikasur dan dampaknya terhadap keterpilihannya di pilkades 2018 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin sebagai Kepala Desa yang telah menjabat selama tiga periode berturut-turut di Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya adalah gaya kepemimpinan yang relatif demokratis. Karena dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam musyawarah desa, Kusin selalu melakukannya dengan cara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan seluruh staf pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat lain yang meliputi pemuda, perempuan, perwakilan adat, perwakilan masyarakat disabilitas, dan lain sebagainya. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, Kusin memberikan keleluasaan kepada seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam musyawarah untuk memberikan pendapat atau usulan. Dalam membuat peraturan desa atau kebijakan, Kusin juga selalu bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak-pihak yang terkait untuk merancang, membahas, dan menetapkan peraturan desa. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Kusin juga tergolong pemimpin yang tidak anti kritik yang artinya Kusin bersedia menerima kritik dan saran yang diberikan oleh bawahan maupun masyarakat. Kemudian, Kusin sebagai Kepala Desa selalu mengutamakan pencapaian tujuan dan kesejahteraan masyarakatnya melalui kebijakan-kebijakan populis yang diterapkan seperti penyediaan mobil siaga desa, pembangunan infrastruktur seperti sarana pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan fasilitas public, pembangunan ekonomi seperti pengembangan wisata dan pembangunan pasar yang bertujuan untuk mendorong perekonomian warga masyarakat Desa Sikasur. Pada berjalannya sebuah pemerintahan desa, Kusin dalam memberikan tugas kepada bawahannya atau perangkat desa sejauh ini sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat desa dan memberikan keleluasaan kepada mereka untuk menjalankan tugas dan kewajiban dari masing-masing individu. Dikatakan demokratis karena dokumen atau data penelitian yang didapatkan penulis tidak begitu kuat, dan keterbatasan penulis dalam

memperoleh data maka penulis menyimpulkan gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin adalah gaya kepemimpinan yang relatif demokratis.

2. Kemenangan Kusin sebagai Kepala Desa pada pilkades 2018 di Desa Sikasur tidak terlepas dari legitimasi yang diberikan oleh masyarakat Desa Sikasur. Namun berdasarkan analisis data penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin selama menjabat sebagai kepala desa mempengaruhi kemenangan Kusin dan berhasil membangun kepercayaan public. Kemenangan Kusin dinyatakan sah karna mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Masyarakat memberikan pengakuan dan kepercayaan pada Kusin untuk memimpin Desa Sikasur karna Kusin dinilai sebagai sosok pemimpin yang baik. Dikatakan baik karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa dijalankan dengan benar atau tanpa melanggar aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, kemudian segala aturan atau kebijakan yang dibuat oleh Kusin selama menjabat sebagai Kepala Desa telah dibenarkan bersama oleh masyarakat bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang benar, dan pada kemenangannya di pilkades tahun 2018 telah mendapatkan ekspresi persetujuan dari masyarakat baik itu pendukungnya maupun bukan pendukung Kusin sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Beetham dalam teorinya bahwa kekuasaan dapat dianggap sah apabila memenuhi tiga bagian penting seperti yang disebutkan diatas. Dalam kepemimpinan yang dijalankan oleh Kusin sejak periode pertama hingga saat ini telah mendapatkan legitimasi yang sah dari masyarakat Desa Sikasur.

B. Saran

Berdasarkan paparan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai dasar bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil laporan penelitian yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Dengan keberhasilan gaya kepemimpinan demokratis yang dijalankan oleh Kusin selama tiga periode masa jabatannya di Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pematang, diharapkan dapat dijadikan semangat dan pembelajaran bagi para kandidat Kepala Desa lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di tingkat desa.
2. Dari banyaknya gaya kepemimpinan, gaya kepemimpinan demokratis seperti yang telah dijalankan oleh Kusin sebagai Kepala Desa yang telah menjabat selama tiga periode berturut-turut dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pemerintahan khususnya pemerintahan di tingkat desa, sehingga nantinya dapat menghasilkan output yang sesuai dengan asas demokrasi di dalam kehidupan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Muzadi dan Fitriyah, 2020. *Kemenangan Hattrick: Strategi Keterpilihan Een Rusmiyati dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kota Cirebon*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.5 No. 2, Tahun 2020, Universitas Diponegoro.
- Andi, M. D. F., Indrawan, T., Komeyni, R. (2018). *Kemenangan Petahana dalam Kontestasi Bruce Bueno dan Alastair Smith, The Survival Politics* (Penerjemah: Budianto Suratno). Rosdakarya: Bandung, 2005, Hal. 31
- Cholillah, S. P., Faizah, B., Ade Siska, G. (2020). *Strategi Marketing Politik Kepala Desa Petahana pada Pilkades di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.4, No.4
- Daswati. 2014. *Servant Leader, Agenda Reformasi perguruan Tinggi*. Depok. Independent Generation
- Dimas Ivan Anggara, Sulton Sulton, Ambiro Puji Asmaroini. *Analisis Strategi Politik Calon Kepala Desa Incumbent Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Desa Di Desa Balong Tahun 2019*. Edupedia 3 (2), 71-78, 2019
- Djarmiko, Yayat Hayati, (2002). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Dola Eriko, Jhon Retei Alfri Sandi. *Strategi Pemasaran Politik Kepala Desa Petahana Dalam Pemilihan Kepala Desa Simpang Naneng, Kecamatan Karusan Janang Kabupaten Barito Timur*. Wacana Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin, Vol. 6 No.2 (2019).
- Encep Syarifudin, 2004. *Teori Kepemimpinan*. Dosen Fakultas Tarbiyah, STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Serang, Banten. Al-Qalam : Vol. 21, No. 102.
- Endik Hidayat, Budi Prasetyo, Setya Yuwana (2019). *Runtuhnya Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri*. Jurnal Politik 4 (1), 53-58, 2018
- Fahmid Imam Mujahidi, Identitas Dalam Kekuasaan ,2012, Makassar: Innawa
- Faizah Bafadhal, Cholillah Suci Pratiwi. *Strategi Marketing Politik Kepala Desa Pertahana pada Pilkades di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Jabung Timur*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan4(4), 312-319, 2020.
- Fauzia Fitrianingrum, Mada Sukmajati, 2017. *Analisis Kemenangan Petahana (Studi Kasus Badingah, Bupati Gunungkidul Dua Periode)*. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- H. Malayu Hasibuan. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: 2003. Hal. 171.
- Harbani, Pasolong (2008). *Kepemimpinan Birokrasi* (Bandung : CV. Alfabeta) Hal. 5
- Herlan Lagantondo, 2019. *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso*. Jurnal Ilmiah Administratie, Vol. 12 No.1

- Khorion, Ahmad Siboy (2018). *Kemenangan Petahana (incumbent) pada Pilkada 2015 di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang: Strategi Politik dan Marketing Politik*. Publisia (Jurnal Administrasi Publik). Vol. 3 No. 1
- Malayu Hasian. *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*. Rineka Cipta (jakarta, 2010) hl; 40
- Nawawi, B. P. (2019). *Perilaku Pemilih Dalam Menentukan Pilihan Terhadap Kepala Desa Petahana Pada Pwmilihan Kepala Desa Simpursia Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Tahun 2015*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. repository.umy.ac.id/ handle/123456789/29148
- Nilamsari, N., 2014. *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*. Wacana, 13(2), 177-181.
- Nugrahani, D. F., 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 1, issue 1. digilib.fkip.univbantara.ac.id
- Pratiwi, Kowara Intan. *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mendukung Pelayanan Masyarakat”(studi pada Kantor Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)*. Diss. Universitas Brawijaya, 2018.
- Rahmadi, 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antari Press
- Ramlan Subakti, 2010. *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2010, Hal. 179
- Rex Tiran, “*Kemenangan Petahan dan Demokrasi Lokal dalam Pilkada Kabupaten Kupang Tahun 2013*” Tesis Program Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2013), hlm. 1
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jilid 1, Edisi 8, Prenhallindo, Jakarta.
- Rohman, T., Astuti, P., & Fitriyah. (2013). *Strategi Pemenangan Petahana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ngawi 2010*. Journal of Politic and Government Studies, 446–461.
- Saiful Illah, Nur Ahmad Syaifudin (2019). *Strategi Pemenangan Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoardjo Tahun 2015*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, 2010.
- Sholeh, N. (2013, februari 16). *Membangun Karakter dan Kepribadian*. Retrieved oktober 29, 2013,
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Somantri, G. Rusliwa, 2015. *Memahami Metode Kualitatif*. Makara Human Behavior Studies in Asia,9(2), 57-65
- Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior: Concepts, Controversies and Applkation* (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 8 th edition, 1998), h. 347.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Akualitatif, dan Kombinasi)*, (M.P. Dr. Yuyun Yuniarsih (ed.)). Alfabeta, CV.
- Supardi, 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis* (S. Malian (ed.))z. UII Press.

- Taufiq Rohman, 2010. *Strategi Pemenangan Petahana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ngawi 2010*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
- Tegar Wahyundri S, 2020. *Faktor-faktor Kemenangan Petahana Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Solok Pada Masa Pandemi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Andalas.
- Thoha, Miftah, 2001. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2009. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Wahjosumidjo.1987. *Pengertian Kepemimpinan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Semarang
- Yuniazma Zelina, Endang Sulastri, Sumadno, Lusi Andriyani, “*Strategi Politik Pemenangan Petahana Pasangan Hj. Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2015*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. *Jurnal Pilitik Indonesia Independen*, Vol.2 No.1 Tahun 202

